

**CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SEBAGAI ACUAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021-2026**

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang dan tidak harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 tujuan utama yakni berkelanjutan ekologis yakni menjamin eksistensi sumber daya alam, berkelanjutan ekonomi yakni efisiensi ekonomi serta berkelanjutan sosial yakni keanekaragaman budaya

**H. Syarifuddin Kadir
H. M. Anshar Nur
Ichsan Ridwan
Baharuddin
Sadang Husain**



**CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SEBAGAI ACUAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021-2026**



**H. Syarifuddin Kadir
H. M. Anshar Nur
Ichsan Ridwan
Baharuddin
Sadang Husain**

**CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SEBAGAI ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021-2026**

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM
Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom
Baharuddin, S.Kel.M.Si
Sadang Husain, S.Pd., M.Sc



Penerbit CV. BATANG

**CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SEBAGAI ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021-2026**

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM
Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom
Baharuddin, S.Kel.M.Si
Sadang Husain, S.Pd., M.Sc

Diterbitkan oleh: **CV. BATANG, 2021**
Penerbitan Buku
Jl. Alalak Utara RT. 02 RW. 01 Kelurahan Alalak Utara
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kode Pos 70125
Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Telp. 0813 5001 0956

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali untuk kutipan singkat demi
penelitian ilmiah atau resensi

iv + 182 halaman, 17,6 x 25 cm
Cetakan pertama, Maret 2021

ISBN: 978-623-95666-7-8

Dewan Redaksi:

Editor : Halimudair, S.Pd. dan Hery Fajeriadi, S.Pd., M.Pd

PRAKATA PENULIS

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, petunjuk dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan “Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah (RPJMD) Bumbu 2021-2026

Salah satu komitmen Indonesia dalam mensejahterakan rakyat dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui Permendagri Nomor 7 tahun 2018, diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, akademisi, LSM, yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2026.

Banjarbaru, Maret 2021
Penulis

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
NIP. 19630408 198903 1 018

SINOPSIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Ruang Lingkup	2
BAB II TINJAUAN TEORI KLHS RPJMD	3
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	3
2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)	6
BAB III KONDISI UMUM Muatan KLHS.....	12
3.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan	12
3.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup.....	22
3.3 Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan.....	33
3.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	65
3.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim..	69
3.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	76
BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	82
4.1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional .	82
4.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target.....	87
4.3. Indikator TPB yang Tidak Ada Data	90
4.4. Indikator TPB yang Tidak Ada Di Wilayah Kajian	93
BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	94
5.1. SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Sudah Mencapai Target Nasional.....	95
5.2. SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Belum Mencapai Target Nasional.....	100
5.3. SKPD dengan Indikator TPB Tidak Ada Data.....	102
5.4. PD dengan Indikator TPB Tidak ada di Wilayah Kajian	106
BAB VI ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI	107
6.1. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH.....	107
6.2. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH	127
6.3. Program dan Kegiatan di luar indikator TPB	170
6.4. Skenario Proyeksi Keuangan KLHS RPJMD 2021-2026	171
BAB VII KESIMPULAN	179
DAFTAR PUSTAKA	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, namun permasalahan lingkungan sekarang ini menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Berbagai dokumen dan kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta indikator kinerja RJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunan RPJMD juga diperlukan masukan yang partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pada pasal 2 ayat 1 Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya ayat 2 KLHS RPJMD menjadi pertimbangan

dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ini memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk Kabupaten Tanah Bumbu 220 indikator. Hasil analisis indikator TPB akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD. Pada dasarnya diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan akan terintegrasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026 dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 adalah:

1. Melakukan kajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu
2. Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi pelaksanaan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 – 2026

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 ini mencakup:

1. Kondisi Umum Daerah yang mendukung RPJMD
Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.
2. Capaian indikator TPB/SDGs
Capaian indikator TPB/SDGs berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pembagian Peran
Pembagian Peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORI KLHS RPJMD

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Tanah Bumbu terlebih dahulu dilaksanakan KLHS sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), pada Pasal 2 Ayat 2 KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada Pasal 23 dinyatakan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya Pasal 26 dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal rancangan teknokratik RPJMD sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik.
2. Dalam hal RPJMD telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan penandaan sasaran dan program terkait pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD periode berikutnya.

Prinsip hirarki perencanaan menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi perumusan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam penetapan periode perencanaan.

Dokumen RPJPD menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka menengah dan tahunan, oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan harus dapat memastikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di level pusat seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian serta dokumen perencanaan di level daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Tanah Bumbu serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu . Hubungan antar dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam proses penganggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan juga erat kaitannya dengan keselarasan antar jangka waktu perencanaan. Setiap dokumen perencanaan yang disusun harus memastikan adanya sinergi dengan dokumen lain pada skala waktu berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen jangka menengah harus memperhatikan pedoman yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Pada level yang lebih mikro, dokumen perencanaan tahunan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) mencakup RPJP dan RTRW menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), yaitu RPJM, baik di level pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota serta dokumen perencanaan sektoral, yaitu Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Pada level yang lebih operasional, dokumen jangka menengah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



Gambar 2.1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen RPJMD menjadi arahan bagi perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dan perencanaan tahunan lainnya. Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya, permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta untuk menyelaraskan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan.

Dokumen RPJMD ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini juga sebagai acuan dalam menilai kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan.

2.1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan visi dan misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan;
2. Menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu , APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
3. Mengintegrasikan pembangunan pemerintahan di semua sektor dan semua level;
4. Menjadi acuan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ;
6. Mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu ;
7. Mempertajam indikator ukuran pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu .

2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

2.2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Kerap (2002) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai nilai ekonomi, nilai moral, dan nilai ekologi. Generasi masa kini yang sedang melaksanakan pembangunan, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang dan alam (Pawłowski, 2008). Tanggung jawab moral pemangku kepentingan adalah memberikan kesempatan yang sama, bahkan lebih baik bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, hal ini merupakan hal yang disebut sebagai “prinsip keadilan antar generasi” (Hull, 2008). Pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi masa kini dan mendatang.

Pembangunan berkelanjutan telah berbentuk rezim internasional sehingga agenda pembangunan berkelanjutan menjadi nilai yang umum di dunia. Pembangunan Berkelanjutan Global (*Sustainable Development Goals*) merekomendasikan kerangka menyeluruh yang mendorong masyarakat kepada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Pembangunan berkelanjutan global seringkali disebut sosial inklusif atau pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Agenda SDGs bertujuan mendorong jalannya pemerintahan yang baik (Sachs, 2015b). Secara global, panduan SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, namun dengan penyesuaian melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditetapkan 17 tujuan, 94 target, dan 319 indikator.

Harris (2000) dalam Fauzi, (2004) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri;
2. Keberlanjutan lingkungan, dimana sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; dan
3. Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di

Johanesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk diintegrasikan ketiga pilar tersebut. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif, dilihat dari elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan keadilan intra dan antar generasi (Wibisana, 2017).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat diukur berdasarkan panduan dari PBB menurut Soemarwoto (2006), setidaknya ada empat tolak ukur dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tersebut harus pro-lingkungan, pro-rakyat miskin, pro-perempuan, dan pro-lapangan pekerjaan. Mengukurnya dapat menggunakan berbagai indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks lingkungan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan data tersebut, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat dievaluasi secara terukur dan menilai seberapa rasional janji-janji yang dipaparkan oleh para pemimpin dan partai-partai politik kita bersama implementasinya di lapangan.

Kegagalan pembangunan berkelanjutan yang terjadi saat ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri (Capra, 1997; Hughes, 2000). Ketika dasar perumusan kebijakan menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama, seringkali kebijakan yang dihasilkan bersifat parsial atau pragmatif, terlalu menyederhanakan kompleksitas lingkungan, serta memanjakan kebutuhan ekonomi manusia (Hempel, 1996; Attfeld, 1999; Ingold, 2000). Akibatnya, seringkali terjadi kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bahkan, Hull (2008) mengatakan bahwa antroposentrisme yang menyebabkan manusia menjadi homo economicus, manusia yang selalu menjadi kemakmuran ekonomis sebagai ukuran segala tindakannya.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya.

2.2.2 Tujuan Utama dan Target Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan utama Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun.
2. Mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan.
3. Menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utama pembangunan berkelanjutan mengentaskan kemiskinan, tetapi Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

2.2.3 Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan beberapa indikator pembangunan menunjukkan belum seimbang pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Pembangunan lebih banyak menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial, namun memberikan tekanan pada lingkungan. Penggunaan IPB (Indeks Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan komposit dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan juga menunjukkan capaian pembangunan yang belum optimal. Nilai IPB menunjukkan bahwa secara nasional pembangunan berkelanjutan baru mencapai dua pertiga dari nilai maksimum. Tekanan dari aspek lingkungan pada akhirnya memberikan koreksi atas kemajuan yang dicapai oleh dimensi ekonomi dan sosial (Fauzi dan Oxtavianus, 2014).

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan TPB. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan sumberdaya alam dengan kegiatan ekonomi diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Terlihat jelas bahwa perwujudan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sumberdaya menjadi dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Menurut Sutamiharja (2004) terdapat enam (6) sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-

batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*;

2. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang baik bagi generasi yang akan datang;
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi;
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*);
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi; dan
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

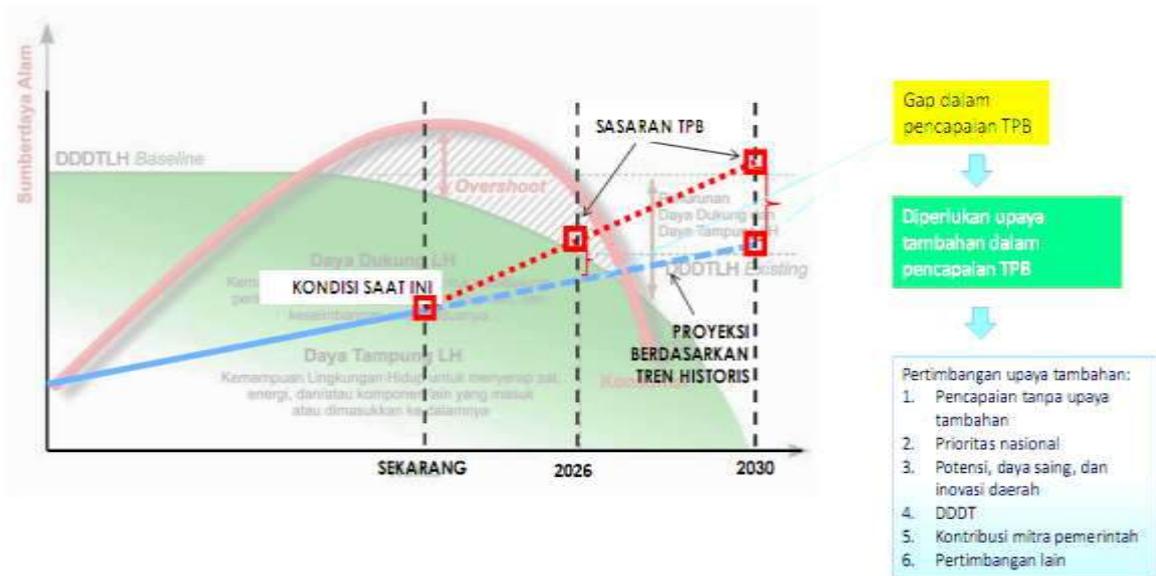
Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

2.2.4 Mekanisme Perumusan Proyeksi Pembangunan Berkelanjutan

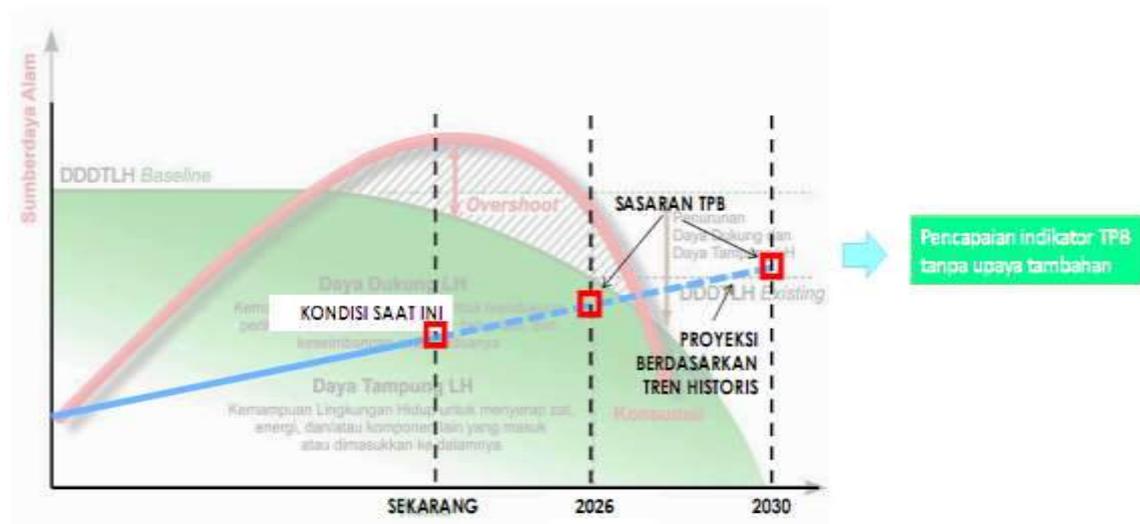
Alternatif proyeksi KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Tanah Bumbu . Alternatif proyeksi disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif ini disusun mempertimbangan: 1) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; 2) potensi, daya saing dan inovasi daerah; 3) daya dukung dan daya tampung daerah; dan 4) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah hasil FGD.

Alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB/SDGs merupakan perkiraan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tersebut disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan dan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan secara visual diperlihatkan pada Gambar

2.2 dan Gambar 2.3.



Gambar 2.2 Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan



Gambar 2.3 Proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Isu strategis adalah rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang dimaksud berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun sasaran strategis merupakan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

2.2.5 Proyeksi Capaian Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan

Gambaran pencapaian indikator TPB yang diperoleh berdasarkan kecenderungan dari data baseline merupakan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan. Proyeksi data capaian diproyeksikan dengan

metode Laju Pertumbuhan Majemuk atau *Model Compound Annual Growth Rate* (CAGR). Proyeksi dilakukan dengan melakukan regresi variabel tak bebas (*independent variable*) yang nilainya ingin diprediksi pada masa depan. Rumus dari CAGR:

$$CAGR = \left(\frac{\text{nilai akhir}}{\text{nilai awal}} \right)^{\left(\frac{1}{\text{jumlah tahun}} \right)} - 1$$

Selain menggunakan Laju Pertumbuhan Majemuk, proyeksi juga dapat dilakukan dengan persamaan regresi dengan pendekatan minimum error (persamaan regresi yang paling mendekati baseline data). Berdasarkan metode ini, capaian TPB 2015-2019 dilakukan proyeksi dalam keadaan BAU (*Bisnis Analysis Usually*) untuk mengetahui pemenuhan target TPB tahun 2019, 2026 dan 2030.

2.2.6 Proyeksi Capaian Indikator TPB dengan Upaya Tambahan

Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan disusun dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan upaya tambahan adalah:

1. Pencapaian Target ditetapkan secara nasional
2. Target dengan upaya tambahan dapat dicapai dengan menggunakan dana di luar APBD (APBN, APBD Provinsi, Kerjasama dengan dunia usaha, CSR, swadaya masyarakat).
3. Program dengan upaya tambahan harus memperhatikan kondisi daya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
4. Keterpaduan implementasi program dengan SKPD terkait.
5. Kerjasama antar daerah untuk program terkait.

Upaya tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator TPB sehingga dapat mencapai target baik yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030.

Dalam memproyeksi capaian indikator dengan upaya tambahan, variabel yang diproyeksi adalah variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang mempengaruhi variabel tak bebas (*independent variable*) dalam rumus perhitungan indikator. Indikator TPB yang tidak terpenuhi target TPB-nya di tahun 2019, 2026 dan 2030 dengan proyeksi BAU, selanjutnya dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.

Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang terkait DDDTL dan yang indikator yang tidak terkait DDDTL yang akan dintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 disajikan sebagai berikut.

BAB III

KONDISI UMUM Muatan KLHS

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki keterkaitan dengan isu prioritas yang telah disepakati, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh berdasarkan muatan kajian yang diharapkan untuk masing-masing muata. Analisis pengaruh ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya potensi pada wilayah Tanah Bumbu yang terkena dampak, risiko, pengaruh, rentan, atau bahkan kritis akibat adanya arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dilihat dari prespektif daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keberlangsungan fungsi ekosistem, efesiensi pemanfaatan sumber daya alam, pengaruh terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, serta risiko dan dampak lingkungan.

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan;
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim; dan
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

Berdasarkan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 dan PP No. 46 tahun 2016 pasal 13 dan pasal 23 ayat (4) Permen KLHK No. 69 tahun 2017, analisis pengaruh muatan paling sedikit memuat kajian:

3.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

3.1.1. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang deficit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Dengan diketahuinya jumlah produksi padi di Kabupaten Tanah Bumbu maka dapat ditinjau indeks daya dukung pangan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Konsumsi beras mulai tahun 2019 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dan akhir tahun perencanaan.

Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2019 adalah 1,63 atau surplus sebesar 25.007 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu mampu bertahan atau memiliki stok selama 6 bulan. Dari 10 kecamatan, terdapat lima kecamatan termasuk kategori defisit pangan yakni Kecamatan Simpang Empat sebesar -8.744 ton, Satui -3.611 ton, Sungai Loban -1.766 ton, Angsana -1.587 ton dan Kecamatan Karang Bintang sebesar 341 ton, sedangkan yang kondisi surplus adalah 5 kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kusan Hilir 21.153 ton dan Kecamatan Kusan Hulu 15.449 ton, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

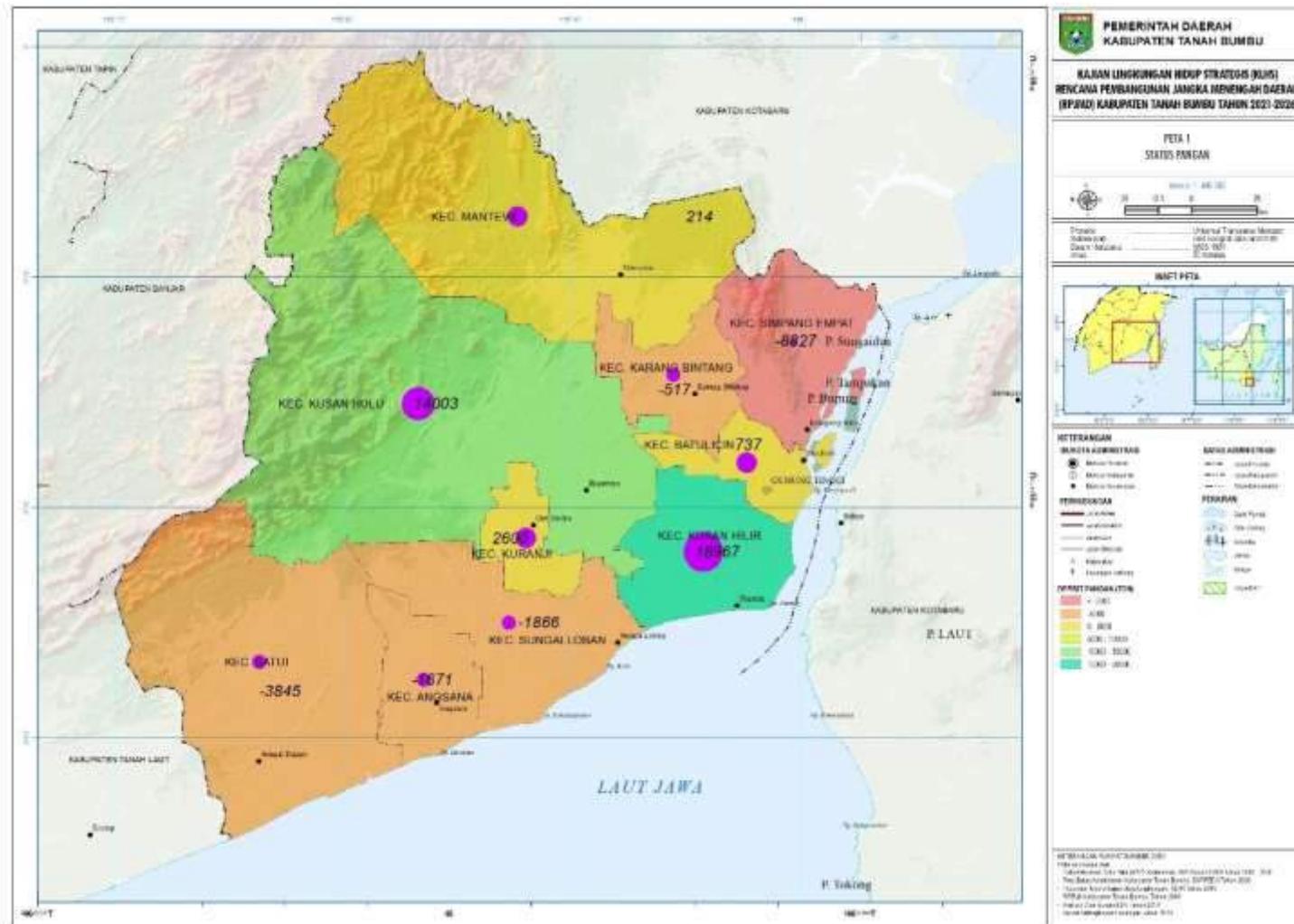
Tabel 3.1 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/KG ke Beras (64,02%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/kapita /tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Kusan Hilir	42.389	27.137	48.261	124	5.984	4,53	21.153
Sungai Loban	1.950	1.248	24.307	124	3.014	0,41	-1.766
Satui	4.535	2.903	52.537	124	6.515	0,45	-3.611
Angsana	1.636	1.047	21.243	124	2.634	0,40	-1.587
Kusan Hulu	28.042	17.952	20.192	124	2.504	7,17	15.449
Kuranji	6.564	4.202	10.195	124	1.264	3,32	2.938
Batolicin	5.534	3.543	20.339	124	2.522	1,40	1.021
Karang Bintang	3.408	2.182	20.348	124	2.523	0,86	-341
Simpang Empat	1.622	1.038	78.888	124	9.782	0,11	-8.744
Mantewe	5.450	3.489	24.142	124	2.994	1,17	495

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/KG ke Beras (64,02%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/kapita /tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
TANAH BUMBU	101.130	64.743	320.452	124	39.736	1,63	25.007

Sumber: Hasil analisis 2020.

Berdasarkan data peta dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2037 kawasan yang diperuntukan untuk pertanian lahan basah sebesar 16.527,28 ha dimana terjadi penurunan yang sebelumnya untuk tahun 2019 lahan sawah masih 22.527 ha. Dengan asumsi bahwa produksi pangan sebesar 4,7 ton/ha (BPS, 2020), dan diperkirakan penurunan sawah pada tahun 2026 menjadi 19.527 ha, maka produksi padi tahun 2026 adalah sebesar 91.778 ton gabah atau 54.023 ton beras. Jika jumlah penduduk tahun 2026 di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 337.190, maka pada tahun 2026 Daya Dukung Lahan untuk Pangan hanya sebesar 1,29 atau sisa 12.211,93 ton.



Gambar 3.1 Peta Status pangan

Pada tahun 2030, dengan asumsi bahwa luas lahan pertanian sesuai dengan luas polar uang RTRW sebesar 16.527 ha, maka produksi padi sisa 77.678 ton atau 45.724 ton beras. Jika jumlah penduduk pada tahun 2030 sebesar 347.144 jiwa, maka Daya Dukung Lahan untuk Pangan hanya sebesar 1,06 atau sisa 2.677,90 ton.

Tabel 3.2 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 – 2030

Uraian	Tahun		
	2019	2026	2030
Jumlah Produksi Padi (ton)	101.130	91.778	77.678
Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (64,02%)	59.528	54.023	45.724
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.452	337.190	347.144
Angka Konsumsi Beras (kg/perkapita/ pertahun)	124	124	124
Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	39.736,05	41.811,57	43.045,91
DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	1,50	1,29	1,06
Surplus Beras (ton)	19.792,19	12.211,93	2.677,90

Sumber: Hasil analisis 2020.

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun maupun lahan perkebunan.

Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RPJMD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktifitas sawah yang sudah ada.

3.1.2. Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RPJMD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 13.668.133.583 m³/tahun. Kebutuhan air domestik sebesar 9.357.198 m³/tahun dan non domestik sebesar 5.497.114.589 m³/tahun atau total 5.506.471.787 m³/tahun atau masih terdapat selisih 8.161.661.796 m³/tahun atau 2,48 yang termasuk dalam kategori Bersyarat atau Sedang, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3. Dari Tabel tersebut, menunjukkan bahwa hanya 3 kecamatan dalam kategori aman atau baik,

2 kecamatan dalam kategori bersyarat atau sedang dan 5 dalam kategori buruk.

Tabel 3.3 Perhitungan Daya Dukung Air Domestik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			Selisih	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Angsana	496.482.168	1.761.527	569.497.356	571.258.883	-74.776.715	0,87	Buruk
Batulicin	278.023.173	709.764	280.338.903	281.048.668	-3.025.495	0,99	Buruk
Karang Bintang	472.088.857	1.534.080	400.637.939	402.172.019	69.916.838	1,17	Bersyarat atau Sedang
Kuranji	137.378.392	620.296	388.920.294	389.540.589	-252.162.197	0,35	Buruk
Kusan Hilir	420.636.590	589.606	648.355.509	648.945.115	-228.308.525	0,65	Buruk
Kusan Hulu	4.049.183.051	297.694	973.595.482	973.893.176	3.075.289.875	4,16	Aman atau Baik
Mantewe	4.065.202.191	593.899	375.318.237	375.912.136	3.689.290.055	10,81	Aman atau Baik
Satui	2.259.308.916	594.162	859.387.600	859.981.762	1.399.327.154	2,63	Bersyarat atau Sedang
Simpang Empat	712.547.853	2.303.530	123.718.605	126.022.135	586.525.719	5,65	Aman atau Baik
Sungai Loban	777.282.392	704.946	877.344.664	878.049.610	-100.767.219	0,89	Buruk
Kab. Tanah Bumbu	13.668.133.583	9.357.198	5.497.114.589	5.506.471.787	3.161.661.796	2,48	Bersyarat atau Sedang

Sumber: Hasil analisis 2020.

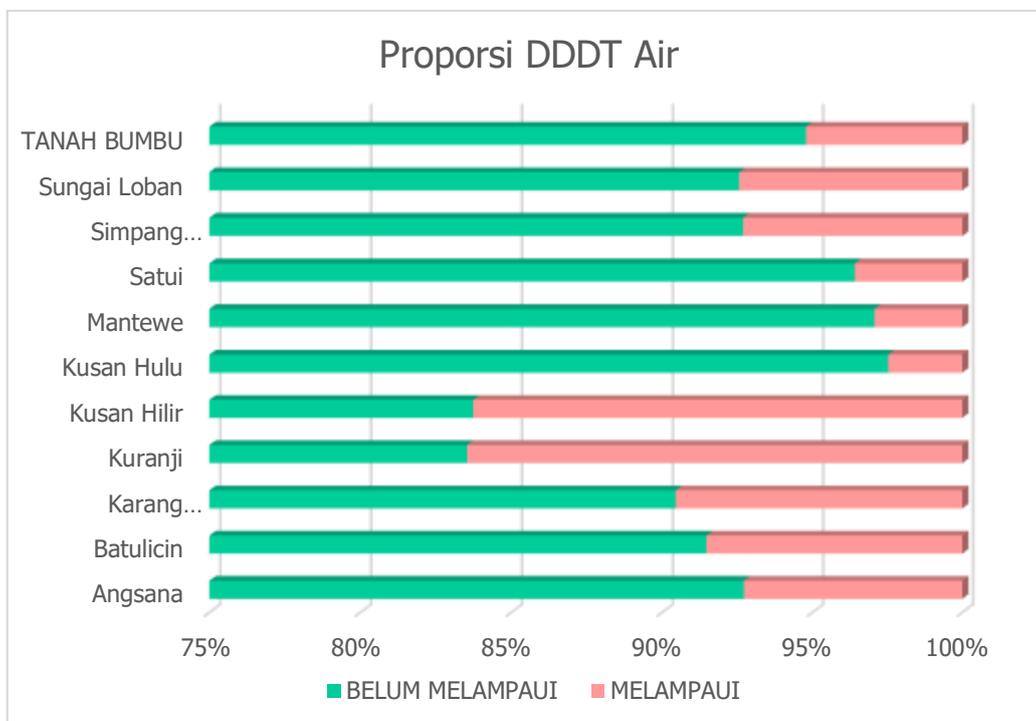
Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 464.251,69 ha atau 94,79% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 25.516,01 ha atau 5,21%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 dan peta pada Gambar 3.4. Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Kusan Hilir yang tertinggi dalam status melampaui yakni masing-masing sebesar 16,5% dan 16,3 dan yang masih belum melampaui dengan wilayah yang terluas adalah Kecamatan Kusan Hulu dan Mantewe masing-masing hanya 2,5% dan 2,9%, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.

Tabel 3.4 Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019

Kecamatan	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Angsana	18.222,19	1.430,75
Batulicin	11.800,76	1.100,05
Karang Bintang	17.402,77	1.836,79
Kuranji	9.616,42	1.894,67
Kusan Hilir	24.218,41	4.700,75
Kusan Hulu	145.015,99	3.672,07
Mantewe	90.363,25	2.728,50
Satui	84.827,43	3.148,71
Simpang Empat	27.176,66	2.143,00
Sungai Loban	35.607,81	2.860,73

Kecamatan	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
TANAH BUMBU	464.251,69	25.516,01
Persentase	94,79	5,21

Sumber: Hasil analisis 2020, Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019



Gambar 3.2 Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019

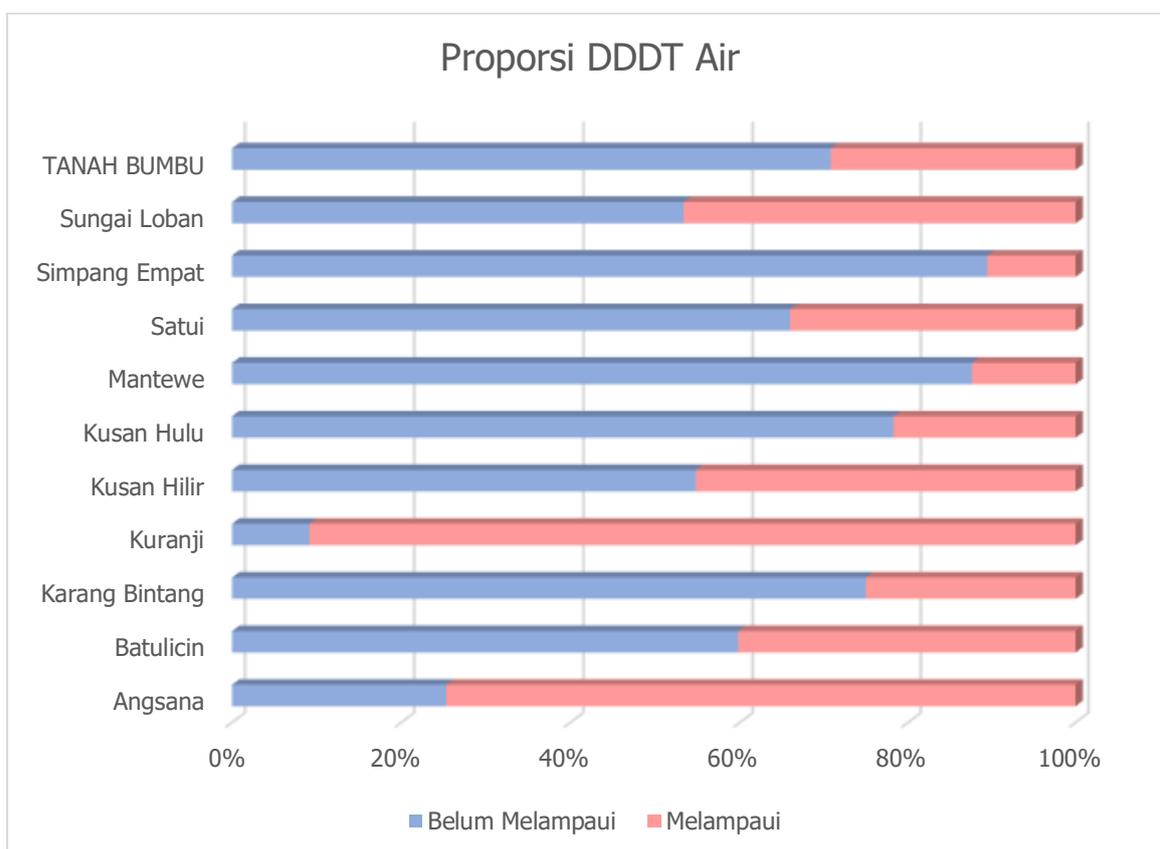
Selain berdasarkan Kepmen, juga dilakukan analisis dengan melihat kondisi curah hujan selama tahun 1998 – 2017 (Citra TRMM) dan koefisien maupun penggunaan air masing-masing tutupan lahan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 142.171 ha atau 80,58% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 34.260 ha atau 19,42%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.5. Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pandawan yang tertinggi dalam status melampaui yakni sebesar 75,60%, selanjutnya Kecamatan Barabai sebesar 55,24% dan yang masih belum melampaui dengan wilayah yang terluas adalah Kecamatan Hantakan hanya 2,78% dan selanjutnya Kecamatan Batang Alai Timur hanya 3,40%, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.

Perbedaan kedua data ini pada dasarnya dari pendekatan analisis, dimana hasil analisis dengan memasukkan komponen penggunaan air masing-masing tutupan lahan. Wilayah dengan konsumsi air terbesar adalah lahan sawah dan perkebunan sawit.

Tabel 3.5 Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan berdasarkan hasil analisis

Kecamatan	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Angsana	4.953,72	14.614,70
Batulicin	8.087,38	5.433,36
Karang Bintang	14.368,13	4.798,15
Kuranji	1.047,05	10.417,33
Kusan Hilir	15.783,95	13.012,87
Kusan Hulu	115.969,57	32.175,22
Mantewe	81.306,03	11.474,87
Satui	57.786,76	29.828,77
Simpang Empat	26.128,45	3.079,12
Sungai Loban	20.441,01	17.864,43
TANAH BUMBU	345.872,06	142.698,84
Persentase	70,79	29,21

Sumber: Hasil analisis 2020.



Gambar 3.3 Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan analisis

3.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Kajian risiko dengan mengacu pada hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tahun 2018 yang dikeluarkan melalui <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK>.

Peta yang digunakan adalah peta risiko bencana. Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, Dokumen KRB juga harus menyajikan rekomendasi kebijakan minimum dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

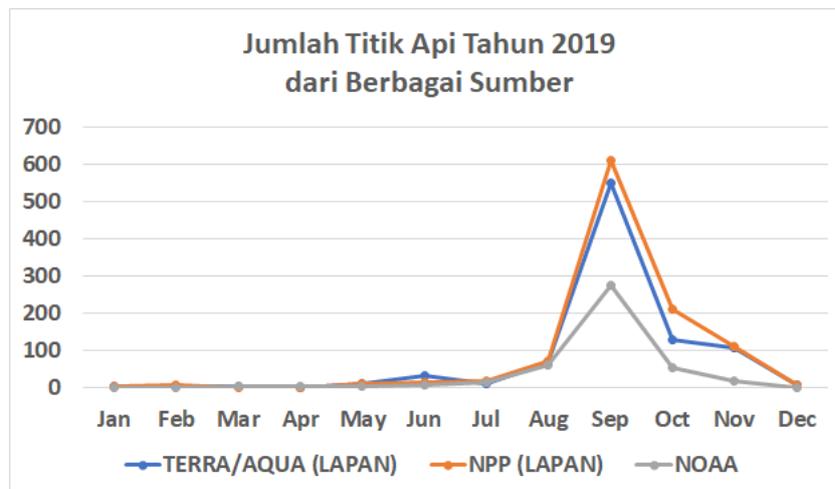
Pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana. Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Penentuan indeks risiko multi bahaya dilakukan berdasarkan analisis penggabungan nilai indeks bahaya untuk semua jenis bahaya, nilai indeks kerentanan untuk semua jenis bahaya, dan nilai indeks kapasitas untuk semua jenis bahaya.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan khusus multibencana sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.8-Gambar 3.13.

Berdasarkan data dari <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main> menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 137,848 ha pada tahun 2019, dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yakni seluas 196.517 ha, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7. Dampak kebakaran ini juga sebagian terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 3.6 Luas kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2020



Gambar 3.7 Jumlah titik api di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019

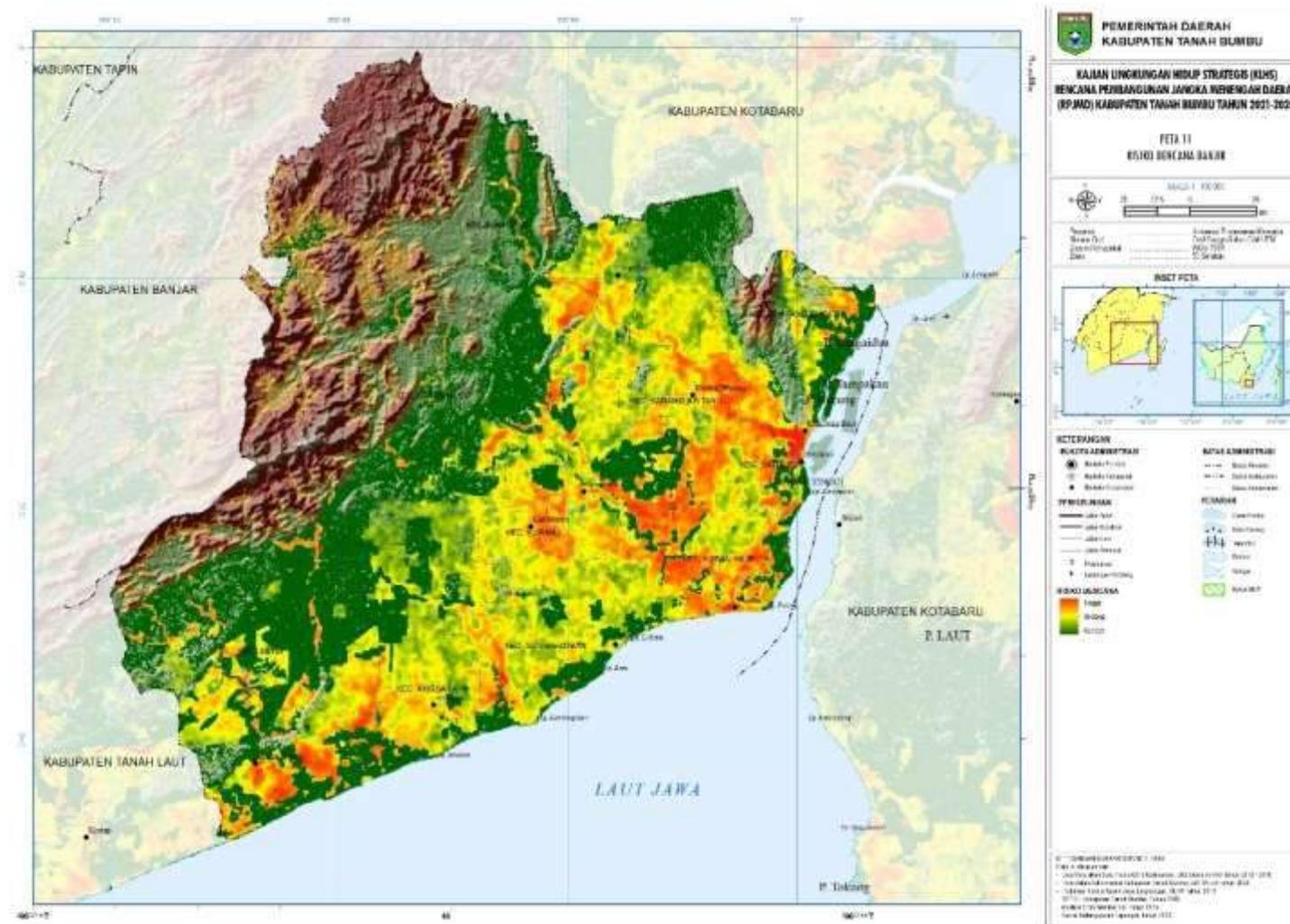
Tabel 3.6 Kondisi risiko bencana setiap kecamatan pada berbagai jenis bahaya

Kecamatan	Jenis Bahaya	Bahaya					Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
		Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas		
		Rendah	Sedang	Tinggi				
Kusan Hilir	Banjir	9.237	11.813	2.769	23.819	Tinggi	Sedang	Sedang
Kusan Hilir	Cuaca ekstrim	-	23.626	75	23.701	Sedang	Rendah	Tinggi
Kusan Hilir	Gelombang ekstrim & abrasi	-	278	318	596	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kusan Hilir	Gempabumi	24.170	-	-	24.170	Rendah	Rendah	Sedang
Kusan Hilir	Kebakaran hutan & lahan	-	2.659	2.638	5.297	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kusan Hilir	Kekeringan	-	24.178	-	24.178	Sedang	Rendah	Sedang
Kusan Hilir	Tsunami	53	-	-	53	Rendah	Rendah	Rendah
Sungai Loban	Banjir	17.685	5.303	371	23.359	Sedang	Rendah	Sedang
Sungai Loban	Cuaca ekstrim	-	23.045	39	23.084	Sedang	Rendah	Sedang
Sungai Loban	Gelombang ekstrim & abrasi	-	-	520	520	Tinggi	Rendah	Sedang
Sungai Loban	Gempabumi	23.701	-	-	23.701	Rendah	Rendah	Rendah
Sungai Loban	Kebakaran hutan & lahan	-	5.894	2.370	8.264	Tinggi	Rendah	Tinggi
Sungai Loban	Kekeringan	-	23.701	-	23.701	Sedang	Rendah	Sedang
Sungai Loban	Tsunami	36	-	-	36	Rendah	Rendah	Rendah
Satui	Banjir	59.792	18.355	2.817	80.964	Sedang	Rendah	Sedang
Satui	Banjir bandang	204	884	1.479	2.567	Tinggi	Rendah	Tinggi
Satui	Cuaca ekstrim	-	73.109	15	73.124	Sedang	Rendah	Tinggi
Satui	Epidemi & wabah penyakit	9	-	-	9	Rendah	Rendah	Rendah
Satui	Gelombang ekstrim & abrasi	-	-	511	511	Tinggi	Rendah	Sedang
Satui	Gempabumi	100.754	-	-	100.754	Rendah	Rendah	Sedang
Satui	Kebakaran hutan & lahan	-	40.139	25.255	65.394	Tinggi	Rendah	Tinggi
Satui	Kekeringan	-	100.777	-	100.777	Sedang	Rendah	Sedang
Satui	Tanah longsor	-	2.816	4.625	7.441	Tinggi	Rendah	Tinggi
Satui	Tsunami	25	-	-	25	Rendah	Rendah	Rendah
Angsana	Banjir	15.381	3.020	42	18.443	Rendah	Rendah	Sedang
Angsana	Cuaca ekstrim	-	18.431	6	18.437	Sedang	Rendah	Tinggi
Angsana	Gelombang ekstrim & abrasi	-	-	263	263	Tinggi	Rendah	Sedang
Angsana	Gempabumi	18.664	-	-	18.664	Rendah	Rendah	Sedang

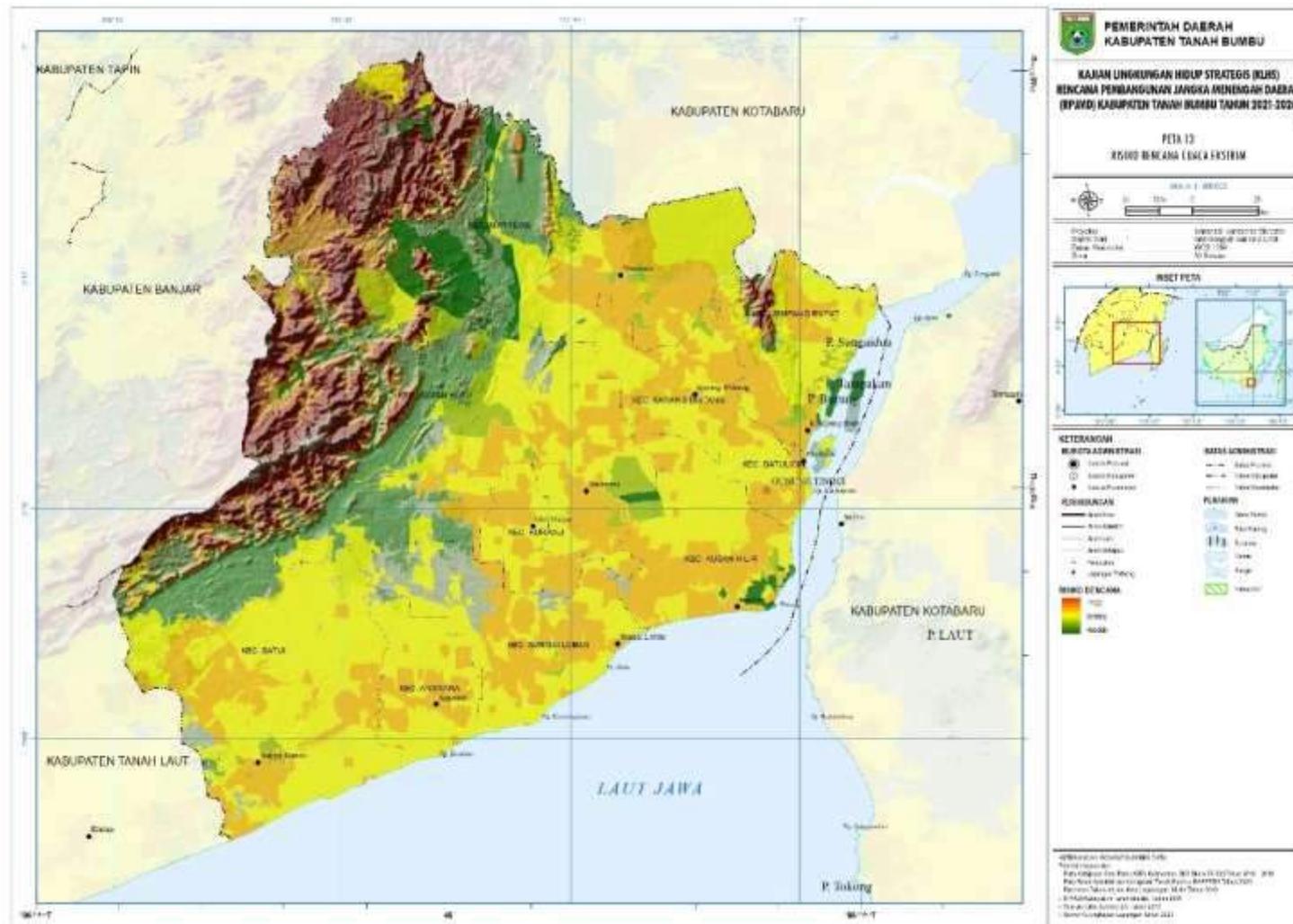
Kecamatan	Jenis Bahaya	Bahaya					Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
		Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas		
		Rendah	Sedang	Tinggi				
Angsana	Kebakaran hutan & lahan	-	11.940	803	12.743	Sedang	Rendah	Tinggi
Angsana	Kekeringan	-	18.685	-	18.685	Sedang	Rendah	Sedang
Angsana	Tsunami	7	-	-	7	Rendah	Rendah	Rendah
Kusan Hulu	Banjir	50.871	12.673	1.386	64.930	Tinggi	Rendah	Sedang
Kusan Hulu	Banjir bandang	57	415	1.080	1.552	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kusan Hulu	Cuaca ekstrim	-	56.870	-	56.870	Sedang	Rendah	Tinggi
Kusan Hulu	Gempabumi	129.844	-	-	129.844	Rendah	Rendah	Sedang
Kusan Hulu	Kebakaran hutan & lahan	-	81.041	19.412	100.453	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kusan Hulu	Kekeringan	-	129.844	-	129.844	Sedang	Rendah	Sedang
Kusan Hulu	Tanah longsor	-	23.405	14.729	38.134	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kuranji	Banjir	13.057	2.868	47	15.972	Rendah	Rendah	Sedang
Kuranji	Cuaca ekstrim	-	15.541	-	15.541	Sedang	Rendah	Sedang
Kuranji	Gempabumi	16.702	-	-	16.702	Rendah	Rendah	Rendah
Kuranji	Kebakaran hutan & lahan	-	7.745	507	8.252	Sedang	Rendah	Tinggi
Kuranji	Kekeringan	-	16.702	-	16.702	Sedang	Rendah	Sedang
Batu Licin	Banjir	7.122	7.642	1.655	16.419	Tinggi	Rendah	Sedang
Batu Licin	Cuaca ekstrim	13	16.893	41	16.947	Sedang	Rendah	Sedang
Batu Licin	Gelombang ekstrim & abrasi	-	474	-	474	Sedang	Rendah	Sedang
Batu Licin	Gempabumi	17.309	-	-	17.309	Rendah	Rendah	Rendah
Batu Licin	Kebakaran hutan & lahan	-	8.769	1.639	10.408	Tinggi	Rendah	Tinggi
Batu Licin	Kekeringan	1.824	15.485	-	17.309	Sedang	Rendah	Sedang
Karang Bintang	Banjir	10.753	6.708	975	18.436	Sedang	Rendah	Tinggi
Karang Bintang	Cuaca ekstrim	-	19.177	-	19.177	Sedang	Rendah	Sedang
Karang Bintang	Gempabumi	19.177	-	-	19.177	Rendah	Rendah	Rendah
Karang Bintang	Kebakaran hutan & lahan	-	7.191	1.169	8.360	Sedang	Rendah	Tinggi
Karang Bintang	Kekeringan	6.644	12.533	-	19.177	Sedang	Rendah	Sedang
Simpang Empat	Banjir	17.979	5.184	764	23.927	Tinggi	Rendah	Sedang
Simpang Empat	Cuaca ekstrim	101	33.930	101	34.132	Sedang	Rendah	Tinggi
Simpang Empat	Gelombang ekstrim & abrasi	-	1.014	-	1.014	Sedang	Rendah	Sedang
Simpang Empat	Gempabumi	37.331	-	-	37.331	Rendah	Rendah	Sedang

Kecamatan	Jenis Bahaya	Bahaya					Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
		Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas		
		Rendah	Sedang	Tinggi				
Simpang Empat	Kebakaran hutan & lahan	-	5.207	13.191	18.398	Tinggi	Rendah	Tinggi
Simpang Empat	Kegagalan teknologi	-	-	18	18	Tinggi	Rendah	Tinggi
Simpang Empat	Kekeringan	10.464	26.868	-	37.332	Sedang	Rendah	Sedang
Simpang Empat	Tanah longsor	-	4.244	-	4.244	Sedang	Rendah	Sedang
Simpang Empat	Tsunami	7	-	-	7	Rendah	Rendah	Rendah
Mantewe	Banjir	28.167	6.908	708	35.783	Rendah	Rendah	Tinggi
Mantewe	Banjir bandang	213	1.083	2.454	3.750	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mantewe	Cuaca ekstrim	-	44.213	-	44.213	Sedang	Rendah	Sedang
Mantewe	Gempabumi	90.145	-	-	90.145	Rendah	Rendah	Rendah
Mantewe	Kebakaran hutan & lahan	-	49.787	16.175	65.962	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mantewe	Kekeringan	7.109	83.036	-	90.145	Sedang	Rendah	Sedang
Mantewe	Tanah longsor	-	8.649	17.003	25.652	Tinggi	Rendah	Sedang

Berdasarkan **Tabel 3.6** menunjukkan bahwa banjir masih menjadi potensi bencana yang cukup besar di daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang hampir terdapat di semua kecamatan. Kabakaran hutan di sebagian kecamatan juga menjadi ancaman bagi Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu perlu kewaspadaan dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir dampak risiko dari bencana tersebut.



Gambar 3.8 Peta Risiko bencana banjir



Gambar 3.10 Peta Risiko Bencana cuaca ekstrim

3.3 Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi. Sistem klasifikasi Jasa lingkungan tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Diasumsikan semakin tinggi Jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian. Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*), dengan rincian sebagai berikut pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Klasifikasi Layanan Lingkungan

Klasifikasi Layanan Lingkungan		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Spiritual & warisan leluhur	Ruang & tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur

Klasifikasi Layanan Lingkungan		Definisi Operasional
2	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental
3	Rekreasi & ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
5	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
6	Pendidikan & pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

3.1.3. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

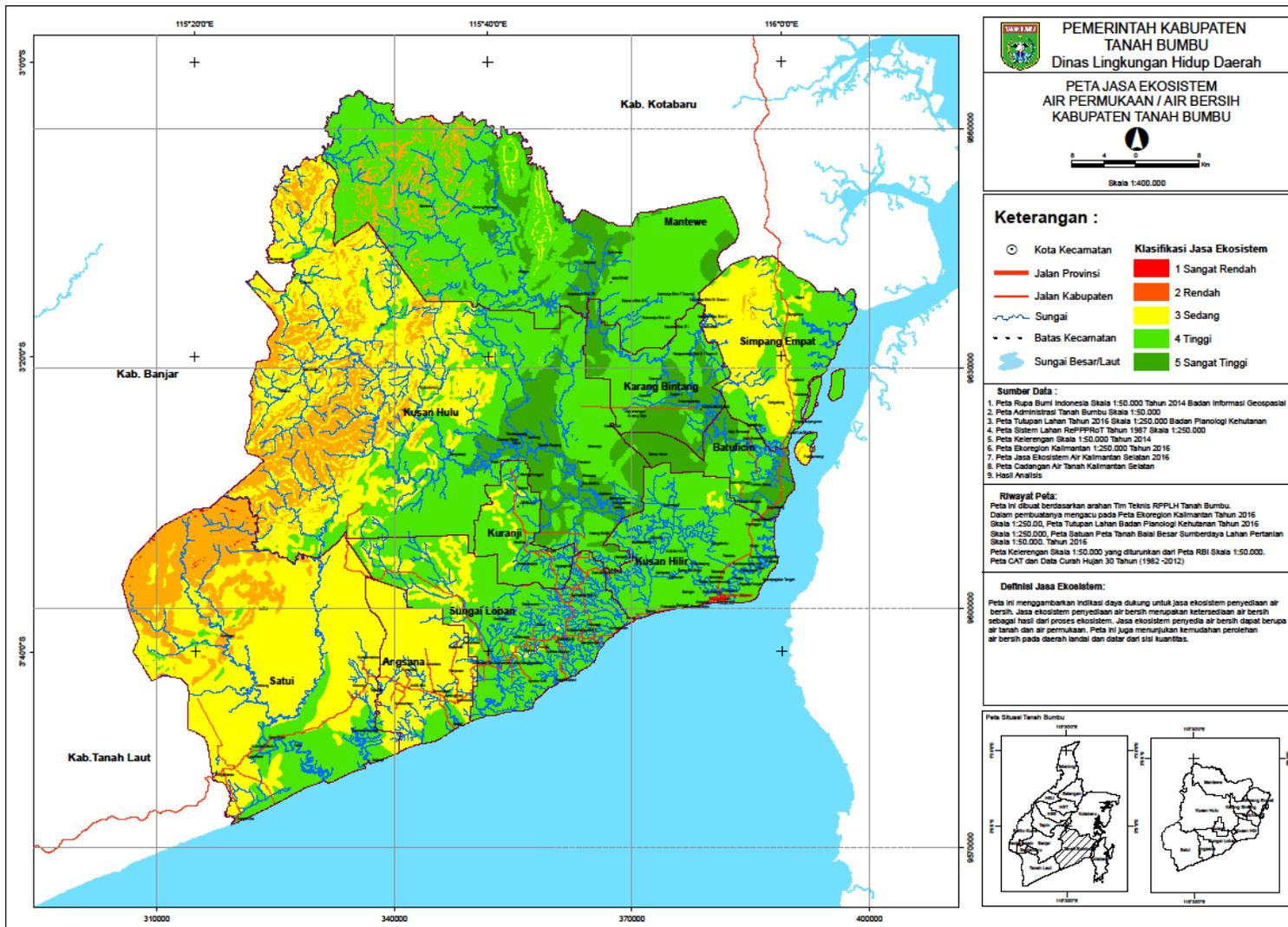
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

Jasa Lingkungan penyediaan air ketersediaan air dalam, lahan datar, curah hujan tinggi, vegetasi hutan tinggi, recharge area, memiliki potensi yang tinggi sedangkan semak belukar rendah. Jasa Lingkungan penyediaan air berdasarkan kecamatan dapat ditampilkan pada Tabel 3.8 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.14.

Tabel 3.8 Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan Kabupaten Tana Bumbu

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Air					Jumlah Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Angsana		1,04	17.563,86	2.016,21		19.581,10
Batulicin		95,29	377,76	5.639,76	7.347,33	13.460,13
Karang Bintang		0,16	6,22	10.741,65	9.391,94	20.139,97
Kuranji		0,01	628,71	10.835,66		11.464,39
Kusan Hilir			185,79	28.653,70		28.839,49
Kusan Hulu		30.848,19	46.848,29	53.175,74	19.454,84	150.327,05
Mantewe		9.878,89	8.232,55	53.464,99	15.093,04	86.669,48
Satui	2.025,33	15.096,93	55.581,91	15.052,67		87.756,84
Simpang Empat	174,13	842,73	14.083,21	15.046,64		30.146,71
Sungai Loban		27,41	3.350,74	34.854,90		38.233,06
Total	2.199,46	56.790,66	146.859,04	229.481,93	51.287,14	486.618,23

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019



Gambar 3.14 Peta Jasa Lingkungan penyedia air bersih

3.1.4. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Jasa Lingkungan penyediaan pangan sangat bergantung dengan jenis tanah subur, pola sungai, tanah alluvial-sawah dan kebun, gambut muka air dangkal utk Pertanian, lahan perkebunan, peternakan, perikanan, kebun campuran, jenis tanah latosol cocok untuk hutan, podsolik merah kekuningan dan spodosol cocok untuk perkebunan memiliki potensi yang tinggi. Jasa Lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Tana Bumbu dirinci berdasarkan kondisi administrasi ditampilkan pada Tabel 3.9. Dan secara spasial dapat dilihat pada Gambar 3.15.

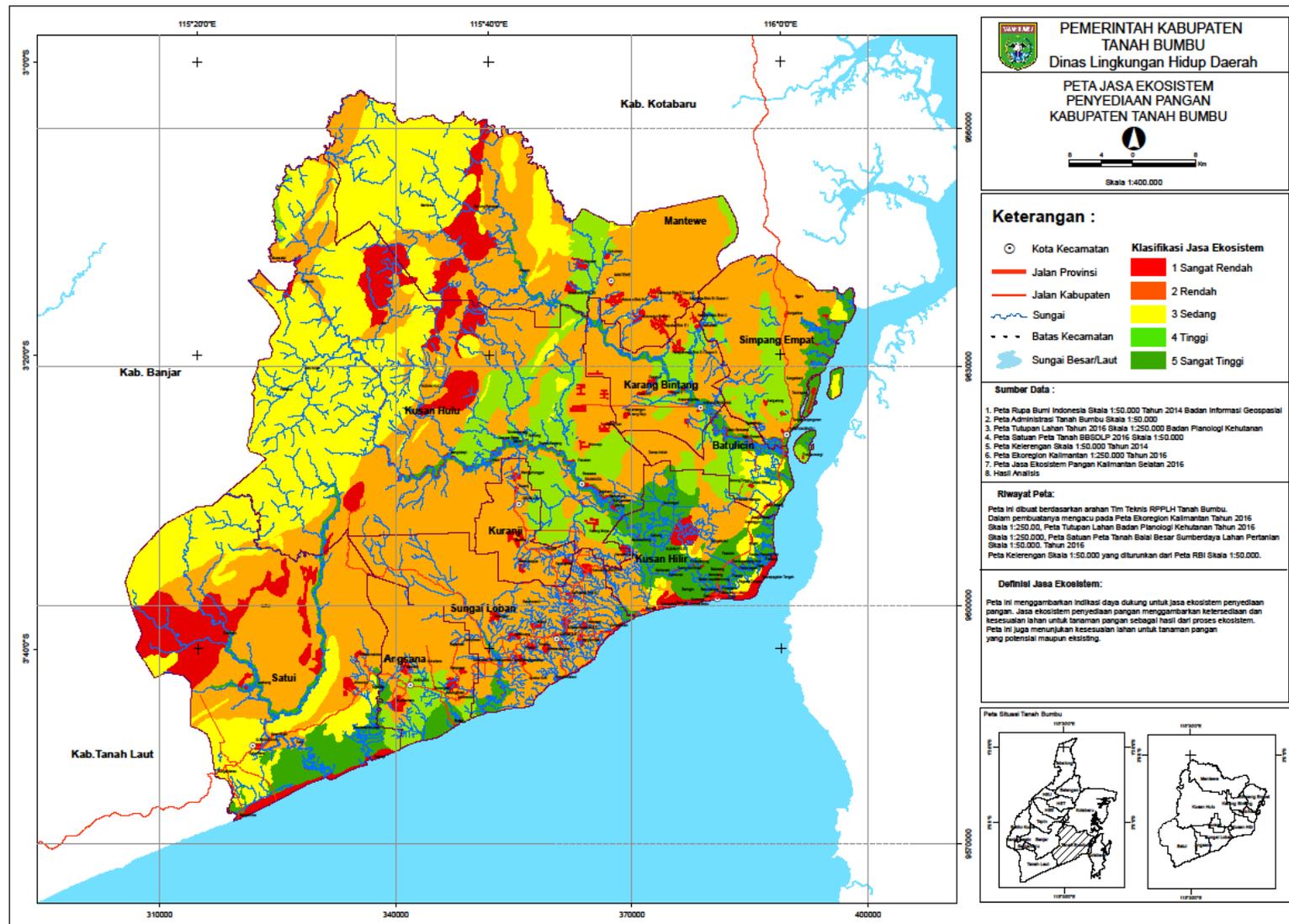
Tabel 3.9 Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pangan					Jumlah Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Angsana	579,21	12.343,62	6,63	4.394,48	2.257,16	19.581,10
Batulicin	227,38	4.268,46	2.843,43	3.330,19	2.793,87	13.463,33
Karang Bintang	295,33	13.930,98		4.004,86	1.908,79	20.139,97
Kuranji	337,21	10.133,23		993,94		11.464,38
Kusan Hilir	3.008,02	7.736,02	2.358,77	1.919,79	13.815,76	28.838,37
Kusan Hulu	9.887,56	56.699,24	57.750,08	21.313,72	4.673,26	150.323,86
Mantewe	6.628,62	42.617,28	30.747,10	5.595,83	1.079,91	86.668,74
Satui	14.446,17	37.422,73	24.246,01	505,46	11.135,21	87.755,58
Simpang Empat	466,64	18.112,07	629,76	6.253,09	4.682,83	30.144,39
Sungai Loban	1.411,78	34.649,02		113,83	2.056,16	38.230,80
Total	37.287,92	237.912,67	118.581,78	48.425,19	44.402,96	486.610,52

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat diketahui Jasa Lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui jasa penyediaan pangan sangat rendah mencapai 7,66%, penyediaan pangan rendah mencapai 48,89%, penyediaan pangan sedang mencapai 24,37%, penyediaan pangan tinggi mencapai 9,95% dan penyediaan pangan sangat tinggi mencapai 9,12%.

Berdasarkan wilayah administrasi dapat diketahui wilayah yang memiliki Jasa Lingkungan penyediaan pangan sangat rendah berada di Kecamatan Satui, sedangkan Jasa Lingkungan penyediaan pangan sedang berada di Kecamatan Kusan Hulu, dan Jasa Lingkungan penyediaan pangan sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hilir. Dengan demikian, Kecamatan Kusan Hilir diharapkan mampu menyuplai pangan di kecamatan-kecamatan lain yang ada Kabupaten Tanah Bumbu. Ini diharapkan berimbas kepada kesejahteraan Kabupaten Tanah Bumbu akan meningkat dan mengurangi kemiskinan khususnya di Kecamatan Kusan Hilir dan Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.



Gambar 3.15 Peta Jasa lingkungan penyedia pangan

3.1.5. Jasa Lingkungan Penyediaan Serat/ Fiber

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical. Jasa Lingkungan berupa hutan dan perbukitan memiliki serat tinggi (kayu dan tanaman). Jasa lingkungan penyediaan serat/ fiber di Kabupaten Tana Bumbu berupa hasil hutan, kebun, semak, belukar dan ialang sebagai bentuk ketersediaan serat dapat ditampilkan pada Tabel 3.10 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.16.

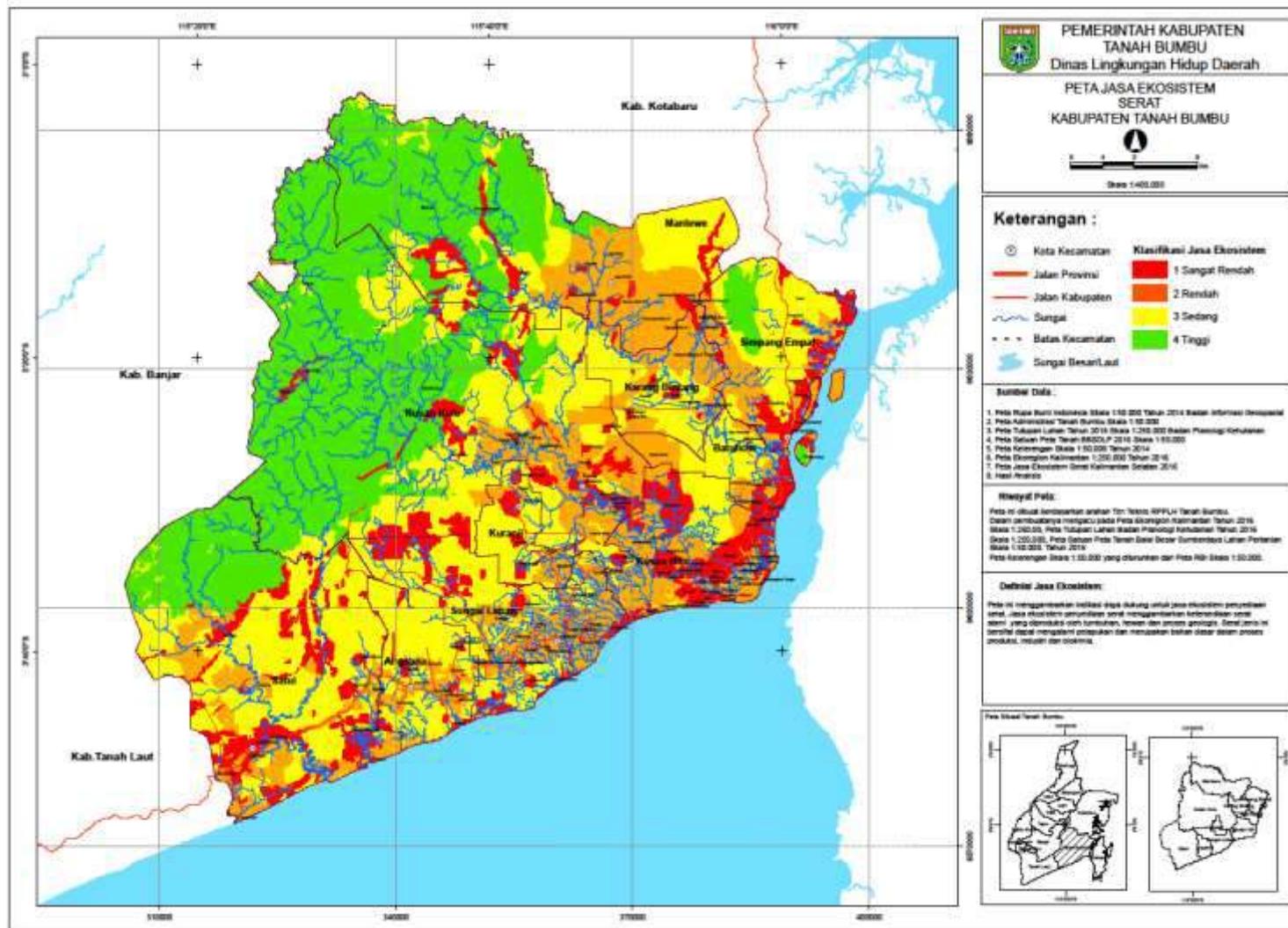
Tabel 3.10 Jasa Lingkungan Penyediaan Serat/ Fiber

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Serat				Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	
Angsana	1.401,34	3.691,52	14.484,51	0	19.577,37
Batulicin	2.246,09	4.756,63	6.226,02	230,81	13.459,55
Karang Bintang	1.261,69	8.406,70	10.471,58	0	20.139,97
Kuranji	1.492,31	2.057,56	7.914,52	0	11.464,38
Kusan Hilir	9.582,92	13.553,04	5.702,58	0	28.838,54
Kusan Hulu	10.354,18	15.358,71	42.690,52	81.920,93	150.324,33
Mantewe	4.779,02	17.502,70	21.390,54	42.997,19	86.669,45
Satui	13.278,67	12.472,51	42.932,39	19.063,52	87.747,09
Simpang Empat	4.832,57	8.132,37	13.830,05	3.347,66	30.142,65
Sungai Loban	5.786,64	12.123,69	20.322,19	0	38.232,52
Total	55.015,44	98.055,41	185.964,90	147.560,09	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui Jasa Lingkungan dalam penyediaan serat dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu dapat diketahui Jasa Lingkungan penyediaan serat sangat rendah mencapai 11,31 %, Jasa Lingkungan penyediaan serat rendah mencapai 20,15 %, sedangkan Jasa Lingkungan penyediaan serat sedang mencapai 38,22 % dan Jasa Lingkungan penyediaan serat tinggi mencapai 30,32 %.

Berdasarkan tabel Jasa Lingkungan penyediaan serat dapat diketahui wilayah dengan kategori Jasa Lingkungan penyedia serat sangat rendah berada di Kecamatan Satui, Jasa Lingkungan penyedia serat rendah berada di Kecamatan Mantewe, Jasa Lingkungan penyedia serat sedang berada di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Satui, sedangkan Jasa Lingkungan penyedia serat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu.



Gambar 3.16 Peta Jasa lingkungan penyedia serat/ fiber

3.1.6. Jasa Lingkungan Sumberdaya Genetik

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentangalam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumberdaya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks. Jasa Lingkungan sumberdaya genetik sangat erat kaitannya dengan hutan penghasil kayu ranting serat tinggi, sawit tinggi (minyak) memiliki potensi yang tinggi sebagai berikut:

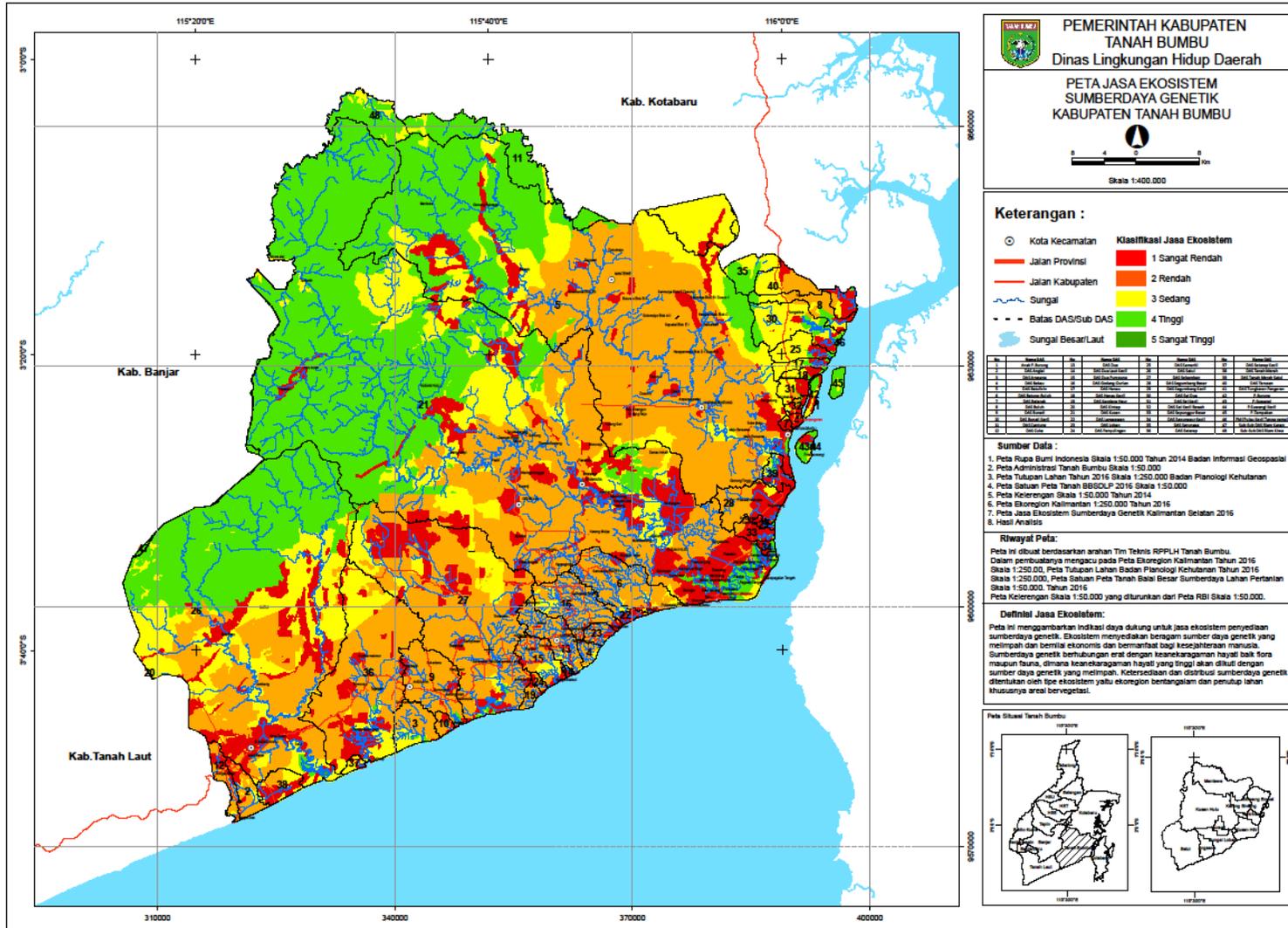
Jasa Lingkungan sumber daya genetik berdasarkan wilayah administrasi dan daerah aliran sungai di Kabupaten Tana Bumbu dapat ditampilkan sebagai pada Tabel 3.11 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.17.

Tabel 3.11 Jasa Lingkungan Sumberdaya Genetik

Kecamatan	Jasa Lingkungan Sumberdaya Genetik					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	1.401,34	16.313,17	1.597,88	264,97		19.577,37
Batulicin	2.246,09	7.553,61	2.889,44	750,99	19,42	13.459,55
Karang Bintang	1.261,69	18.730,33	147,95			20.139,97
Kuranji	1.492,31	9.103,51	868,56			11.464,38
Kusan Hilir	9.582,92	12.657,66	3.789,20	2.657,15	151,60	28.838,54
Kusan Hulu	10.354,18	30.356,33	26.351,51	83.262,31		150.324,33
Mantewe	4.779,02	19.302,82	19.590,42	42.997,19		86.669,45
Satui	13.278,67	27.592,31	27.465,48	19.344,69	65,94	87.747,09
Simpang Empat	4.832,57	7.209,33	12.267,48	5.833,27		30.142,65
Sungai Loban	5.786,64	26.355,74	5.836,17	253,97		38.232,52
Jumlah Total	55.015,44	175.174,82	100.804,09	155.364,54	236,96	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat diketahui Jasa Lingkungan sumberdaya genetik berdasarkan wilayah administrasi dapat diketahui penyedia Jasa Lingkungan sangat rendah mencapai 11,31 %, Jasa Lingkungan rendah mencapai 36%, Jasa Lingkungan sedang mencapai 20,72%, Jasa Lingkungan tinggi mencapai 31,93% dan Jasa Lingkungan penyedia sumberdaya genetik sangat tinggi mencapai 0,05%.



Gambar 3.17 Peta Jasa lingkungan penyedia genetik

3.1.7. Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir

Jasa Lingkungan pengaturan aliran air dan banjir sebagai fungsi siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air.

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut.

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Pulau Kalimantan yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan merupakan potensi untuk recharge area. Recharge area yang relatif luas akan meningkatkan cadangan air bersih. Ekoregion pegunungan dan perbukitan struktural dan dataran fluvial mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan tata air. Pegunungan dan perbukitan yang penggunaan lahannya hutan mempunyai potensi tinggi untuk menyerap air. Vegetasi di kawasan hutan menampung air hujan dan mengalirkannya dalam tanah sehingga menjadi cadangan air tanah. Semakin tinggi kerapatan vegetasi maka air hujan yang dapat ditangkap semakin banyak. Perbukitan berpenggunaan lahan ladang dan semak belukar memiliki potensi sedang. Kerapatan vegetasi yang relatif rendah serta luas tajuk pohon sempit membuat air hujan yang dapat ditangkap relatif sedikit. Air hujan akan menjadi run-off dan langsung masuk ke sistem sungai. Penggunaan lahan permukiman memiliki potensi yang rendah untuk mengatur tata air. Sebagian besar lahan di permukiman sudah diperkeras oleh aspal, semen atau bahan lain. Hal tersebut akan menghalangi air hujan untuk masuk ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi cadangan air. Air tanah akan menjadi run-off sehingga langsung masuk ke sungai atau menjadi genangan. Kelestarian hutan sebagai recharge area merupakan hal penting agar cadangan air relatif stabil.

Jasa Lingkungan pengaturan aliran air dan banjir dengan memperhatikan wilayah administrasi Kabupaten Tana Bumbu dapat ditampilkan pada Tabel 3.12 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.18.

Tabel 3.12 Jasa Lingkungan Pengaturan Air dan Banjir

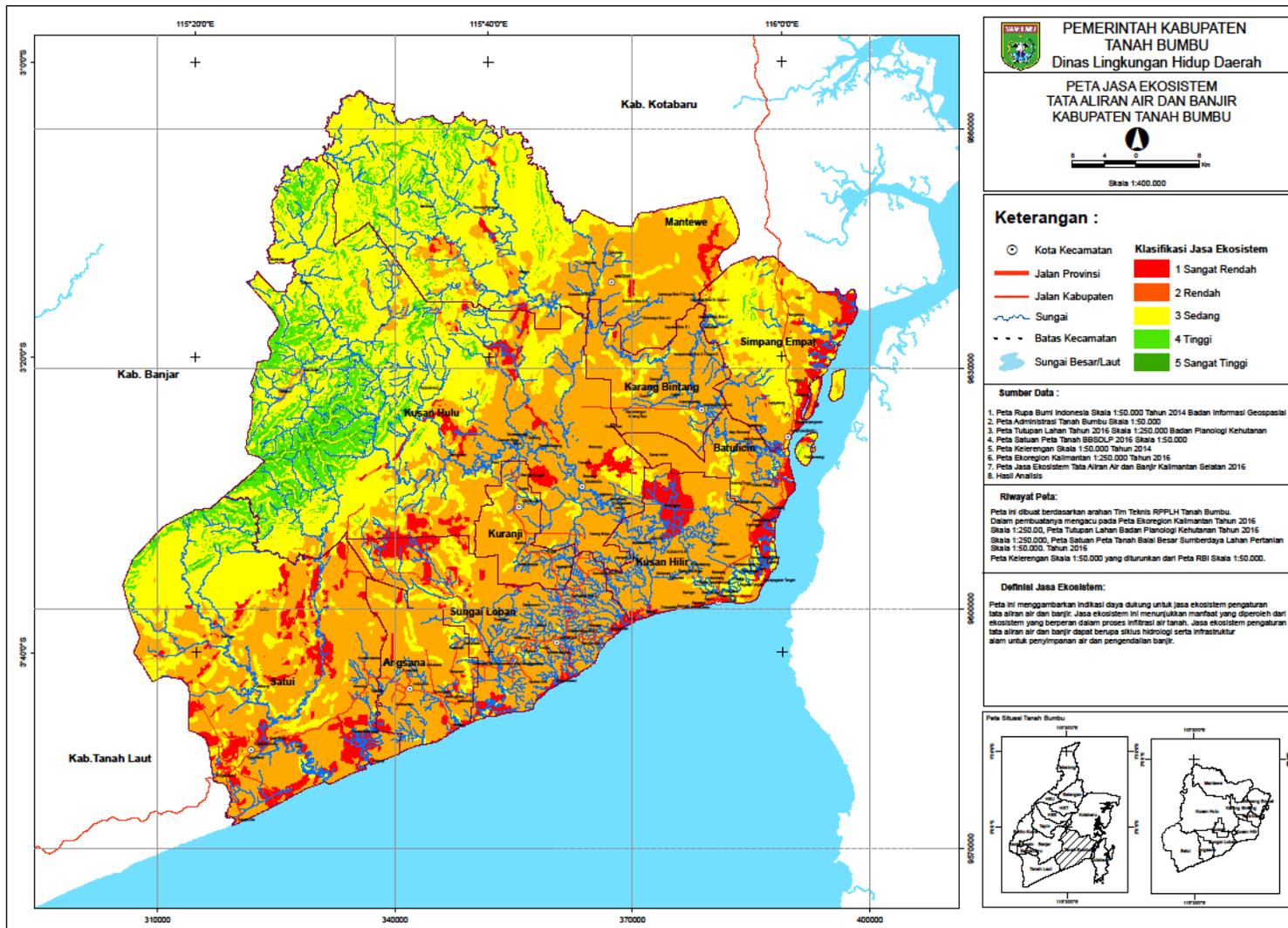
Kecamatan	Jasa Lingkungan tata aliran air dan banjir					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	811,32	17.494,10	1.271,95			19.577,37
Batulicin	888,37	11.086,56	1.313,80	157,13	13,68	13.459,55
Karang Bintang	171,47	18.806,60	1.161,83	0,07		20.139,97

Kecamatan	Jasa Lingkungan tata aliran air dan banjir					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Kuranji	57,50	10.734,52	672,36	0,01		11.464,38
Kusan Hilir	4.375,43	21.492,75	2.970,36			28.838,54
Kusan Hulu	5.978,90	49.157,08	50.711,85	30.242,58	14.233,92	150.324,33
Mantewe	1.814,94	30.116,74	36.754,99	13.620,02	4.362,61	86.669,31
Satui	9.951,46	50.461,14	21.291,02	4.119,61	1.923,86	87.747,09
Simpang Empat	2.922,88	14.665,47	11.893,00	538,76	122,53	30.142,65
Sungai Loban	3.765,66	31.644,75	2.822,01	0,10		38.232,52
Jumlah Total	30.737,94	255.659,70	130.863,18	48.678,29	20.656,61	486.595,71

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Jasa Lingkungan pengaturan air dan banjir dengan kategori sangat rendah mencapai 6,32%, Jasa Lingkungan pengaturan air dan banjir dengan kategori rendah mencapai 52,54%, Jasa Lingkungan dengan kategori sedang mencapai 26,89% dan Jasa Lingkungan dengan kategori tinggi mencapai 10%, sedangkan Jasa Lingkungan dengan kategori sangat tinggi mencapai 4,25%.

Berdasarkan wilayah administrasi dapat diketahui Jasa Lingkungan pengaturan air dan banjir dengan kategori sangat rendah dan rendah berada di Kecamatan Satui, Jasa Lingkungan pengaturan air dan banjir dengan kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu. Daerah aliran sungai dalam penyediaan Jasa Lingkungan pengaturan air dan banjir dengan kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi berada di DAS Satui.



Gambar 3.18 Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air dan Banjir

3.1.8. Jasa Lingkungan Penyediaan Energi

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Jasa lingkungan penyediaan energi Kabupaten Tanah Bumbu ditunjukkan pada Tabel 3.13 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.19.

Penggunaan lahan pegunungan didominasi oleh hutan. Hutan merupakan penyedia energi terutama dari hasil hutan seperti kayu atau ranting. Pada daerah pegunungan struktural kompleks Meratus ini didominasi material penyusun kelompok batuan ultramafik dan batuan malihan. Ekoregion ini juga kaya akan sumberdaya mineral batubara yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dataran fluvial yang relatif datar sehingga intensitas dan luasan penyinaran matahari relatif tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Pemanfaatan energi yang terbarukan/alami harus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat berkurang. Potensi tinggi penyediaan energi ini umumnya berada di daerah hutan lahan tinggi. Hal ini disebabkan karena kayu dan ranting dari kawasan hutan dapat menjadi sumber energi bagi kegiatan domestik masyarakat. Pada daerah pegunungan struktural kompleks Meratus ini didominasi material penyusun kelompok batuan ultramafik dan batuan malihan. Ekoregion ini juga kaya akan sumberdaya mineral batubara yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia.

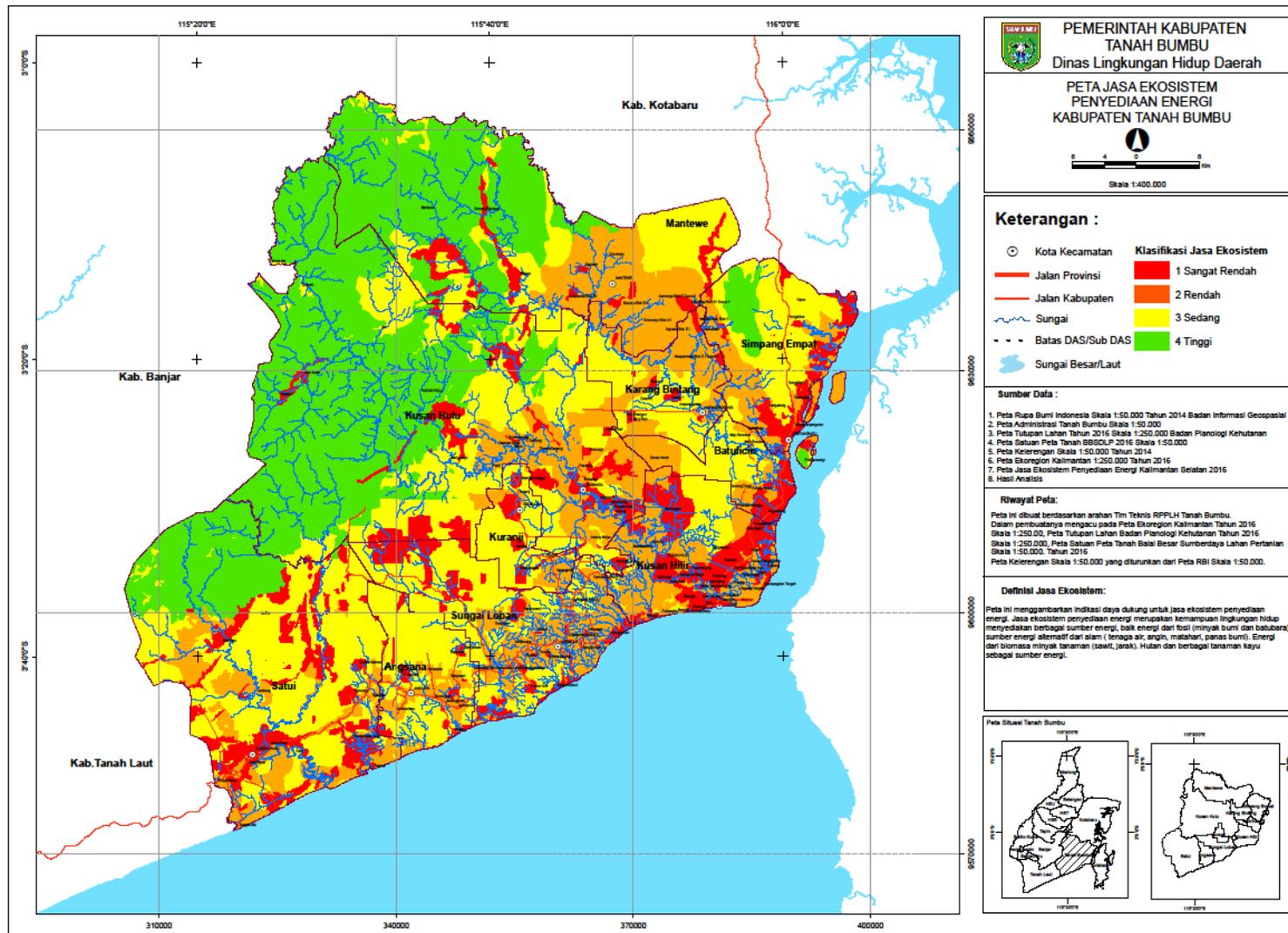
Tabel 3.13 Jasa Lingkungan Penyediaan Bahan Bakar

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Bahan Bakar				Jumlah
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	
Angsana	1.401,34	3.691,52	14.484,51		19.577,37
Batulicin	2.246,09	4.756,63	6.226,02	230,81	13.459,55
Karang Bintang	1.261,69	8.406,70	10.471,58		20.139,97
Kuranji	1.492,31	2.057,56	7.914,52		11.464,38
Kusan Hilir	9.582,92	13.553,04	5.702,58		28.838,54
Kusan Hulu	10.354,18	15.358,71	42.690,52	81.920,93	150.324,33
Mantewe	4.779,02	17.502,70	21.390,54	42.997,19	86.669,45
Satui	13.278,67	12.472,51	42.932,39	19.063,52	87.747,09
Simpang Empat	4.832,57	8.132,37	13.830,05	3.347,66	30.142,65
Sungai Loban	5.786,64	12.123,69	20.322,19		38.232,52
JUMLAH TOTAL	55.015,44	98.055,41	185.964,90	147.560,09	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui Jasa Lingkungan penyediaan energi sangat rendah berada di Kecamatan Kusan Hulu, penyediaan energi rendah berada di Kecamatan Mantewe, penyediaan energi sedang berada di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Satui, sedangkan penyediaan energi tinggi berada di Kecamatan Mantewe. Berdasarkan daerah aliran sungai dapat dipastikan

keberadaan DAS Kusan yang menyediakan energi dari kategori sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi.



Gambar 3.19 Jasa Lingkungan Energi

3.1.9. Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat. Jasa Lingkungan dengan jenis tanah subur, curah hujan tinggi, organisme tanah kompleks, vegetasi lahan hutan memiliki potensi yang tinggi.

Berdasarkan perhitungan Jasa Lingkungan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang dirinci per kecamatan dan daerah aliran sungai dapat diketahui Tabel 3.14 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.20.

Tabel 3.14 Jasa Lingkungan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

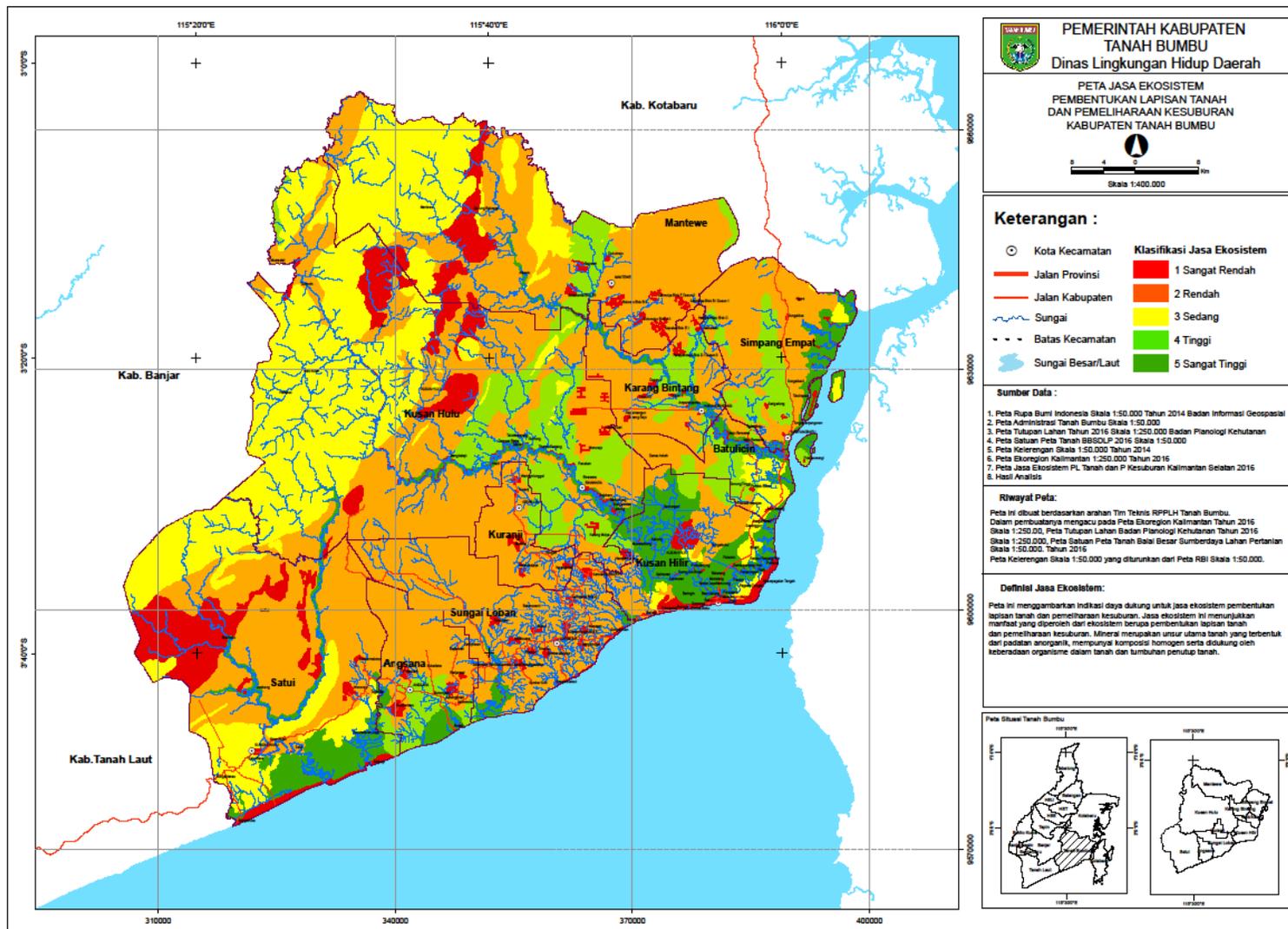
Kecamatan	Jasa Lingkungan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan					Jumlah Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Angsana	579,21	12.343,62	6,63	4.394,48	2.257,16	19.581,10
Batulicin	227,38	4.268,46	2.843,43	3.330,19	2.793,87	13.463,33
Karang Bintang	295,33	13.930,98		4.004,86	1.908,79	20.139,97
Kuranji	337,21	10.133,23		993,94		11.464,38
Kusan Hilir	3.008,02	7.736,02	2.358,77	1.919,79	13.815,76	28.838,37
Kusan Hulu	9.887,56	56.699,24	57.750,08	21.313,72	4.673,26	150.323,86
Mantewe	6.628,62	42.617,28	30.747,10	5.595,83	1.079,91	86.668,74
Satui	14.446,17	37.422,73	24.246,01	505,46	11.135,21	87.755,58
Simpang Empat	466,64	18.112,07	629,76	6.253,09	4.682,83	30.144,39
Sungai Loban	1.411,78	34.649,02		113,83	2.056,16	38.230,80
Jumlah Total	37.287,92	237.912,67	118.581,78	48.425,19	44.402,96	486.610,52

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Jasa Lingkungan kesuburan tanah di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui kategori sangat rendah sebesar 7,66%, Jasa Lingkungan kesuburan rendah sebesar 48,89%, Jasa Lingkungan kesuburan sedang sebesar 24,37%, kesuburan tinggi sebesar 9,95%, sedangkan kesuburan sangat tinggi mencapai 9,12%.

Berdasarkan Jasa Lingkungan kesuburan sangat rendah berada di Kecamatan Satui, sedangkan Jasa Lingkungan kesuburan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu, dan Jasa Lingkungan kesuburan sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hilir. Berdasarkan daerah aliran sungai untuk Jasa Lingkungan

kesuburan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi berada di DAS Kusan.



Gambar 3.20 Peta Jasa Lingkungan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Kesuburan

3.1.10. Jasa Lingkungan Unsur Hara

Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Hara essensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan anorganik alam. Kebutuhan akan bahan anorganik bagi tumbuhan tinggi (pohon) membedakannya dengan organisme lainnya seperti manusia, hewan dan beberapa mikroorganisme yang membutuhkan bahan makanan organik (Mengel et al., 1987). Menurut Binkley (1987) bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah dan aktivitas binatang.

Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi. Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat trofik produser ataupun konsumen yang umumnya berada dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan. Meskipun begitu, organisme di dalam ekosistem yang tua seperti hutan berisi hara dalam konsentrasi dengan jumlah yang besar dan bernilai. Jasa Lingkungan unsur hara dengan jenis tanah subur, curah hujan tinggi, vegetasi lahan hutan memiliki potensi yang tinggi.

Berdasarkan skoring Jasa Lingkungan unsur hara dapat ditampilkan pada Tabel 3.15 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.21.

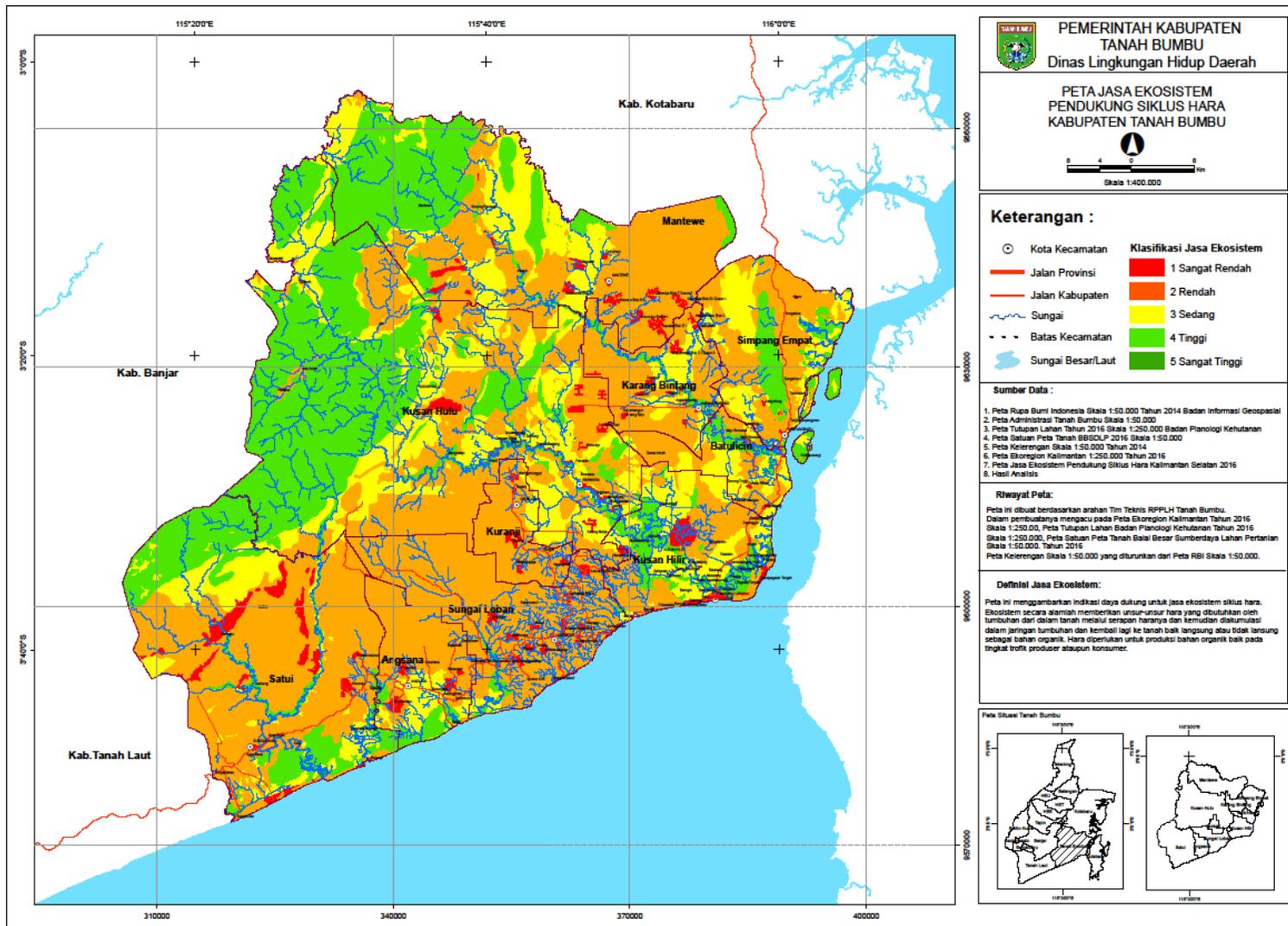
Tabel 3.15 Jasa Lingkungan Unsur Hara

Kecamatan	Jasa Lingkungan Unsur Hara					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	Sangat tinggi	
Angsana	573,58	12.618,24	3.865,83	2.519,72		19.577,37
Batulicin	111,28	6.428,17	4.431,42	2.473,23	18,65	13.462,75
Karang Bintang	295,33	14.058,96	3.872,17	1.913,50		20.139,97
Kuranji	337,21	10.150,58	976,59			11.464,38
Kusan Hilir	1.590,50	10.667,81	9.612,13	6.837,28	129,75	28.837,47
Kusan Hulu	1.445,45	46.064,74	38.003,73	64.807,31		150.321,24
Mantewe	1.127,20	36.767,88	20.229,36	28.544,29		86.668,74
Satui	3.665,83	51.930,53	11.838,33	20.259,20	51,96	87.745,85
Simpang Empat	188,51	15.696,05	7.832,26	6.423,51		30.140,33
Sungai Loban	1.217,52	34.853,41	701,91	1.457,44		38.230,28
Jumlah Total	10.552,42	239.236,37	101.363,73	135.235,49	200,36	486.588,37

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyedia unsur hara di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui kategori sangat rendah sebesar 2,17%, Jasa Lingkungan penyedia unsur hara rendah mencapai 49,17%, Jasa Lingkungan penyedia unsur hara sedang mencapai 20,83%, Jasa Lingkungan penyedia unsur hara tinggi mencapai 27,79% dan Jasa Lingkungan penyedia unsur hara sangat tinggi mencapai 0,04%.

Berdasarkan wilayah administrasi di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui Jasa Lingkungan penyedia unsur hara sangat rendah dan rendah berada di Kecamatan Satui, Jasa Lingkungan penyedia unsur hara sedang dan tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu, sedangkan Jasa Lingkungan penyedia unsur hara sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hilir.



Gambar 3.21 Peta Jasa Lingkungan Unsur Hara

3.1.11. Jasa Lingkungan Produksi Primer

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembutan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

Ekosistem dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengikat karbon. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antarlokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan. Jasa Lingkungan produksi primer sebagai vegetasi lahan hutan memiliki potensi yang tinggi.

Jasa Lingkungan produksi primer berdasarkan administrasi dan daerah aliran sungai di Kabupaten Tana Bumbu dapat ditampilkan pada Tabel 3.16. Pemetaan Jasa Lingkungan penyedia produksi primer dengan berdasarkan wilayah administrasi dan daerah aliran sungai di Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditampilkan pada Gambar 3.22.

Tabel 3.16 Jasa Lingkungan produksi primer

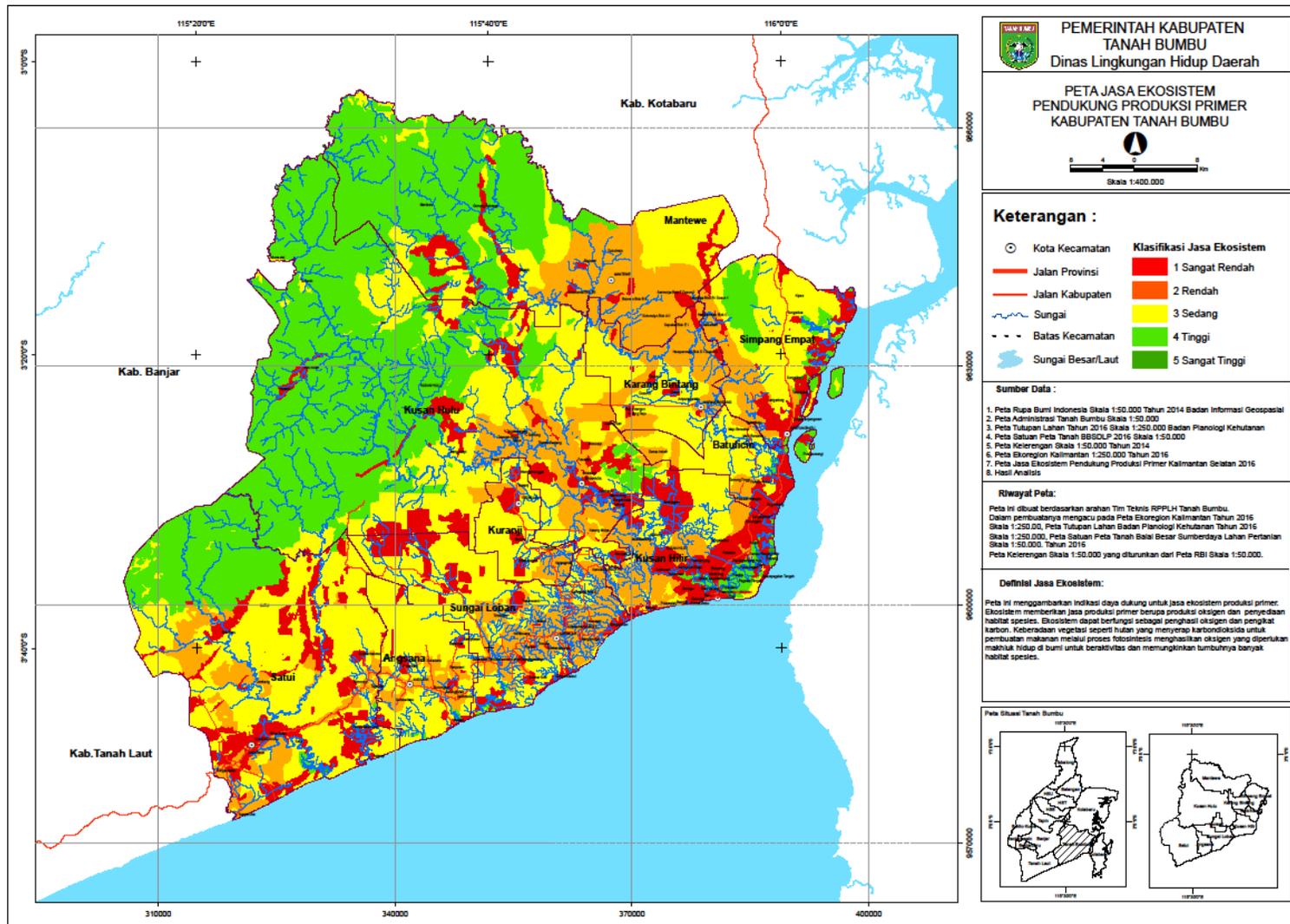
Kecamatan	Jasa Lingkungan produksi primer					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	1.401,34	2.997,17	14.913,88	264,97		19.577,37
Batulicin	2.246,09	2.383,79	8.059,26	750,99	19,42	13.459,55
Karang Bintang	1.261,69	8.321,79	10.556,49			20.139,97
Kuranji	1.492,31	2.057,56	7.914,52			11.464,38
Kusan Hilir	9.582,92	7.410,04	9.036,82	2.657,15	151,60	28.838,54
Kusan Hulu	10.354,18	12.818,59	43.889,26	83.262,31		150.324,33
Mantewe	4.779,02	17.502,70	21.390,54	42.997,19		86.669,45
Satui	13.278,67	9.747,02	45.310,77	19.344,69	65,94	87.747,09
Simpang Empat	4.832,57	4.705,73	14.771,08	5.833,27		30.142,65
Sungai Loban	5.786,64	11.205,94	20.985,97	253,97		38.232,52
Jumlah Total	55.015,44	79.150,33	196.828,58	155.364,54	236,96	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan tabel penyediaan Jasa Lingkungan produksi primer di Kabupaten Tana Bumbu yang dapat dikategorikan sangat rendah mencapai 11,31%, Jasa Lingkungan produksi primer rendah mencapai 16,27%, Jasa Lingkungan produksi primer sedang mencapai 40,45%, Jasa Lingkungan produksi primer tinggi mencapai 31,93% dan Jasa Lingkungan produksi primer sangat tinggi mencapai 0,05%.

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyediaan produksi primer di Kabupaten Tana Bumbu berdasarkan wilayah administrasi dapat diketahui tingkatan kategori sangat rendah berada di Kecamatan Satui,

jenis penyediaan produksi primer rendah berada di Kecamatan Mantewe, jenis penyediaan produksi primer sedang dan tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu, sedangkan jenis penyediaan produksi primer sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hilir.



Gambar 3.22 Peta Jasa Lingkungan Produksi Primer

3.1.12. Jasa Lingkungan Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa Lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jasa Lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup sebagai wilayah yang datar, air bersih mudah, pembangunan infrastruktur, kemudahan pembangunan memiliki potensi yang tinggi

Jasa Lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup sejahtera dengan memperhatikan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.17 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.23.

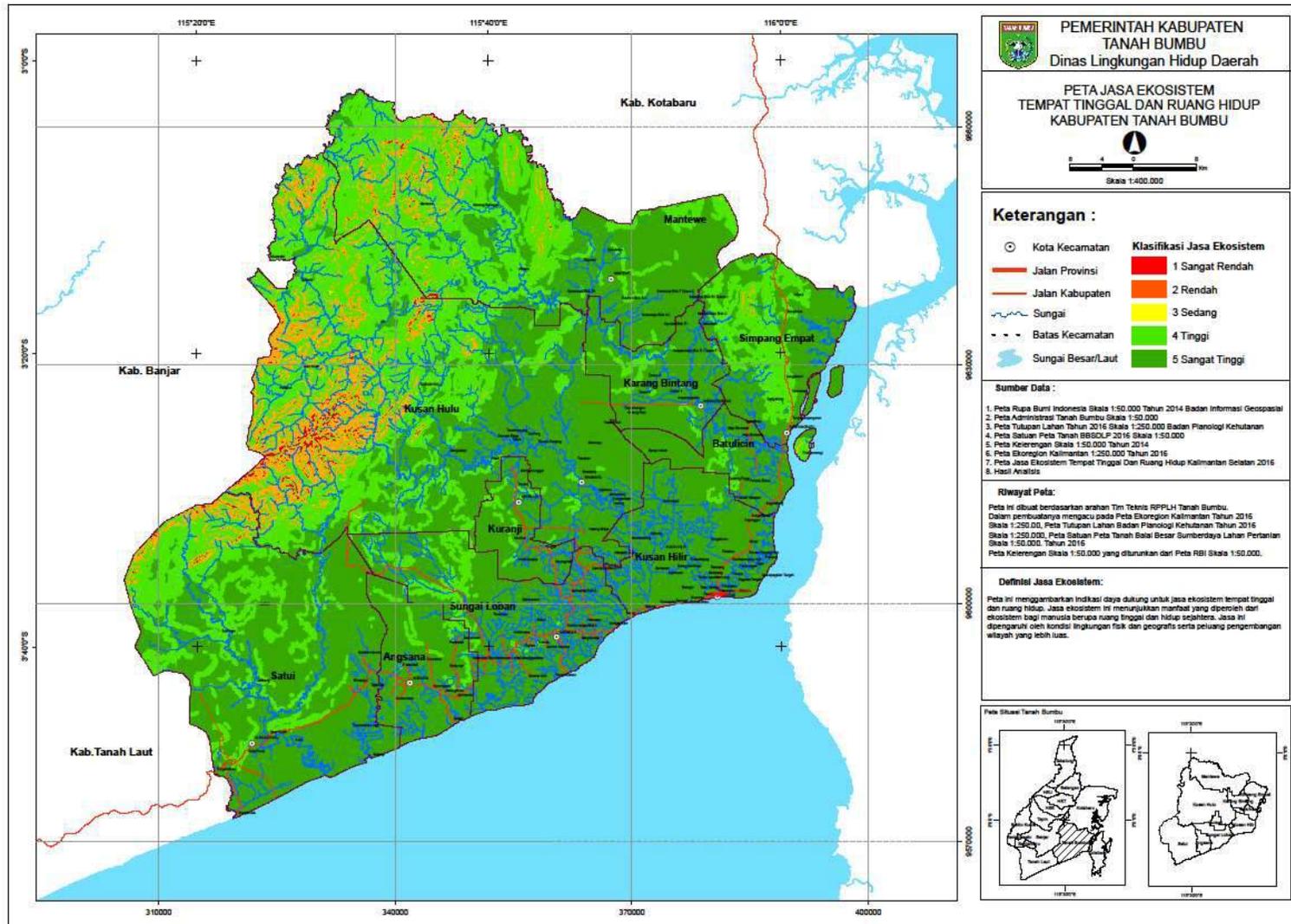
Tabel 3.17 Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Kecamatan	Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup					Jumlah
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana			1,04	1.083,50	18.496,57	19.581,10
Batulicin	20,06	76,19	99,42	845,75	12.418,72	13.460,13
Karang Bintang		0,16	7,37	1.279,45	18.852,98	20.139,97
Kuranji		0,01	1,37	701,86	10.761,14	11.464,38
Kusan Hilir				161,60	28.677,89	28.839,49
Kusan Hulu	14.785,30	16.319,25	14.728,27	37.508,67	66.985,55	150.327,03
Mantewe	4.976,77	6.590,26	8.092,64	27.954,17	39.055,50	86.669,33
Satui	2.038,47	2.212,71	2.225,90	16.561,56	64.718,20	87.756,84
Simpang Empat	182,24	328,32	624,14	8.256,01	20.756,00	30.146,71
Sungai Loban		0,19	27,23	3.207,38	34.998,24	38.233,04
Jumlah Total	22.002,83	25.527,09	25.807,36	97.559,97	315.720,79	486.618,04

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyedia tempat tinggal ruang hidup di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui kategori sangat rendah mencapai 4,52%, Jasa Lingkungan penyedia tempat tinggal ruang hidup kategori rendah mencapai 5,25%, kategori sedang mencapai 5,3%, sedangkan Jasa Lingkungan penyedia tempat tinggal ruang hidup kategori tinggi dan sangat tinggi mencapai 20,05% dan 64,88%.

Berdasarkan wilayah administrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dapat diketahui Jasa Lingkungan penyedia tempat tinggal ruang hidup dengan kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi di Kecamatan Kusan Hulu.



Gambar 3.23 Peta Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

3.1.13. Jasa Lingkungan Rekreasi Dan *Ecotourism*

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentangalam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan *ecotourism*.

Ekosistem rekreasi dan *ecotourism* tinggi adalah ekoregion pegunungan, perbukitan, dataran pantai dan dataran struktural. Daerah pegunungan biasanya memiliki tutupan lahan dominan berupa hutan, sehingga memberikan pemandangan yang indah dan memiliki udara serta suasana yang menyegarkan. Daerah pegunungan struktural dan intrusif dapat dikembangkan sebagai daerah wisata pegunungan seperti untuk pengembangan wisata outbond, *ecotourism* kebun, camping ground maupun wisata edukasi. Daerah perbukitan karst mempunyai potensi untuk pengembangan jasa rekreasi minat khusus karena mempunyai fenomena alam yang unik seperti gua, stalagmit, stalaktit dan sungai bawah tanah. Sedangkan dataran pantai yang berbatasan dengan laut memberikan panorama pantai yang indah dan berbagai potensi wisata laut yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata, seperti diving, snorkeling, water park. Jasa Lingkungan rekreasi dan ekosistem dengan bentang alam berupa pegunungan, pantai, hutan memiliki potensi yang tinggi.

Berdasarkan Jasa Lingkungan rekreasi dan ekosistem dapat diketahui administrasi di Kabupaten Tana Bumbu dapat ditampilkan pada Tabel 3.18 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.24.

Tabel 3.18 Jasa Lingkungan Rekreasi dan *Ecotourism*

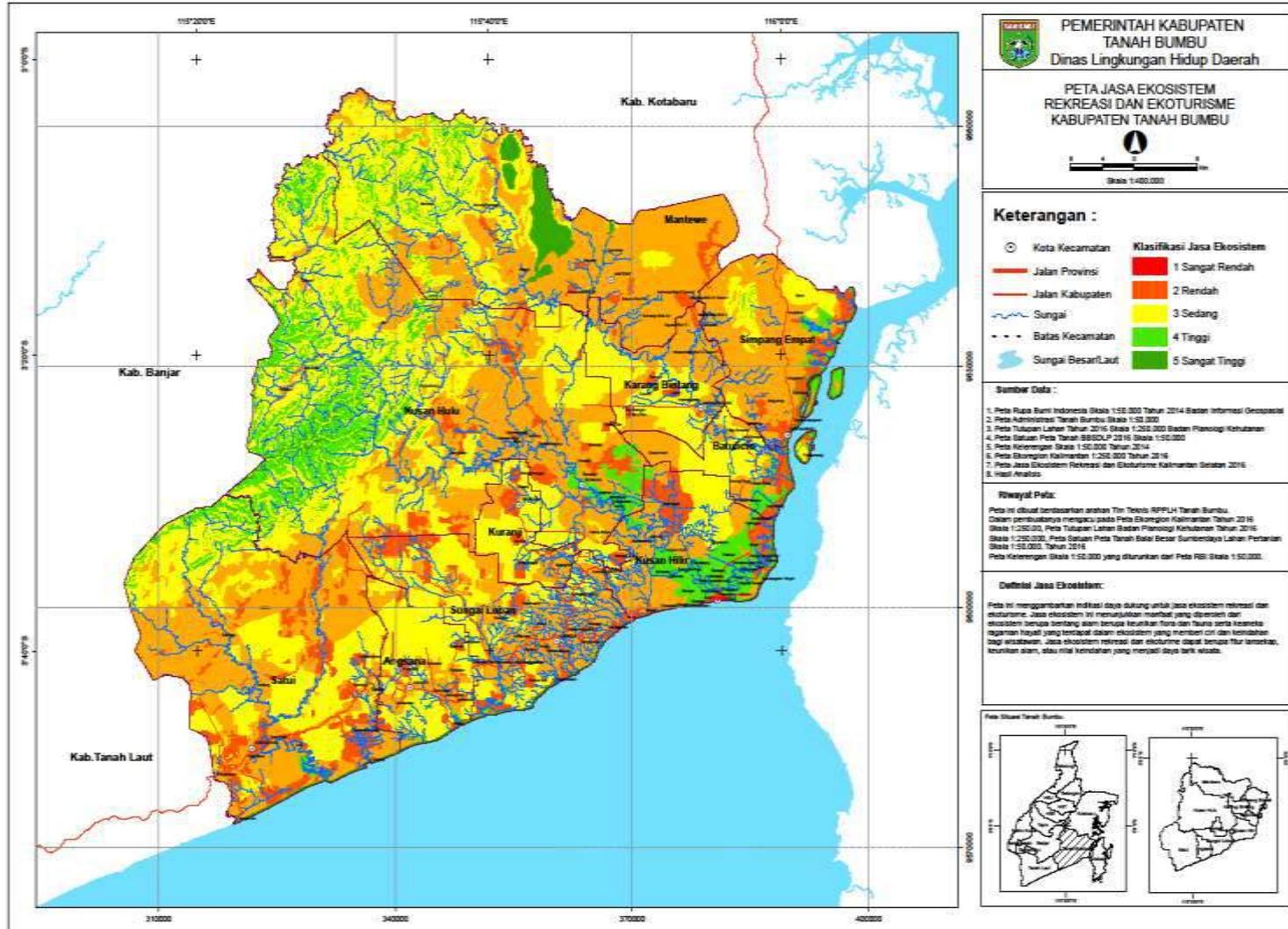
Kecamatan	Jasa Lingkungan rekreasi dan <i>ecotourism</i>					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	1.251,26	4.589,08	13.293,83	236,62	206,59	19.577,37
Batulicin	1.163,46	5.249,17	5.271,11	1.390,89	384,91	13.459,55
Karang Bintang	1.136,51	8.588,82	10.414,57	0,07		20.139,97
Kuranji	1.461,44	2.955,61	7.047,32	0,01		11.464,38
Kusan Hilir	4.496,06	10.975,40	5.247,62	7.467,88	651,57	28.838,54
Kusan Hulu	7.051,83	52.001,52	44.654,90	31.830,78	14.785,30	150.324,33
Mantewe	2.835,26	44.980,45	18.583,72	11.145,09	9.124,78	86.669,31
Satui	11.053,21	44.640,72	25.376,66	4.099,94	2.576,57	87.747,09
Simpang Empat	3.665,38	18.938,56	4.096,64	2.422,80	1.019,27	30.142,65
Sungai Loban	4.869,85	17.535,23	15.067,79	231,69	527,96	38.232,52
Jumlah Total	38.984,27	210.454,57	149.054,16	58.825,77	29.276,94	486.595,71

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyedia rekreasi dan *ecotourism* di Kabupaten Tana Bumbu dengan wilayah administrasi dengan kategori sangat rendah mencapai 8,01%, kategori rendah mencapai 43,25%, kategori sedang mencapai 30,63%, kategori tinggi mencapai 12,09%, sedangkan sangat tinggi mencapai 6,02%.

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyedia rekreasi dan *ecotourism* di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui dengan pendekatan wilayah

administrasi penyedia jasa rekreasi dan ecotourism sangat rendah berada di Kecamatan Satui, penyedia Jasa Lingkungan rekreasi dan ecotourism rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu. Sedangkan Jasa Lingkungan penyedia rekreasi dan ecotourism dengan memperhatikan daerah aliran sungai Kusan sebagai penyedia jasa kategori sangat rendah sampai dengan sangat tinggi.



Gambar 3.24 Peta Jasa Lingkungan rekreasi dan ekosistem

3.1.14. Jasa Lingkungan Estetika Alam

Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki Nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem. Estetika keindahan alam terbentuk dari perpaduan berbagai bentangalam yang masing-masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Penyediaan estetika keindahan alam ini bergantung pada kondisi saat ini apakah masih dalam keadaan baik ataukah sudah mengalami banyak kerusakan. Dataran pantai tidak diragukan lagi menyediakan jasa estetika yang tinggi, karena adanya pemandangan indah yang terbentuk oleh horizon langit dan lautan serta pantai. Keindahan pemandangan pantai juga didukung dengan keindahan alamiah suasana pantai. Jasa Lingkungan estetika alam berupa pegunungan, pantai, hutan memiliki potensi yang tinggi sebagai berikut:

Berdasarkan Jasa Lingkungan estetika alam dapat ditinjau dari administrasi dan daerah aliran sungai di Kabupaten Tana Bumbu yang dapat ditampilkan pada Tabel 3.19 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.25.

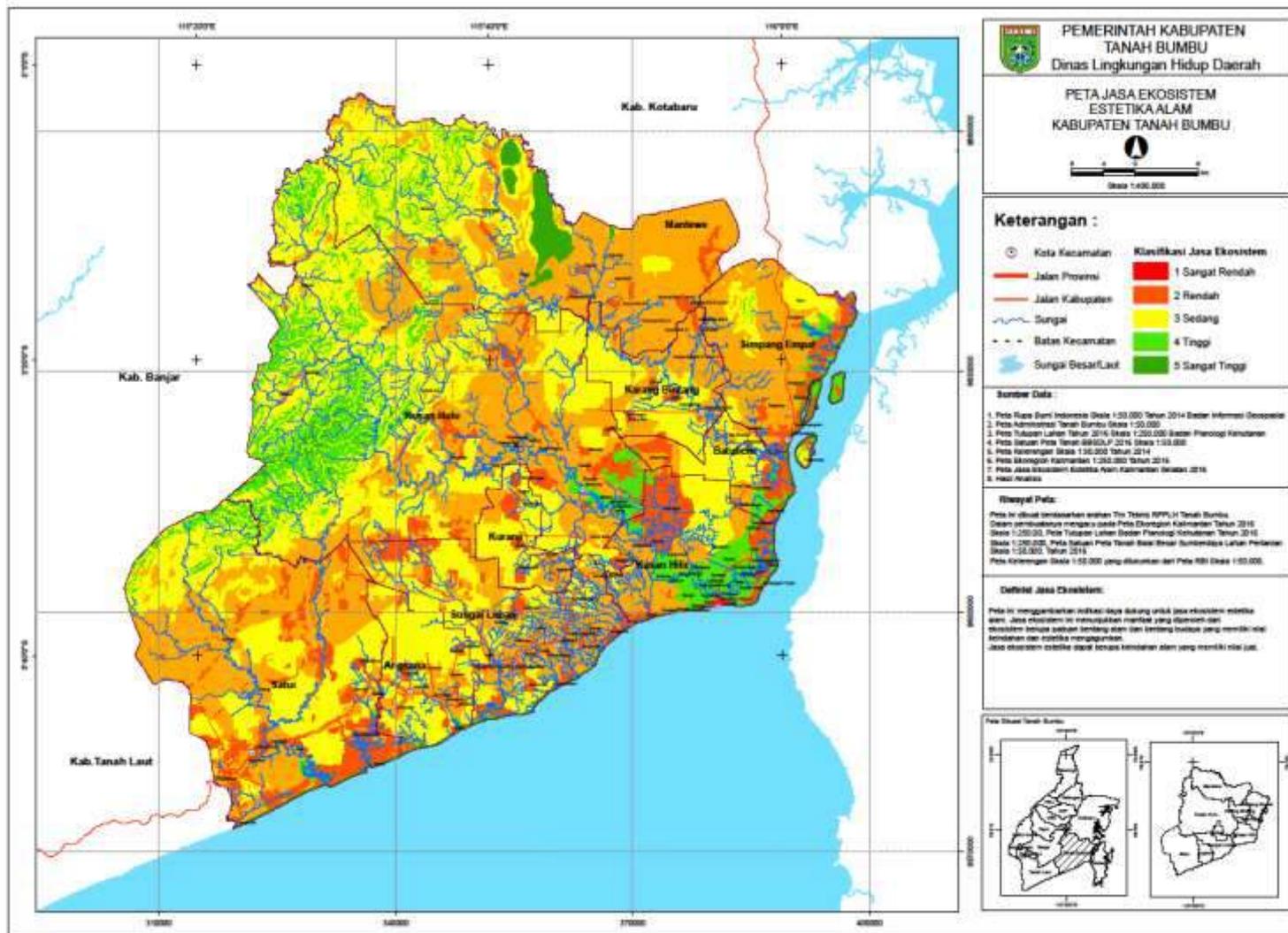
Tabel 3.19 Jasa Lingkungan Estetika Alam

Kecamatan	Jasa Lingkungan Estetika Alam					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	1.597,10	4.243,24	13.293,83	236,62	206,59	19.577,37
Batulicin	2.996,69	3.415,93	5.277,80	1.384,21	384,91	13.459,55
Karang Bintang	1.221,41	8.503,92	10.414,57	0,07		20.139,97
Kuranji	1.461,44	2.955,61	7.047,32	0,01		11.464,38
Kusan Hilir	7.692,08	7.779,39	5.247,62	7.467,88	651,57	28.838,54
Kusan Hulu	8.232,09	50.821,26	44.658,40	31.827,28	14.785,30	150.324,33
Mantewe	2.835,26	44.980,45	18.583,72	11.145,09	9.124,78	86.669,31
Satui	13.267,32	42.426,61	25.376,84	4.099,75	2.576,57	87.747,09
Simpang Empat	4.505,27	18.098,68	4.096,64	2.422,80	1.019,27	30.142,65
Sungai Loban	5.387,57	17.017,51	15.067,86	231,61	527,96	38.232,52
Jumlah Total	49.196,24	200.242,60	149.064,60	58.815,32	29.276,94	486.595,71

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan tabel penyedia Jasa Lingkungan estetika alam di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui bahwa penyediaannya untuk kategori sangat rendah mencapai 10,11%, penyediaan Jasa Lingkungan rendah mencapai 41,152%, jasa penyediaan sedang mencapai 30,63%, jasa penyediaan tinggi mencapai 12,1% dan jasa penyediaan sangat tinggi mencapai 6,02%.

Berdasarkan wilayah administrasi di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui daerah yang menyediakan Jasa Lingkungan estetika alam sangat rendah berada di Kecamatan Satui, sedangkan daerah yang mampu menyediakan Jasa Lingkungan estetika alam dari rendah sampai dengan sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu.



Gambar 3.25 Peta Jasa Lingkungan Estetika

3.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Secara harfiah efisien adalah penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip keefisiensi artinya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Eko-efisiensi dapat diartikan sebagai suatu strategi yang menghasilkan suatu produk dengan kinerja yang lebih baik, dengan menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam yang diambil. Eko-efisiensi merupakan kombinasi efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dan pada dasarnya "*doing more with less*", artinya memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan lebih sedikit energi dan sumber daya alam (Environment Australia, 1999). Sehingga dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi adalah konsep gabungan antara konsep efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dimana penggunaan Sumber Daya Alam seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal dan ekologi tetap terjaga keseimbangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip eko-efisiensi menjadi penting menjadi bagian dalam proses penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dalam upaya mensinergikan dan mengintegrasikan dengan pemanfaatan sumberdaya alam.

Meningkatnya pemanfaatan lahan ini didorong oleh peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Alih fungsi pemanfaatan lahan ini akan berdampak pada berkurangnya layanan Jasa lingkungan dari kawasan yang bervegetasi.

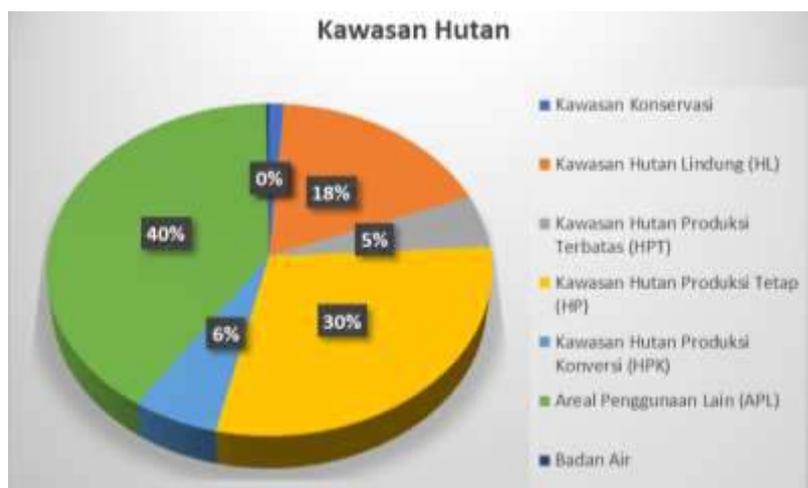
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah yang cukup besar, terdiri dari wilayah darat dan laut serta jumlah penduduk sebanyak 320.452 jiwa (Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka, 2020) membentuk suatu ekosistem kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungan hidupnya. Keanekaragaman bentang alam dan luasnya wilayah ini memberi potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah bagi Kabupaten Tanah Bumbu yang berupa lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya pesisir/laut, dan bahan galian/tambang.

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan, SK Menhut No. 8110, Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Bumbu, status Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan kewenangan penuh daerah hanya seluas 293511,92 ha atau hanya 52,93%, sedangkan seluas 83.125,85 ha atau 47,05% merupakan kawasan hutan yang merupakan hak perizinannya merupakan kewenangan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.27.

Tabel 3.20 Status kawasan hutan

Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kawasan Konservasi	5646,88	1,16
Kawasan Hutan Lindung (HL)	87036,22	17,81
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	25179,36	5,15
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	143751,76	29,42
Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	28291,00	5,79
Areal Penggunaan Lain (APL)	197396,57	40,40
Badan Air	1269,10	0,26
TANAH BUMBU	488570,89	100,00

Sumber: Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan, SK MenLHK No. No. 8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018



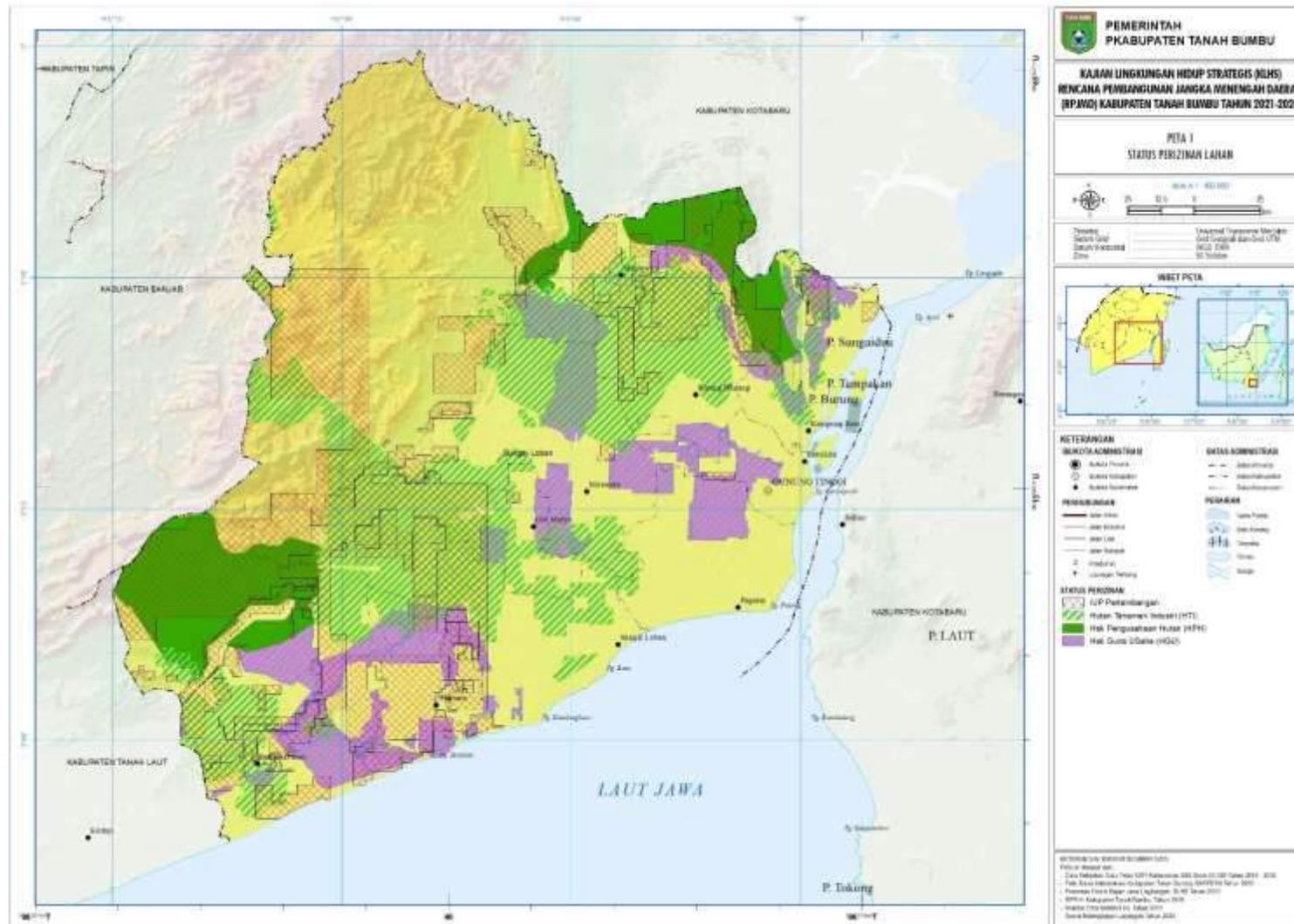
Gambar 3.26 Persentase status kawasan hutan

Untuk melihat status lahan yang sudah memiliki perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana data dari ESDM maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2019), menunjukkan bahwa seluas 289.009 ha atau 59,15% wilayah Tanah bumbu sudah memiliki status perizinan. Perizinan tersebut baik HGU, HTI, HPH maupun IUP pertambangan yang saling tumpang tindih. Statu lahan perizinan ditunjukkan pada Tabel 3.21 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.28.

Tabel 3.21 Status lahan perizinan

Status Perizinan	Luas (Ha)
Hak Guna Usaha (HGU)	69.281,94
Hutan Tanaman Industri (HTI)	135.588,36
Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	46.605,25
IUP Pertambangan	161.447,35

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan 2019.



Gambar 3.28 Peta Satus lahan perizinan

3.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah.

Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau.

Tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ke tiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Pertumbuhan sektor industri dan ekonomi di berbagai negara yang relatif cepat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan CH₄ di atmosfer. Akibatnya peningkatan tersebut berkontribusi dalam perubahan iklim dan berdampak pada perubahan pola cuaca, produksi makanan, serta kehidupan manusia (Nellemann *et al.*, 2009).

Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon.

Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann *et al.*, 2009).



Gambar 3.29 Suhu Maksimum Harian Indonesia (BMKG, 2019)

Berdasarkan data BMKG (2019) suhu udara rata-rata berkisar 27,2 – 28,08 °C, akan tetapi secara maksimum rata-rata telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena wilayah Tanah Bumbu dekat equator yakni sebesar 36,6 °C, makanya hari tanpa bayangan terjadi biasa setiap 23 Maret, pergerakan semu matahari melewati bumi bagian Selatan menuju Utara.

Jasa Lingkungan pengaturan iklim dengan fungsi operasional pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon. Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Pegunungan didominasi oleh penggunaan lahan hutan, yang mana penghasil oksigen. Penggunaan lahan dan ketinggian tempat menyebabkan udara di pegunungan dan perbukitan lebih sejuk dan relatif bersih. Hutan juga menjadi penyaring alami polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Dataran fluvial yang berpenggunaan lahan sawah juga mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan iklim. Tanaman pangan atau lahan pertanian menghasilkan juga oksigen dari hasil proses fotosintesis sehingga membuat udara lebih sejuk. Perbukitan dengan penggunaan lahan ladang mempunyai potensi sedang. Rendahnya kerapatan vegetasi

dan ketinggian tempat membuat potensinya tidak sebaik kawasan hutan. Penggunaan lahan semak belukar di berbagai ekoregion mempunyai potensi rendah untuk mengatur iklim. Kerapatan vegetasi relatif renggang, luas tajuk pohon yang sempit dan ketinggian tempat rendah membuat oksigen yang dihasilkan relatif sedikit. Kelestarian hutan merupakan hal yang penting agar iklim dalam suatu daerah dapat dikontrol sehingga tetap sejuk serta menyerap polusi udara.

Hutan menghasilkan karbon dan oksigen sehingga suhu menjadi lebih sejuk. Fungsi hutan lainnya adalah menyerap karbondioksida dan partikel kotor yang ada di udara sehingga kualitas udara dapat terjaga. Hamparan tanaman kebun dan tanaman semusim yang luas mampu menetralkan iklim disekitarnya menjadi sejuk. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman, semakin rapat dan banyak jumlah vegetasi maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Penggunaan lahan semak belukar hanya mempunyai potensi sedang untuk pengaturan iklim. Vegetasi di semak belukar relatif sedikit atau didominasi sejenis rumput-rumputan. Oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak dibandingkan dengan tumbuhan atau tanaman. Jumlah vegetasi yang sedikit di wilayah permukiman membuat pengaturan iklim tidak maksimal. Udara di perkotaan sudah tercampur zat dari bahan bakar atau kegiatan industri sehingga terasa lebih panas. Kelestarian hutan merupakan hal yang penting untuk menjaga kemampuan ekosistem untuk pengaturan iklim.

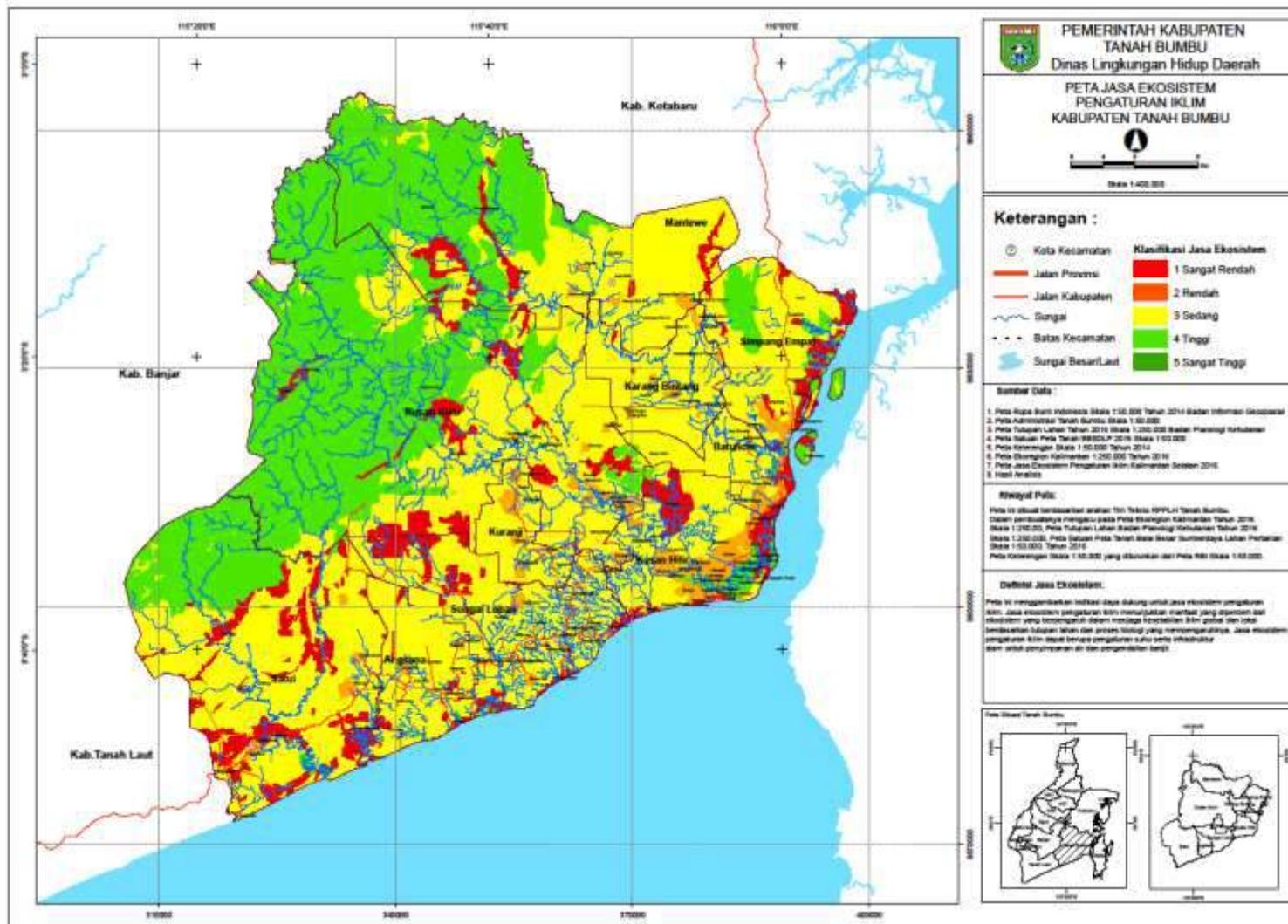
Jasa Lingkungan pengaturan iklim berdasarkan wilayah administrasi ditampilkan pada Tabel 3.22 dan secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.30.

Tabel 3.22 Jasa lingkungan pengaturan iklim

Kecamatan	Jasa Lingkungan pengaturan iklim					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	Sangat tinggi	
Angsana	879,26	522,09	17.911,05	264,97		19.577,37
Batulicin	934,72	1.311,37	10.443,04	750,99	19,42	13.459,55
Karang Bintang	249,67	1.012,02	18.878,28			20.139,97
Kuranji	57,50	1.434,81	9.972,07			11.464,38
Kusan Hilir	4.375,43	5.207,49	16.446,86	2.657,15	151,60	28.838,54
Kusan Hulu	7.796,04	2.558,14	56.707,85	83.262,31		150.324,33
Mantewe	3.753,48	1.025,54	38.893,24	42.997,19		86.669,45
Satui	11.901,20	1.377,47	55.057,79	19.344,69	65,94	87.747,09
Simpang Empat	3.524,44	1.308,14	19.476,81	5.833,27		30.142,65
Sungai Loban	4.409,64	1.377,00	32.191,91	253,97		38.232,52
jumlah total	37.881,39	17.134,05	275.978,91	155.364,54	236,96	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Berdasarkan tabel Jasa Lingkungan pengaturan iklim dengan wilayah administrasi dapat diketahui Jasa Lingkungan pengaturan iklim sangat rendah mencapai 7,78%, Jasa Lingkungan pengaturan iklim rendah mencapai 3,52%, Jasa Lingkungan pengaturan iklim sedang mencapai 56,72%, Jasa Lingkungan pengaturan iklim tinggi mencapai 31,93%, Jasa Lingkungan pengaturan iklim sangat tinggi mencapai 0,05%.



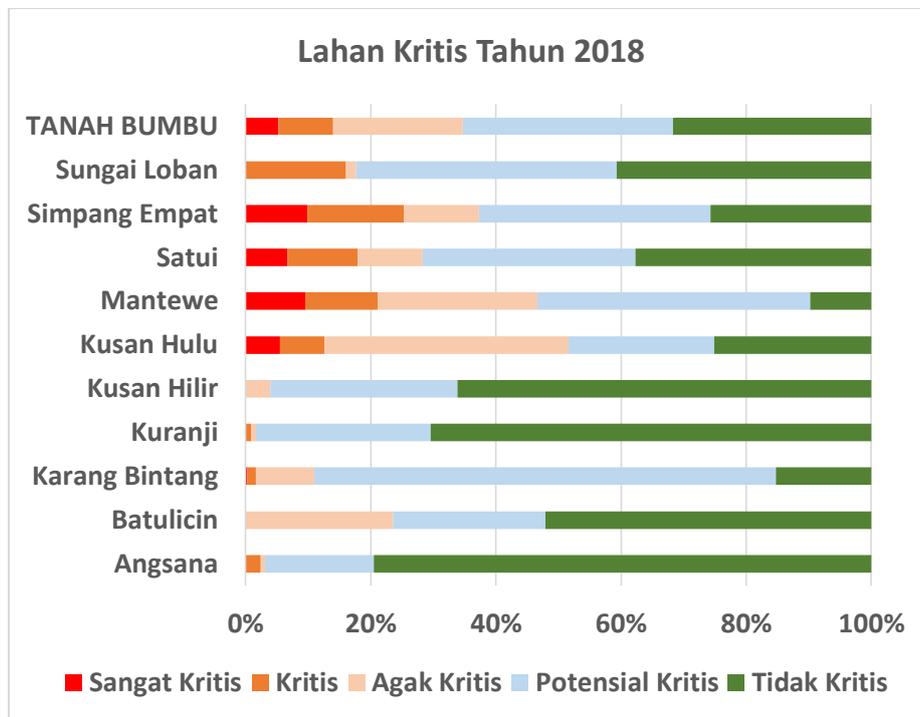
Gambar 3.30 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Meskipun memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim yang tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan potensi lahan kritis, sehingga berdampak terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data BPDAS tahun 2018, menunjukkan bahwa lahan sangat kritis sebesar 5,27%, kritis 8,73%, agak kritis 20,68%, potensial kritis 33,59% dan tidak kritis 31,73% nilai ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan data lahan kritis tahun 2018, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.31 dan Tabel 3.23.

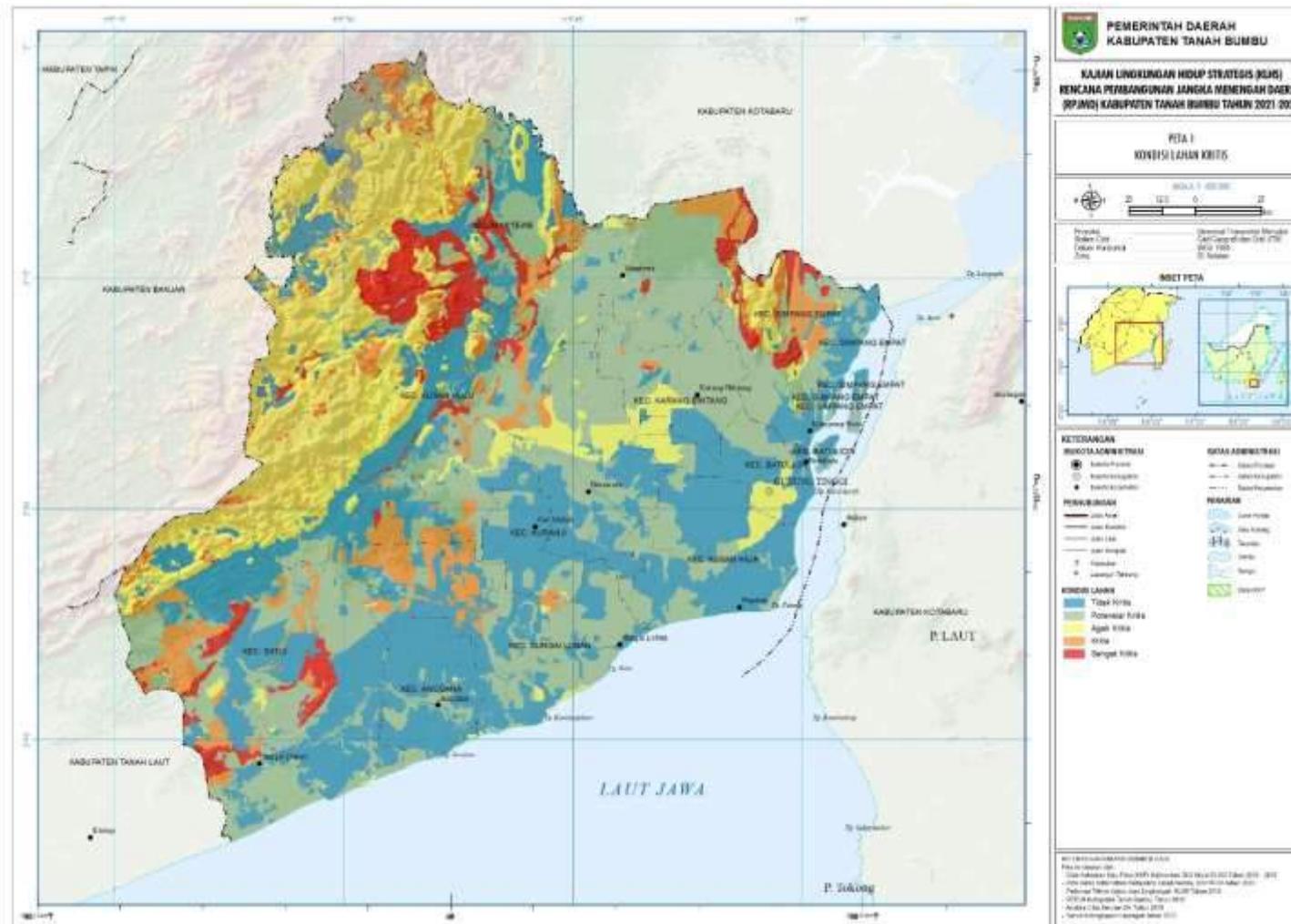
Tabel 3.23 Lahan kritis setiap kecamatan tahun 2018

Kecamatan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis
Angsana		472,61	140,52	3405,59	
Batulicin			3192,04	3286,27	
Karang Bintang	51,30	262,56	1789,37	14135,36	
Kuranji		102,92	87,63	3204,05	
Kusan Hilir			1129,24	8616,63	
Kusan Hulu	8135,48	10539,06	57801,26	34447,37	
Mantewe	8831,11	10728,76	23700,29	40486,79	
Satui	5850,10	9886,96	9076,75	29784,70	
Simpang Empat	2883,07	4509,58	3509,95	10800,80	
Sungai Loban		6154,20	605,06	15947,28	
TANAH BUMBU	25751,06	42656,65	101032,12	164114,86	

Sumber: Hasil analisis data BPDAS Kalsel, 2020.

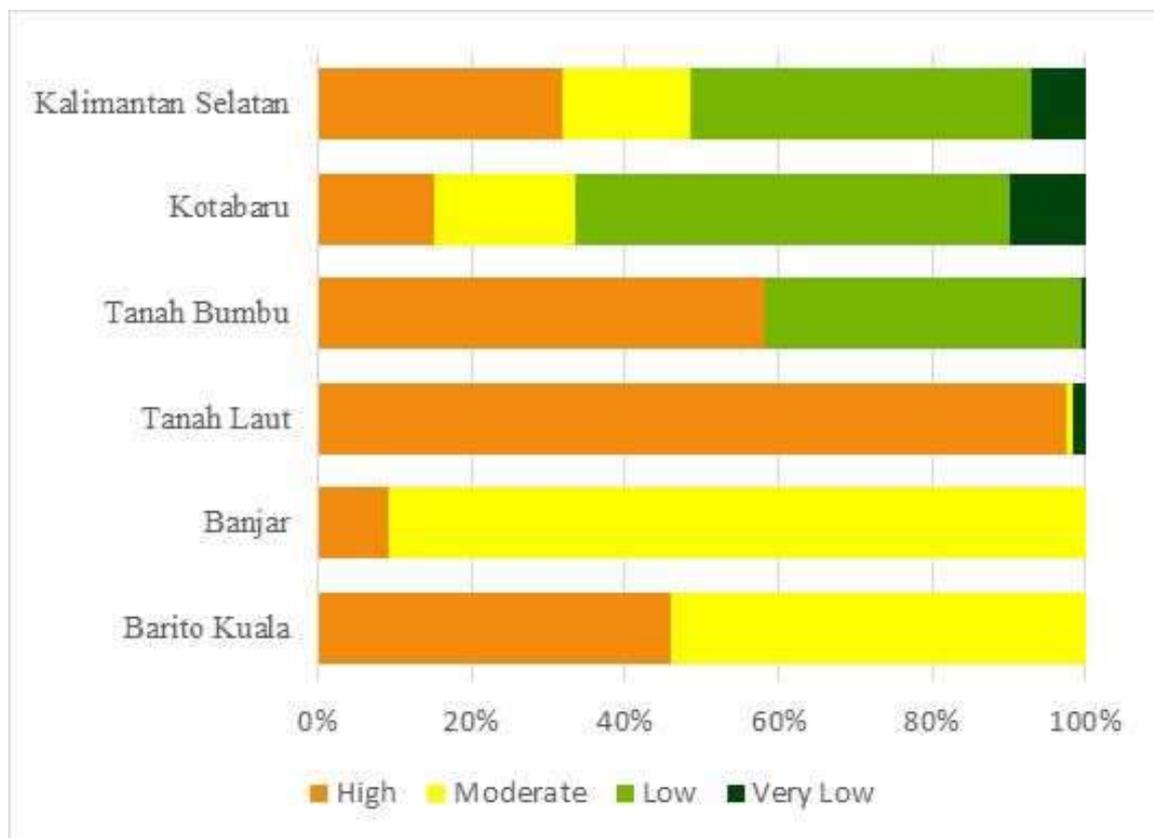


Gambar 3.31 Proporsi (%) lahan kritis tahun 2018



Gambar 3.32 Peta Lahan kritis tahun 2018

Kenaikan muka air laut adalah salah satu fenomena perubahan iklim, yang berhubungan dengan bagaimana kinaikan muka air laut global mempengaruhi suatu bagian dari garis pantai. Kenaikan muka air laut relatif diukur tanpa memperhatikan perubahan vertikal dari permukaan tanah seperti penurunan (subsidence) dan penaikan (uplift) muka tanah. Suatu institusi internasional yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengeluarkan beberapa skenario perubahan iklim di masa mendatang. Berdasarkan model IPCC di dalam Special Report on Emission Scenario (SRES) aib dengan proyeksi konsentrasi CO₂ pada tahun 2100 (part per million) yang menggunakan model MRI CGCM2.3 (Jepang) memperlihatkan bahwa laju kenaikan muka air laut rata-rata di pesisir khususnya Kalimantan Selatan dalam kategori sangat tinggi yakni >0,76 cm/tahun dan kategori tinggi yakni 0,75 – 0,76 cm/tahun. Untuk wilayah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu termasuk dalam kategoru sangat tinggi (23,47%) dan tinggi 76,53%.



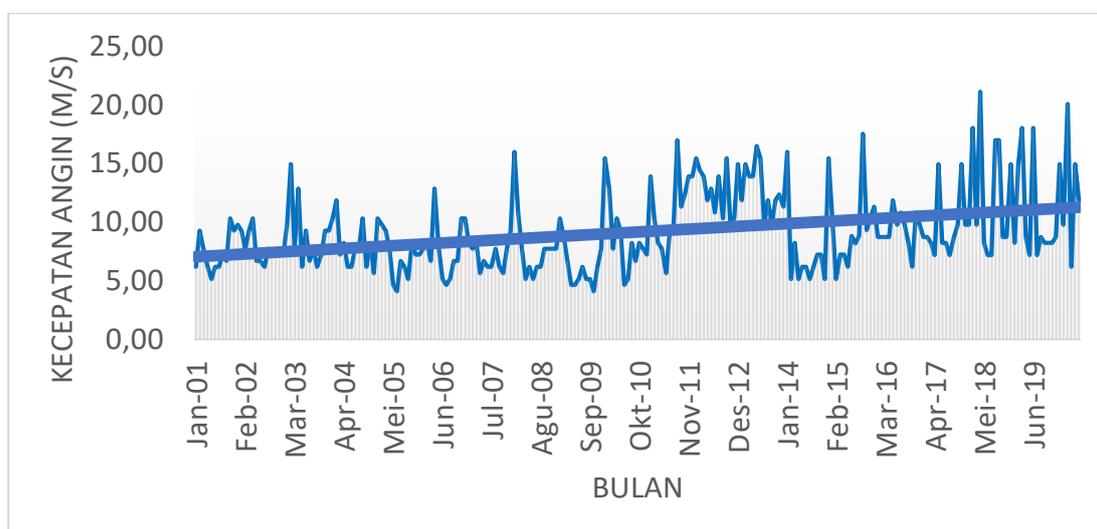
Gambar 3.33 Persentase kenaikan muka laut relatif di setiap kabupaten pesisir

Indeks kerentanan pantai adalah suatu indikator yang menunjukkan tingkat kerentanan relatif suatu pesisir terhadap perubahan paras muka laut. Identifikasi tingkat kerentanan dilakukan pada daerah sepanjang pantai yang dianalisis berdasarkan parameter-parameter fisik yang mempengaruhinya yakni geomorfologi pantai, kemiringan, kenaikan muka air laut, tunggang pasut dan tinggi gelombang signifikan. Dari hasil analisis (DLH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018) diperoleh IKP di Kabupaten Tanah Bumbu, disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Indeks kerentanan pantai Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten/ Kecamatan	Indeks Kerentanan Pantai								Total
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	
TANAH BUMBU	-	-	12,81	2,75	63,19	13,19	83,11	27,42	159,11
Satui	-	-	-	-	-	-	23,42	100,00	23,42
Angsana	-	-	-	-	-	-	14,00	100,00	14,00
Sungai Loban	-	-	-	-	-	-	23,67	100,00	23,67
Kusan Hilir	-	-	-	-	4,57	-	22,03	82,82	26,60
Batulicin	-	-	12,81	56,51	9,86	-	-	-	22,67
Simpang Empat	-	-	-	-	48,76	-	-	-	48,76

Tingginya indeks kerentanan pantai di Kalimantan Selatan juga dipicu dengan adanya perubahan kecamatan angin yang dalam kurun 20 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.34.



Gambar 3.34 Kondisi Angin Maksimum Selama 20 tahun (2001 – 2020)

3.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta komplekskompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumberdaya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumberdaya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat, kebutuhan akan sumberdaya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam

pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Jasa Lingkungan Biodiversitas sebagai vegetasi lahan hutan memiliki potensi yang tinggi.

Tabel 3.25 Jasa Lingkungan Biodiversitas

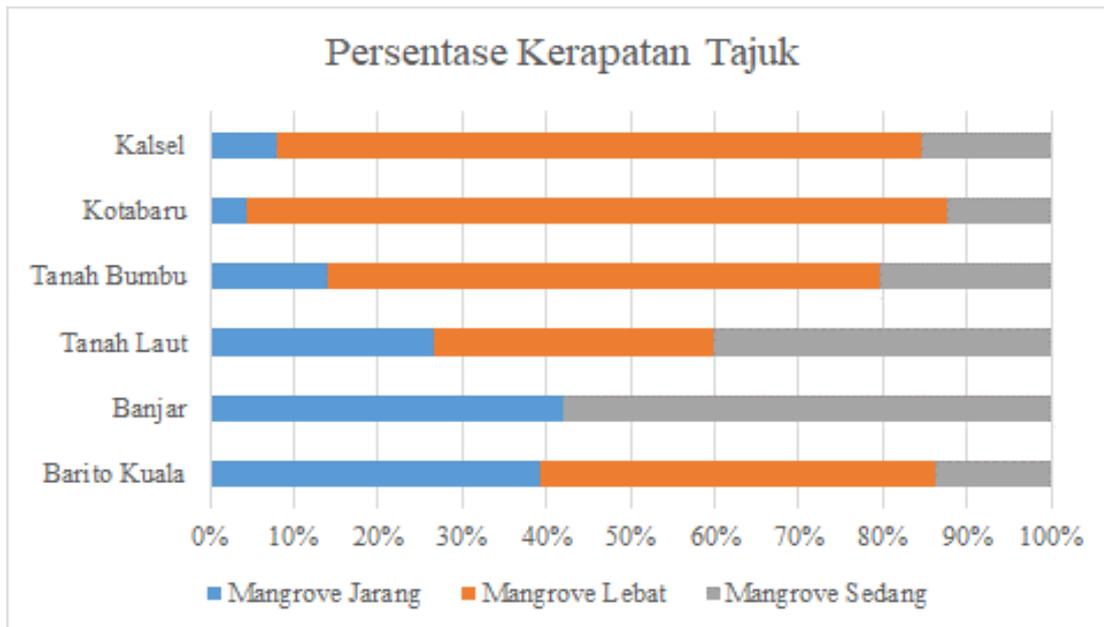
Kecamatan	Jasa Lingkungan Biodiversitas					Jumlah Total
	sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi	
Angsana	1.401,34	2.997,17	14.913,88	264,97		19.577,37
Batulicin	2.246,09	2.383,79	8.059,26	750,99	19,42	13.459,55
Karang Bintang	1.261,69	8.321,79	10.556,49			20.139,97
Kuranji	1.492,31	2.057,56	7.914,52			11.464,38
Kusan Hilir	9.582,92	7.410,04	9.036,82	2.657,15	151,60	28.838,54
Kusan Hulu	10.354,18	12.818,59	43.889,26	83.262,31		150.324,33
Mantewe	4.779,02	17.502,70	21.390,54	42.997,19		86.669,45
Satui	13.278,67	9.747,02	45.310,77	19.344,69	65,94	87.747,09
Simpang Empat	4.832,57	4.705,73	14.771,08	5.833,27		30.142,65
Sungai Loban	5.786,64	11.205,94	20.985,97	253,97		38.232,52
Jumlah Total	55.015,44	79.150,33	196.828,58	155.364,54	236,96	486.595,85

Sumber: RPPLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2019.

Berdasarkan Jasa Lingkungan penyedia Biodiversitas di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui kategori sangat rendah mencapai 11,31%, Jasa Lingkungan dengan kategori rendah mencapai 16,27%, Jasa Lingkungan dengan kategori sedang mencapai 40,45%, Jasa Lingkungan dengan kategori tinggi mencapai 31,39% dan Jasa Lingkungan dengan kategori sangat tinggi mencapai 0,05%.

Berdasarkan penyediaan Jasa Lingkungan biodiversitas dengan meninjau wilayah administrasi di Kabupaten Tana Bumbu dapat diketahui dengan kategori sangat rendah berada di Kecamatan Satui, Jasa Lingkungan penyedia jasa dengan kategori rendah berada di Kecamatan Mantewe, Jasa Lingkungan penyedia biodiversitas sedang dan tinggi berada di Kecamatan Kusan Hulu, sedangkan Jasa Lingkungan penyedia biodiversitas sangat tinggi berada di Kecamatan Kusan Hilir.

Berdasarkan analisis Citra Satelit Landsat 8 tahun 2017 (resolusi 15x15 m), Citra Quickbird tahun 2015 (resolusi 0,6x0,6m) dan BIG (2016), luas hutan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Selatan Sebesar 67.008,659 ha, dimana dalam kategori tutupan mangrove lebat sebesar 51.344,567 ha (76,62%), sedang 10.416,060 ha (15,54%) dan jarang hanya 5.248,032 ha (7,83%). Berdasarkan sebaran lokasi, Kabupaten Kotabaru memiliki mangrove yang cukup luas yakni 55.246,462 ha atau 82,45%, kemudian Kabupaten Tanah Laut seluas 5.920,804 ha (8,82%), Kabupaten Tanah Bumbu seluas 4.130,671 ha (6,16%), Kabupaten Barito Kuala 1.5714,966 ha (2,34%) dan terkecil adalah Kabupaten Banjar hanya 138,756 ha atau 0,21%, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.35.



Gambar 3.35 Persentase kerapatan tajuk mangrove setiap kabupaten

Biomassa mangrove, sebagaimana biomassa pepohonan lainnya, menyerap CO₂ dan melalui proses fotosintesis mengubahnya menjadi karbon organik (karbohidrat) dan menyimpannya dalam biomassa tubuh pohon. Hasil penelitian Donato, *et. al* (2012) menemukan bahwa mangrove merupakan salah satu hutan yang simpanan karbonnya tertinggi di kawasan tropis (nilai rerata contoh: 1.023 Mg C ha⁻¹ ±88 s.e.m.), dan sangat tinggi dibandingkan rerata simpanan karbon di berbagai tipe hutan lainnya di dunia. Cadangan karbon tersebut terutama terakumulasi pada biomassa yang membusuk, terdekomposisi, dan selanjutnya tersimpan pada lapisan tanah. Vegetasi mangrove merupakan salah satu vegetasi hutan yang memberikan kontribusi positif dalam membantu penyerapan karbon pada permukaan atmosfer. Hutan mangrove tumbuh berkembang di daerah pantai yang selalu, atau secara teratur, tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Hutan Mangrove, sebagaimana hutan lainnya, memiliki peran sebagai penyerap (rosot) karbon dioksida (CO₂) dari udara. Rosot karbon dioksida berhubungan erat dengan biomassa pohon pada vegetasi.

Rerata karbon di mangrove muara sebesar 1.074 Mg C ha⁻¹ (±171 s.e.m.); sementara untuk mangrove laut sebesar 990 ± 96 Mg C ha⁻¹. Cadangan C di atas permukaan nilainya cukup besar (rerata 159 Mg C ha⁻¹, maksimum 435 Mg C ha⁻¹), namun cadangan di bawah permukaan tetap mendominasi, untuk mangrove muara dan laut masing-masing sebesar 71–98% dan 49–90% dari total simpanan. Simpanan C di bawah permukaan berkorelasi positif namun lemah dengan simpanan di atas permukaan (R² = 0,21 dan 0,50 masing-masing untuk mangrove muara dan laut). Walaupun cadangan C tanah sedikit meningkat dengan jarak dari laut untuk mangrove laut (karena meningkatnya kedalaman tanah), perubahan cadangan C di atas maupun di bawah permukaan pada gradien jarak ini sangat bervariasi dan secara statistik tidak signifikan.

Oleh karena minimnya data mengenai cadangan karbon mangrove di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perhitungan mengacu pada hasil kajian dari Kementerian Kehutanan (2014) dari Buku Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia. Hasil potensi cadangan karbon setiap kabupaten dari ekosistem mangrove disajikan pada Tabel 3.26. Berdasarkan hasil analisis (Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan, 2018) diperoleh cadangan karbon di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 296.407,23 ton/ha atau 5,83% dari luas total potensi karbon di Kalimantan Selatan.

Tabel 3.26 Potensi cadangan karbon dari ekosistem mangrove di setiap kecamatan

No	Kabupaten/ Kecamatan	Potensi Karbon (ton/ha)	Persentase	
			Wilayah	Total
	TANAH BUMBU	662.323,43	100,00	5,83
1	Satui	173.606,36	26,21	1,53
2	Angsana	30.986,35	4,68	0,27
3	Sungai Loban	25.127,61	3,79	0,22
4	Kusan Hilir	72.443,08	10,94	0,64
5	Batulicin	63.752,80	9,63	0,56
6	Simpang Empat	296.407,23	44,75	2,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.

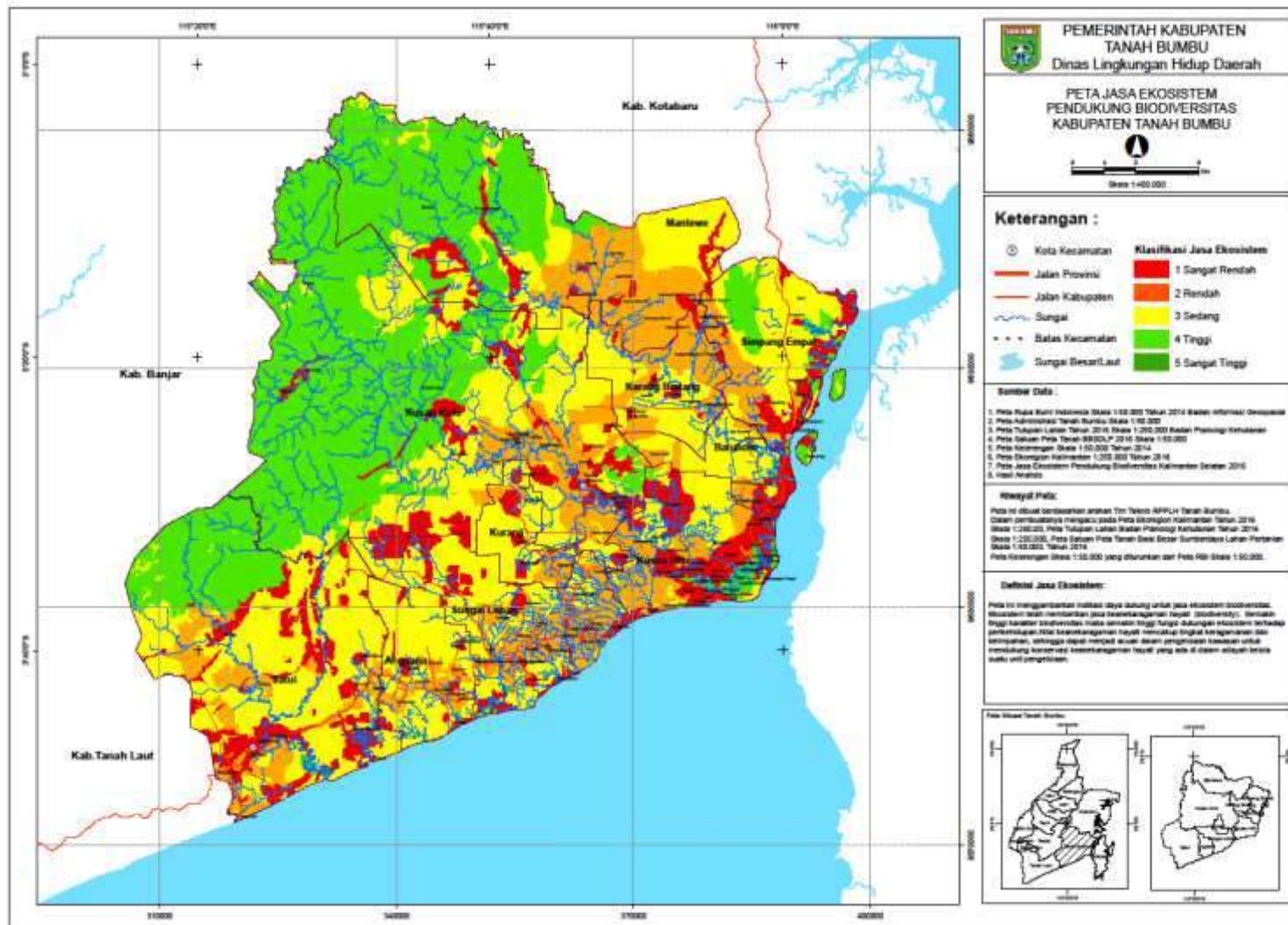
Selain mangrove Kabupaten Tanah bumbu juga memiliki potensi keanekaragaman hayati di wilayah perairan laut. Salah satu keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu adanya tiga ekosistem penting yang berada disana. Ketiga ekosistem tersebut adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang mempunyai peranan sangat besar bagi kehidupan di laut serta proses-proses hidrodinamika yang terjadi di wilayah pesisir dan laut. Selain berfungsi sebagai habitat, tempat pemijahan (*spawning ground*), tempat pengasuhan (*nursery ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi biota laut, lamun, mangrove dan terumbu karang juga berfungsi melindungi pantai dari terpaan gelombang laut. Sumberdaya yang mendiaminya juga berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Walaupun berbeda, adanya ketiga komponen tersebut (lamun, mangrove dan terumbu karang) dalam suatu ekosistem pantai akan memperlihatkan keragaman dan kelimpahan biota yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang hanya memiliki salah satu komponen tersebut. Hal ini disebabkan oleh fungsi biologi dan ekologi yang dimiliki oleh masing-masing komponen.

Terumbu karang merupakan ekosistem perairan dangkal yang banyak dijumpai di sepanjang garis pantai daerah tropis. Keberadaannya dibatasi oleh parameter suhu, salinitas, intensitas cahaya matahari dan kecerahan suatu perairan. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif kalsium karbonat (CaCO_3), yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu karang (hermatipik) dari filum *Cnidaria*, Ordo *Scleractinia* yang hidup bersimbiosis dengan alga bersel satu *Zooxanthellae*, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang mensekresi kalsium karbonat.

Berdasarkan peta Pushidrosal, digital C-Map, BIG dan Citra Landsat, sebaran terumbu karang di pesisir Kalimantan Selatan (RZWP-3-

K Provinsi Kalimantan Selatan, 2017) sebaran terumbu karang terdapat di Bagian selatan Kabupaten Tanah Bumbu yakni perairan Laut Jawa meliputi Sungai Cuka, Setarap, Angsana, Sungai Dua Laut sampai Sungai Loban. Terumbu karang di wilayah ini merupakan paparan gosong karang dengan mengembangkan bentuk pertumbuhan yang unik. Gosong karang utamanya terkonsentrasi di wilayah Tanjung Teraban dan Tanjung Kandang Haur.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan kondisi kecenderungan penurunan persentase tutupan karang di perairan Tanah Bumbu. Di duga perubahan iklim yang dikenal dengan El Nino telah memicu peningkatan suhu air laut sehingga karang pada biotop dangkal mengalami *bleaching*. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan fenomena La Nina yang ditandai curah hujan yang besar hampir sepanjang tahun telah berdampak pada perubahan pH dan Salinitas serta peningkatan sedimentasi. Dalam satu dekade terakhir dimana kondisi penataan kawasan atas belum baik, terjadi perubahan luasan wilayah tangkapan hujan akibat illegal logging, konversi lahan menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan telah memicu peningkatan aliran permukaan (*run-off*) ketika musim penghujan. Semua hal tersebut berdampak meningkatnya intensitas banjir dan perubahan salinitas, pH dan meningkatkan sedimentasi yang diikuti peningkatan hara di perairan. Sedimentasi dan hara yang berlebih akan memicu pertumbuhan makro alga yang akan mengancam dominasi pertumbuhan karang. hal ini bisa dibuktikan bahwa nilai turf algae dan DCA (*dead coral with algae*) nilai cenderung semakin besar.



Gambar 3.36 Peta Jasa Lingkungan Biodiversitas

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tanah Bumbu, dari 185 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada Tabel 4.1, sedangkan rincian capaian indikator TPB Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada Lampiran.

Tabel 4.1 Menunjukkan capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 86 indikator, belum mencapai target 39 indikator, tidak ada data sebanyak 60 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 0 indikator.

Tabel 4.1 Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum Mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
PILAR SOSIAL						
TPB1	Tanpa Kemiskinan	13	9	2	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	7	3	1	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan sejahtera	18	5	13	0	36
TPB4	Pendidikan Berkualitas	6	10	0	0	16
TPB5	Kesetaraan Gender	2	1	0	0	3
PILAR EKONOMI						
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	1	0	0	0	1
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	0	3	0	6
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	1	4	0	8
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	0	0	0	0	0
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3	0	11	0	14
PILAR LINGKUNGAN						
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	4	9	0	18
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	7	2	4	0	13
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	1	0	4	0	5
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	2	0	0	0	2
TPB13	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	3	0	0	0	3
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	0	3	0	4
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	11	4	6	0	21
	Total	86	39	60	0	185

4.1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional

Pelaksanaan indikator TPB Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target terdiri dari pilar sosial sebanyak

46 indikator, pilar ekonomi sebanyak 10 indikator, pilar lingkungan sebanyak 19 indikator, serta pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 11 indikator. Grafik capaian dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 86 indikator (46,49%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.2.



Gambar 4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional berdasarkan Tujuan

No.	Tujuan	Mencapai target	Persentase (%)
TPB1	Tanpa Kemiskinan	13	15,12
TPB2	Tanpa Kelaparan	7	8,14
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	20,93
TPB4	Pendidikan Berkualitas	6	6,98
TPB5	Kesetaraan Gender	2	2,33

No.	Tujuan	Mencapai target	Persentase (%)
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	5,81
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	1	1,16
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	3,49
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	3,49
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	0	0,00
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	7	8,14
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	1	1,16
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	2	2,33
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	3	3,49
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	1,16
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	11	12,79
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3	3,49
	Total	86	100,00

Gambar 4.2 dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 18 indikator (20,93%), kemudian tujuan Tanpa Kemiskinan sebanyak 13 indikator (15,12%), serta tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan sebanyak 11 indikator (12,79%). Indikator TPB yang telah mencapai target ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator TPB yang Telah Mencapai Target Nasional

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
PILAR SOSIAL	
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
TPB 2. Tanpa Kelaparan	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
	tahun/balita
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
TPB 3. Kehidupan Sehat dan sejahtera	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
TPB 5. Kesetaraan gender	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
PILAR EKONOMI	
TPB 7. Energi Bersih & Terjangkau	
7.3.1*	Intensitas energi primer
TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten/3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)
PILAR LINGKUNGAN	
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
TPB 13. Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang
TPB 14. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.
14.b.1.(a)	Jumlah desa/kelurahan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
14.b.1.(b)	"Jumlah nelayan yang terlindungi
TPB 15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	
TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

4.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Gambaran indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.3, dimana pilar sosial 28 indikator, ekonomi 1 indikator, lingkungan 6 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 4 indikator.



Gambar 4.3 Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 39 indikator (21,08%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.4.



Gambar 4.4 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.4 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

No.	Tujuan	Belum Mencapai target	Persentase (%)
TPB1	Tanpa Kemiskinan	9	23,1
TPB2	Tanpa Kelaparan	3	7,7
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	5	12,8
TPB4	Pendidikan Berkualitas	10	25,6
TPB5	Kesetaraan Gender	1	2,6
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	10,3
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0,0
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0	0,0
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	2,6
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	0	0,0
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	2	5,1
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	0	0,0
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	0	0,0
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	0	0,0
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	0	0,0
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	4	10,3
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0	0,0
	Total	39	100,00

Gambar 4.4 dan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan Pendidikan Berkualitas sebanyak 10 indikator

(25,60%), kemudian tujuannya Tanpa Kemiskinan sebanyak 9 indikator (23,1%). Indikator TPB yang belum mencapai target ditunjukkan pada Tabel 4.5.

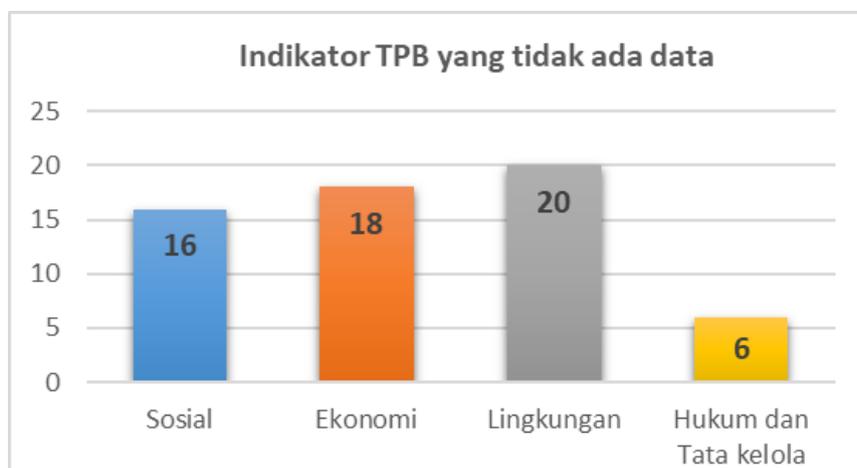
Tabel 4.5 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
PILAR SOSIAL	
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
TPB 2. Tanpa Kelaparan	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
TPB 3. Kehidupan Sehat dan sejahtera	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
TPB 5. Kesetaraan Gender	
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
PILAR EKONOMI	
TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
PILAR LINGKUNGAN	
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	
TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

4.3. Indikator TPB yang Tidak Ada Data

Gambaran indikator TPB yang tidak ada data seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.5, dimana pilar sosial 16 indikator, ekonomi 18 indikator, lingkungan 20 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 6 indikator.



Gambar 4.5 Jumlah indikator TPB yang tidak ada data

Indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 60 indikator (32,43%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.6 dan Tabel 4.6.



Gambar 4.6 Indikator TPB yang Tidak Ada Data Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.6 Indikator TPB yang Tidak Ada Data

No.	Tujuan	Tidak Ada Data	Persentase (%)
TPB1	Tanpa Kemiskinan	2	3,3
TPB2	Tanpa Kelaparan	1	1,7
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	21,7
TPB4	Pendidikan Berkualitas	0	0,0
TPB5	Kesetaraan Gender	0	0,0
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	9	15,0
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0,0
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	5,0
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	6,7
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	0	0,0
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	6,7
TPB12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	4	6,7
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	0	0,0
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	0	0,0
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	3	5,0
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	6	10,0
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	11	18,3
	Total	60	100,00

Gambar 4.6 dan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan Kesetaraan Gender sebanyak 13 indikator (21,70%), kemudian tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan sebanyak 11 indikator (18,30%). Indikator TPB yang tidak ada data ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Indikator TPB Kabupaten Tanah Bumbu yang Tidak Ada Data

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
PILAR SOSIAL	
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
TPB 2. Tanpa Kelaparan	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi puskesmas dengan eliminasi Kusta
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
PILAR EKONOMI	
TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet
TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik

NO. INDIKATOR	INDIKATOR
	melalui website
PILAR LINGKUNGAN	
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
6.3.2.(a)	Kualitas air danau
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan
TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan	
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
TPB 15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	
TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

4.4. Indikator TPB yang Tidak Ada Di Wilayah Kajian

Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian pada masing-masing pilar, yaitu: pilar sosial 0 indikator, ekonomi 0 indikator, lingkungan 0 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 0 indikator. Hal ini disebabkan karena pada tahapan awal analisis indikator TPB yang akan dikaji, telah dipilih berdasarkan indikator yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V
ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan: (1) kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD, (2) analisis capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD dan (3) isu strategis dari setiap SKPD. Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD, berfokus kepada jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan SKPD. Dari jumlah indikator tersebut, diidentifikasi jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (PERPRES 59/2017), jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, jumlah indikator yang tidak ada data, dan jumlah indikator yang tidak ada di wilayah kajian. Hasil dari kondisi capaian menjadi bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing SKPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD.

Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan SKPD berdasarkan kategori pencapaian di Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada Tabel 5.1, sedangkan rincian capaian indikator TPB Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada Lampiran.

Tabel 5.1 Pencapaian TPB Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan SKPD

No.	SKPD	Mencapai target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	1	1	0	2
2	Sekretariat Daerah	2	0	5	0	7
3	BPBD	12	2	0	0	14
4	BPDASHL Barito	0	0	1	0	1
5	BPS Tanbu	14	9	7	0	30
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	0	0	2
7	Dinas Kesehatan	18	4	13	0	35
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	1	4	0	8
9	Dinas PUPR	5	3	12	0	20
10	Kepolisian RI Resort Tanbu	1	2	3	0	6
11	Dinas Sosial	2	1	2	0	5
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	3	0	0	7
13	Dinas Ketahanan Pangan	0	3	0	0	3
14	Dinas Lingkungan Hidup	4	1	4	0	9
15	Dinas Perhubungan	2	0	1	0	3
16	Bappeda	0	0	3	0	3
17	Dinas Perikanan	3	0	0	0	3
18	BPJS Kesehatan	0	1	0	0	1
19	BPJS Ketenaga kerjaan/ BPS	0	1	0	0	1
20	Dinas KBP3A	6	3	0	0	9
21	KPU / BKD	1	0	0	0	1
22	BKBP3A	0	1	0	0	1
23	Dinas Perdagangan dan	1	0	1	0	2

No.	SKPD	Mencapai target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
	perindustrian					
24	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	3	1	3	0	7
25	Dinas Perkimtan	1	0	0	0	1
26	Inspektorat/ BPS	0	1	0	0	1
27	BPK	2	0	0	0	2
28	BKD	1	0	0	0	1
	Total	86	39	60	0	185

Capaian indikator TPB oleh SKPD di Kabupaten Tanah Bumbu dibagi berdasarkan beberapa kategori yaitu:

5.1. SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Sudah Mencapai Target Nasional

Tabel 5.2 menunjukkan indikator TPB yang telah mencapai target nasional berdasarkan tiap SKPD. Gambar 5.1 Menunjukkan grafik indikator TPB yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 5.1 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Tabel 5.2 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

No.	SKPD	Mencapai target	Persentase (%)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0,00
2	Sekretariat Daerah	2	2,33
3	BPBD	12	13,95
4	BPDASHL Barito	0	0,00
5	BPS Tanbu	14	16,28
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1,16

No.	SKPD	Mencapai target	Persentase (%)
7	Dinas Kesehatan	18	20,93
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3,49
9	Dinas PUPR	5	5,81
10	Kepolisian RI Resort Tanbu	1	1,16
11	Dinas Sosial	2	2,33
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	4,65
13	Dinas Ketahanan Pangan	0	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	4	4,65
15	Dinas Perhubungan	2	2,33
16	Bappeda	0	0,00
17	Dinas Perikanan	3	3,49
18	BPJS Kesehatan	0	0,00
19	BPJS Ketenaga kerjaan/ BPS	0	0,00
20	Dinas KBP3A	6	6,98
21	KPU / BKD	1	1,16
22	BKBP3A	0	0,00
23	Dinas Perdagangan dan perindustrian	1	1,16
24	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	3	3,49
25	Dinas Perkimtan	1	1,16
26	Inspektorat/ BPS	0	0,00
27	BPK	2	2,33
28	BKD	1	1,16
	Total	86	100,00

Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan telah mencapai target pada Setiap SKPD secara rinci sebagai berikut:

1. Bagian Organisasi SETDA
 - a. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
 - b. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
2. BKD

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. BPBD
 - a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
 - b. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
 - c. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
 - d. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
 - e. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
 - f. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang
 - g. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
 - h. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta

- kebencanaan
- i. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
4. BPK RI
 - a. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - b. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
 5. BPS Kab. Tanah Bumbu
 - a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
 - b. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
 - c. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
 - d. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
 - e. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
 - f. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
 - g. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)
 - h. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
 - i. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
 - j. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
 - k. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
 - l. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
 - m. Unmet need pelayanan kesehatan
 6. Dinas KBP3A
 - a. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
 - b. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - c. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
 - d. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - e. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
 - f. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern

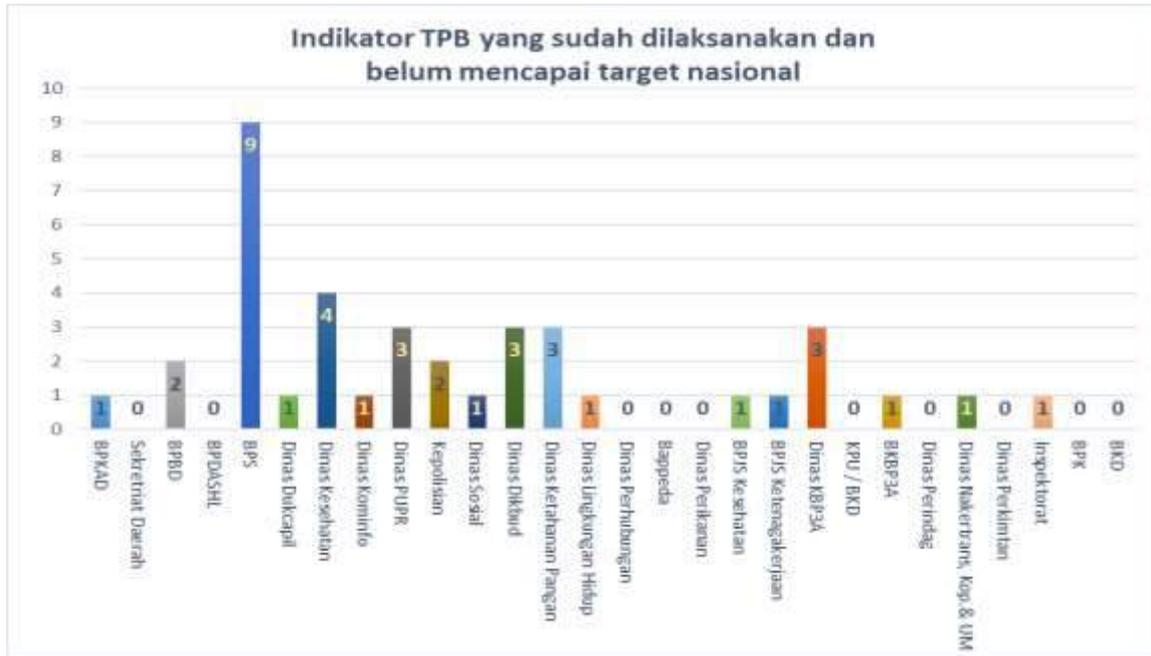
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
8. Dinas Kesehatan
 - a. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - c. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - d. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
 - e. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk
 - f. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
 - g. Kejadian Malaria per 1000 orang
 - h. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
 - i. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
 - j. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
 - k. Prevalensi anemia pada ibu hamil
 - l. Prevalensi HIV pada populasi dewasa
 - m. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
 - n. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
 - o. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
 - p. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
 - q. Prevalensi tekanan darah tinggi
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
 - b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
10. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang
 - b. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
 - c. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
 - d. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
 - b. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
 - c. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)

- fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
- d. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
12. Dinas Perdagangan dan perindustrian
Intensitas energi primer
 13. Dinas Perhubungan
 - a. Jumlah dermaga penyeberangan
 - b. Jumlah pelabuhan strategis
 14. Dinas Perikanan
 - a. Jumlah nelayan yang terlindungi
 - b. (bantuan premi asuransi nelayan (BPAN); asuransi nelayan mandiri; kartu kusuka)
 - c. Jumlah desa/kelurahan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
 - d. Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.
 15. Dinas Perkimtan
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
 16. Dinas PUPR
 - a. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - b. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
 - c. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
 - d. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
 - e. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
 17. Dinas Sosial
 - a. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
 - b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
 18. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi UKM
 - a. Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa
 - b. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
 - c. Upah rata-rata per jam pekerja
 19. Kepolisian RI Resort Tanah Bumbu
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
 20. KPU / BKD
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,

parlemen daerah dan pemerintah daerah.

5.2. SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB yang belum mencapai target tiap SKPD ditunjukkan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Tabel 5.3 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

No.	SKPD	Belum mencapai target	Persentase (%)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	2,56
2	Sekretariat Daerah	0	0,00
3	BPBD	2	5,13
4	BPDASHL Barito	0	0,00
5	BPS Tanbu	9	23,08
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2,56
7	Dinas Kesehatan	4	10,26
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2,56
9	Dinas PUPR	3	7,69
10	Kepolisian RI Resort Tanbu	2	5,13
11	Dinas Sosial	1	2,56
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	7,69
13	Dinas Ketahanan Pangan	3	7,69
14	Dinas Lingkungan Hidup	1	2,56
15	Dinas Perhubungan	0	0,00
16	Bappeda	0	0,00
17	Dinas Perikanan	0	0,00
18	BPJS Kesehatan	1	2,56
19	BPJS Ketenagakerjaan/ BPS	1	2,56
20	Dinas KBP3A	3	7,69

No.	SKPD	Belum mencapai target	Persentase (%)
21	KPU / BKD	0	0,00
22	BKBP3A	1	2,56
23	Dinas Perdagangan dan perindustrian	0	0,00
24	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	1	2,56
25	Dinas Perkimtan	0	0,00
26	Inspektorat/ BPS	1	2,56
27	BPK RI	0	0,00
28	BKD	0	0,00
	Total	39	100,00

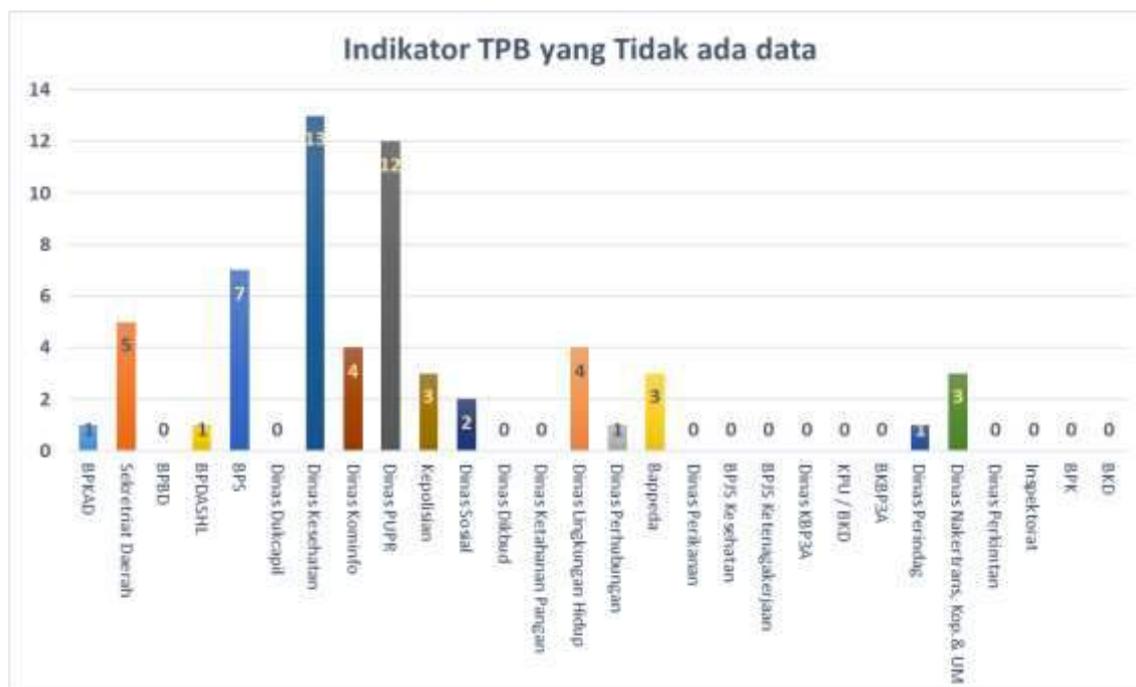
Indikator TPB pada Setiap SKPD yang Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target lebih adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
2. BPBD
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
3. BPJS Kesehatan
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
4. BPJS Ketenaga kerjaan/ BPS
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
5. BPS Kab. Tanah Bumbu
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
 - d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
 - f. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
 - g. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
 - h. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
6. Dinas KBP3A
 - a. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
 - b. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
 - c. Total Fertility Rate (TFR)
 - d. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
8. Dinas Kesehatan
 - a. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - b. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total

- Berbasis Masyarakat (STBM)
- c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
 - d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
9. Dinas Ketahanan Pangan
 - a. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
 - b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
 - c. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 11. Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah perkotaan yang tertangani
 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
 - c. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
 13. Dinas PUPR
 - a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
 - c. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
 14. Dinas Sosial
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
 15. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi UKM
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
 16. Inspektur/ BPS Tanbu
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
 17. Kepolisian RI Resort Tanah Bumbu
 - a. Prevalensi penyalahgunaan narkoba
 - b. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

5.3. SKPD dengan Indikator TPB Tidak Ada Data

Indikator TPB yang tidak ada data pada tiap SKPD ditunjukkan pada Tabel 5.4 dan Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Indikator TPB yang tidak ada data Tiap SKPD

Tabel 5.4 Indikator TPB yang tidak ada data pada tiap SKPD

No.	SKPD	Tidak ada data	Persentase (%)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	1,67
2	Sekretariat Daerah	5	8,33
3	BPBD	0	0,00
4	BPDASHL Barito	1	1,67
5	BPS Tanbu	7	11,67
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0,00
7	Dinas Kesehatan	13	21,67
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	6,67
9	Dinas PUPR	12	20,00
10	Kepolisian RI Resort Tanbu	3	5,00
11	Dinas Sosial	2	3,33
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	0	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	4	6,67
15	Dinas Perhubungan	1	1,67
16	Bappeda	3	5,00
17	Dinas Perikanan	0	0,00
18	BPJS Kesehatan	0	0,00
19	BPJS Ketenagakerjaan/ BPS	0	0,00
20	Dinas KBP3A	0	0,00
21	KPU / BKD	0	0,00
22	BKBP3A	0	0,00
23	Dinas Perdagangan dan perindustrian	1	1,67
24	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	3	5,00
25	Dinas Perkimtan	0	0,00
26	Inspektorat/ BPS	0	0,00
27	BPK RI	0	0,00
28	BKD	0	0,00
	Total	60	100,00

Indikator TPB yang tidak ada data pada Setiap SKPD adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
2. Bagian Hukum SETDA
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
3. Bagian Organisasi SETDA
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
4. Bagian Layanan Pengadaan, Setda
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
5. Bagian Pemerintahan, Setda
 - a. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
 - b. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
6. Bappeda
 - a. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
 - b. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
 - c. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya
7. BPDASHL Barito
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
8. BPS Kab. Tanah Bumbu
 - a. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
 - b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
 - c. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
 - d. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
 - e. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
 - f. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
 - g. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
9. Dinas Kesehatan
 - a. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
 - b. Jumlah kabupaten/kota puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)

- c. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
 - d. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
 - e. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
 - f. Jumlah provinsi puskesmas dengan eliminasi Kusta
 - g. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
 - h. Persentase kabupaten/kota puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
 - i. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun
 - j. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
 - k. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
 - l. Proporsi kematian akibat keracunan
 - m. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. Proporsi individu yang menggunakan internet
 - c. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
 - d. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan
11. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
 - b. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
 - c. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
 - d. Kualitas air danau
12. Dinas Perdagangan dan perindustrian
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
13. Dinas Perhubungan
Panjang jalur kereta api
14. Dinas PUPR
- a. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
 - b. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
 - c. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
 - d. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
 - e. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan
 - f. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
 - g. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 - h. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- i. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
 - j. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
 - k. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air
 - l. Panjang pembangunan jalan tol
15. Dinas Sosial
- a. Pendampingan psikososial korban bencana sosial
 - b. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
16. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi UKM
- a. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
 - b. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
 - c. Tingkat setengah pengangguran
17. Kepolisian RI Resort Tanah Bumbu
- a. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
 - b. Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk
 - c. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.

5.4. PD dengan Indikator TPB Tidak ada di Wilayah Kajian

Indikator TPB yang dikaji dalam KLHS RPJMD di Kabupaten Tanah Bumbu tidak terdapat kategori yang tidak ada di wilayah kajian. Hal ini disebabkan karena pada awal analisis telah dipilih indikator yang akan dikaji lebih jauh adalah indikator terkait dengan kondisi dan kewenangan di Kabupaten tanah Bumbu.

BAB VI
ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI

6.1. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH

Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

6.1.1. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

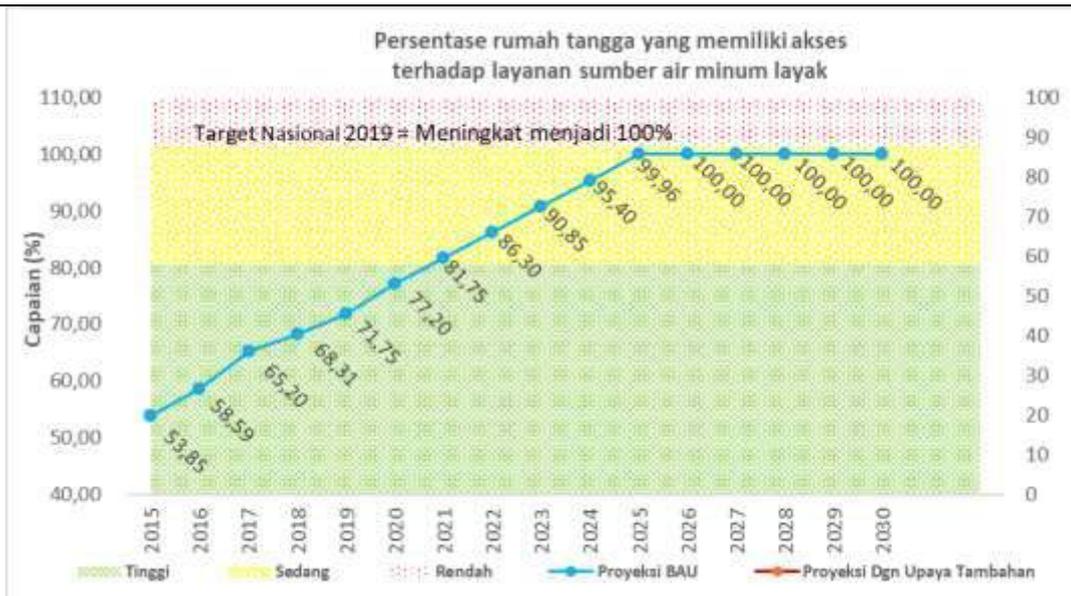
Nomor Indikator: 1.4.1.(d)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 58.990,12 Ha (12,12%), Sedang 146.859,04 Ha (30,18%), Tinggi 280.769,07 Ha (57,70%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sampai pada tahun 2019 adalah 71,75%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,00%. Capaian indikator ini sudah memenuhi target yaitu 100% sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	53,85	
2016	58,59	
2017	65,20	
2018	68,31	
2019	71,75	
Proyeksi		
2020	77,20	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi semua masyarakat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan cakupan pelayanan air minum.
- Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan.
- Pemeliharaan dan peningkatan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pengembangan Perumahan

d. Kegiatan:

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

- Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas PUPR
 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 - Bappeda
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - PDAM

6.1.2. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 1.4.1.(e)

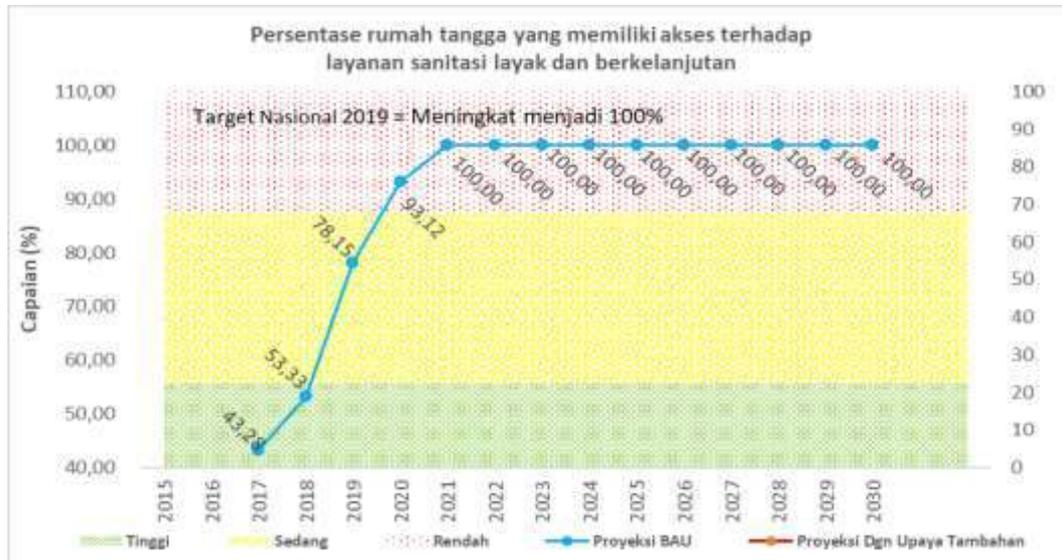
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah memiliki tingkat kategori Rendah 156.399,10 Ha (32,14%), Sedang 220.438,06 Ha (45,30%) dan Tinggi 109.781,07 Ha (22,56%). Secara umum jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah dalam kondisi sedang.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan sampai pada tahun 2019 adalah 78,15%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Capaian indikator ini telah memenuhi target yaitu 100% sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		43,28
2018		53,33
2019		78,15

Proyeksi		
2019	93,12	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, kawasan, dan komunal.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program pengembangan permukiman
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Administrasi Pemerintahan Desa

d. Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah

<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan - Dinas Kesehatan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas PUPR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--

6.1.3. Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

<p>Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</p> <p>Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p> <p>Nomor Indikator: 1.5.2.(a)</p> <p>Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pengendalian bencana. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pengendalian bencana memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah seluas 58.394,19 Ha (12,00%), Sedang 145.985,47 Ha (30,00%), Tinggi 282.238,57 Ha (58,00%). Secara umum jasa lingkungan pengaturan bencana dalam kondisi tinggi.</p> <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana sampai pada tahun 2019 adalah 58,04 Milyar. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sudah mencapai 105,06 dan dan tahun 2030 sebesar 143,11. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 19,20 dan tahun 2030 sebesar 0,00. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)</th> <th>Proyeksi dengan Upaya Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Baseline Data</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">13,56</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6,95</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2015	13,56		2016	6,95	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan										
Baseline Data												
2015	13,56											
2016	6,95											

2017	5,66	
2018	13,10	
2019	58,04	
Proyeksi		
2020	48,00	48,00
2026	105,06	19,20
2030	143,11	0,00



Isu Strategis: Bencana

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunkan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatnya upaya Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana oleh Semua Pihak yang terlibat

c. Outcome/Program:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengembangan Perumahan

d. Kegiatan:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Sosial

6.1.4. Indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

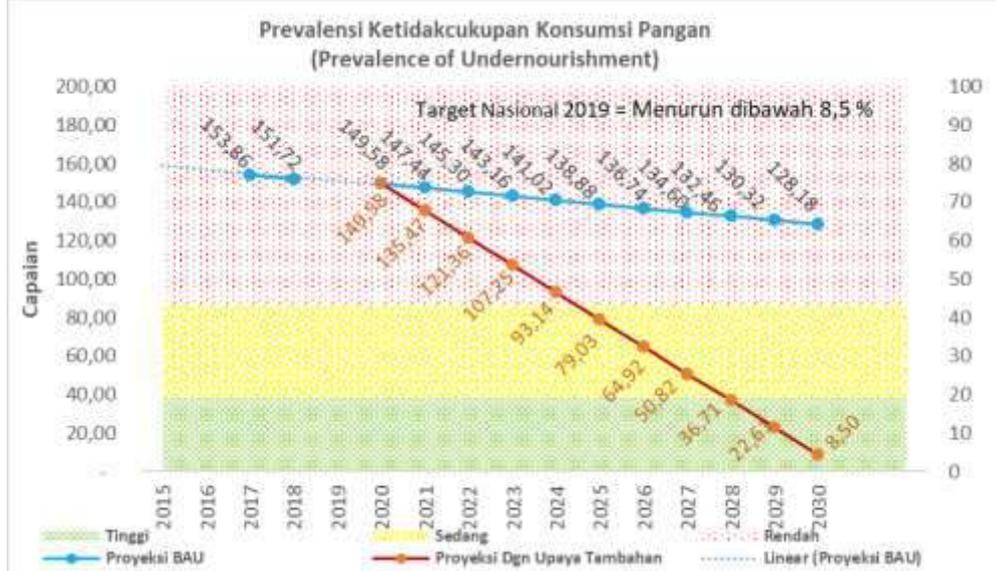
Nomor Indikator: 2.1.1*

Analisis DDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan pangan. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan pangan dengan kategori rendah seluas 138.093,60 Ha (28,24%), Sedang 222.299,40 Ha (45,46%), Tinggi 128.607,00 Ha (26,30%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan pangan dalam kondisi sedang.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) sampai pada tahun 2019 adalah 151,72. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun di bawah 8,5%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU (Bisnis Analysis Usually) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 136,74 dan tahun 2030 sebesar 128,18. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu menurun di bawah 8,5% sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 64,92% dan tahun 2030 sebesar 8,50%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		153,86
2018		151,72
2019		
Proyeksi		
2020	149,58	149,58
2026	136,74	64,92
2030	128,18	8,50



Isu Strategis: Kelaparan dan Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mendorong peningkatan produksi pangan

c. Outcome/Program:

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program penelitian dan pengembangan daerah
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program perizinan usaha pertanian
- Program penyuluhan pertanian
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

d. Kegiatan:

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota"
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)

<p>dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan - Bappeda - Dinas Pertanian - Dinas PUPR

6.1.5. Indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

<p>Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.</p>
<p>Target: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>
<p>Nomor Indikator: 2.1.2*</p>
<p>Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 2.1.1* pada point 6.1.5</p>

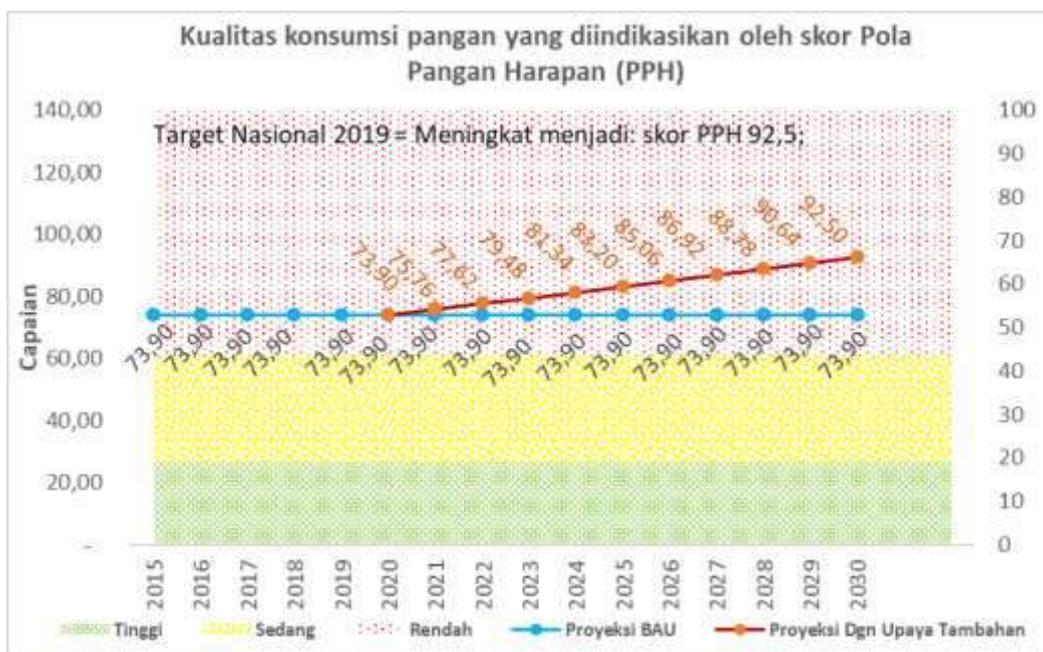
6.1.6. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

<p>Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</p>
<p>Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>
<p>Nomor Indikator: 2.2.2.(c)</p>
<p>Analisis DDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan pangan. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan pangan dengan kategori rendah seluas 138.093,60 Ha (28,24%), Sedang 222.299,40 Ha (45,46%), Tinggi 128.607,00 Ha (26,30%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan pangan dalam kondisi sedang.</p>
<p>Proyeksi Capaian Indikator TPB:</p>

Capaian indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan sampai pada tahun 2019 adalah 73,90. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 73,90 dan dan tahun 2030 sebesar 73,90. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 85,06 dan tahun 2030 sebesar 92,50. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	73,90	
2016	73,90	
2017	73,90	
2018	73,90	
2019	73,90	
Proyeksi		
2020	73,90	73,90
2026	73,90	85,06
2030	73,90	92,50

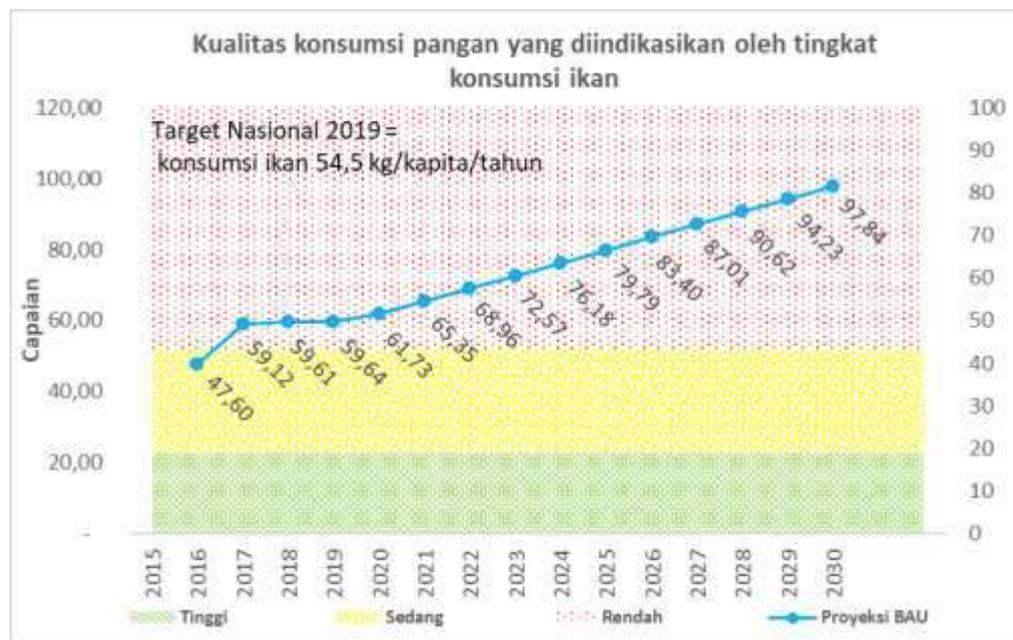
- **Pola Pangan harapan (PPH)**



- **Tingkat Konsumsi Ikan**

Tahun	Proyeksi Tanpa	Proyeksi dengan
-------	----------------	-----------------

	Upaya Tambahan (BAU)	Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		47,60
2017		59,12
2018		59,61
2019		59,64
Proyeksi		
2020	61,73	61,73
2026	83,40	57,40
2030	97,84	54,50



Isu Strategis: Kelaparan dan Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mendorong peningkatan produksi pangan

c. Outcome/Program:

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan
- Program penelitian dan pengembangan daerah
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program perizinan usaha pertanian

- Program penyuluhan pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

d. Kegiatan:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pengawasan pangan segar daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- Pengelolaan SDG hewan/tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota"
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai

- dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Ketahanan Pangan
 - Bappeda
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perikanan

6.1.7. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Nomor Indikator: 6.1.1.(a)
Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(d) pada point 6.1.1

6.1.8. Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Nomor Indikator: 6.1.1.(c)
Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(d) pada point 6.1.1

6.1.9. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Nomor Indikator: 6.2.1.(b)

Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(e) pada point 6.1.2

6.1.10. Indikator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 6.2.1.(c)

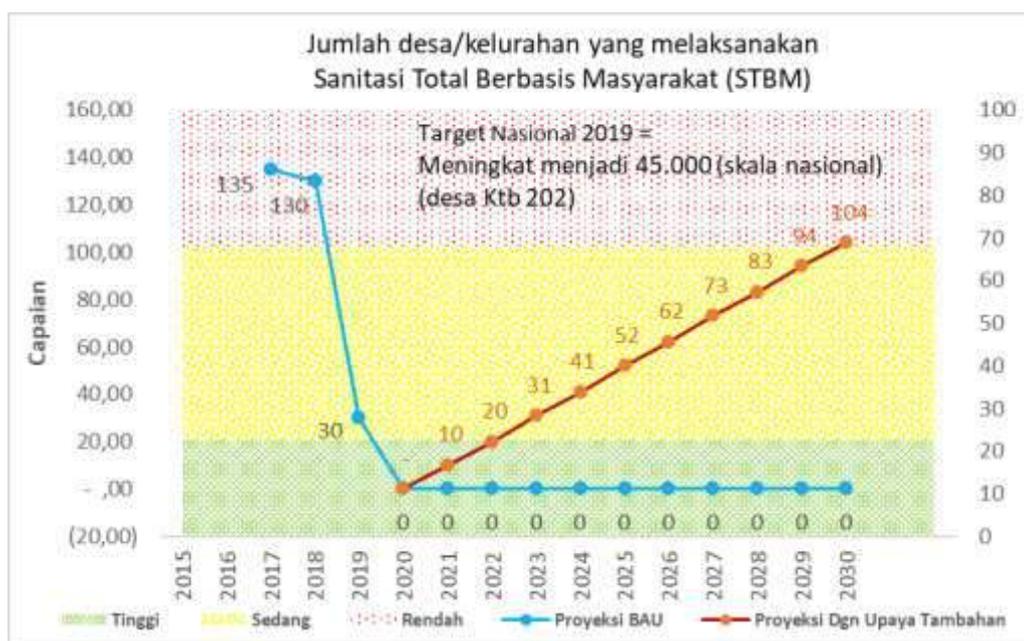
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah memiliki tingkat kategori Rendah 156.399,10 Ha (32,14%), Sedang 220.438,06 Ha (45,30%) dan Tinggi 109.781,07 Ha (22,56%). Secara umum jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah dalam kondisi sedang.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sampai pada tahun 2019 adalah 30. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2030 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu 100% sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 62 dan tahun 2030 sebesar 104. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		

2015		
2016		
2017		135
2018		130
2019		30
Proyeksi		
2020	0	0
2026	0	62
2030	0	104



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Program Pengembangan Permukiman
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- d. Kegiatan:
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Dinas PUPR

6.1.11. Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Nomor Indikator: 11.5.2.(a)

Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 1.5.2.(a) pada point 6.1.3.

6.1.12. Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Tujuan: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Nomor Indikator: 11.6.1.(a)

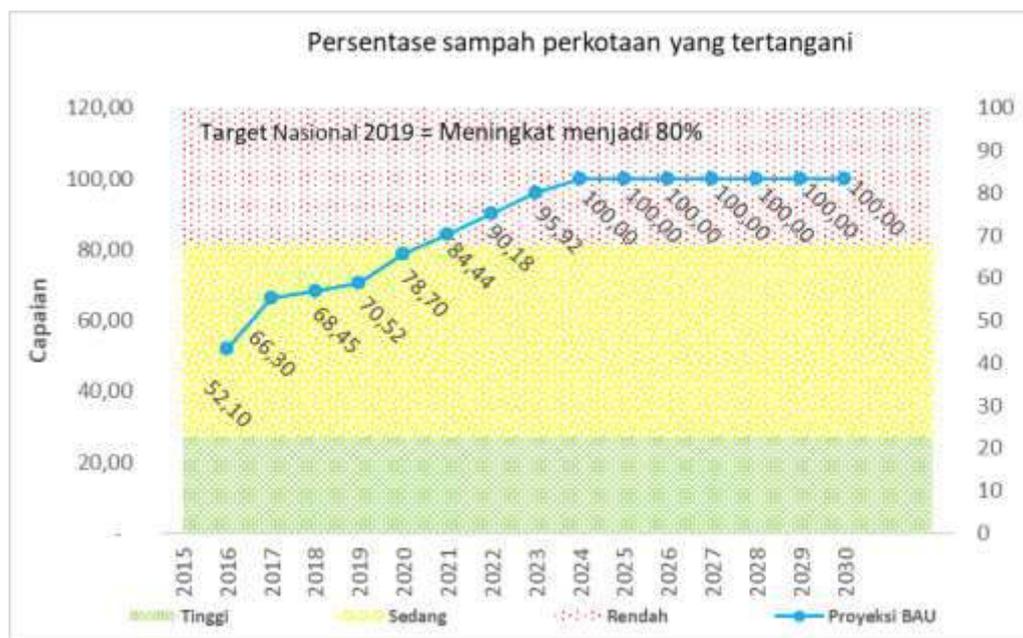
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah memiliki tingkat kategori Rendah 156.399,10 Ha (32,14%), Sedang 220.438,06 Ha (45,30%) dan Tinggi 109.781,07 Ha (22,56%). Secara umum jasa lingkungan pemurnian air dan pengelolaan limbah dalam kondisi sedang.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani sampai pada tahun 2019 adalah 70,52. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 80%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada

tahun 2024 sebesar 100%. Capaian indikator ini telah memenuhi target yaitu meningkat sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		52,10
2017		66,30
2018		68,45
2019		70,52
Proyeksi		
2020	78,70	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Persampahan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan persentase timbulan sampah yang tertangani.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Pengelolaan sampah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup

6.2. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH

Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang tidak terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

6.2.1. Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

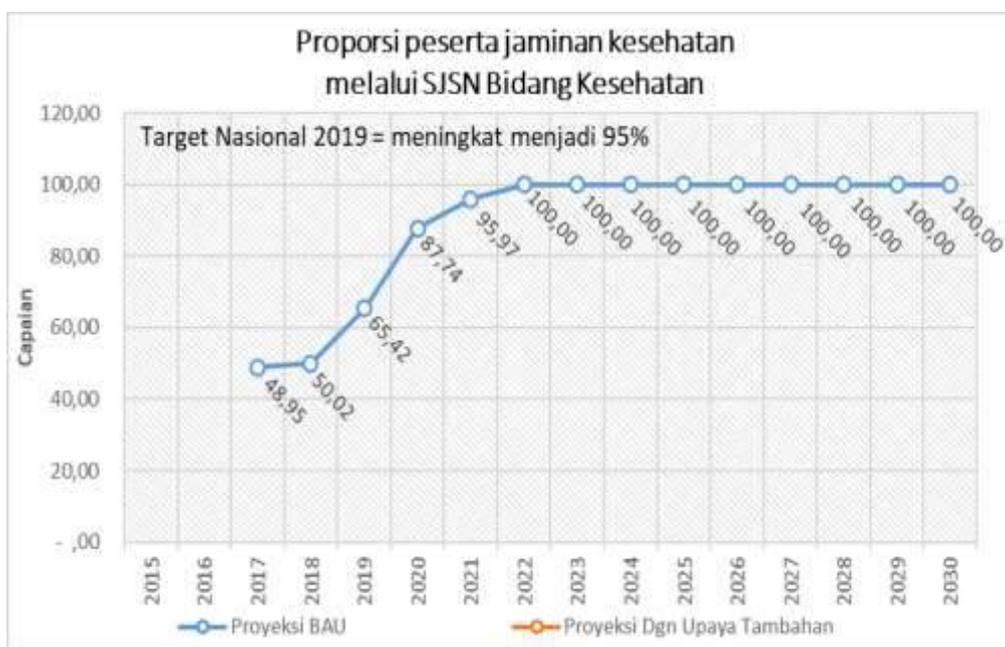
Nomor Indikator: 1.3.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai pada tahun 2019 adalah 65,42%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,00%. Capaian indikator ini dapat memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		48,95
2018		50,02

2019	65,42	
Proyeksi		
2020	87,74	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Kemiskinan dan kesehatan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- meningkatkan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan secara bertahap bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

c. Outcome/Program:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota e. Instansi pelaksana: - Dinas Kesehatan
--

6.2.2. Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

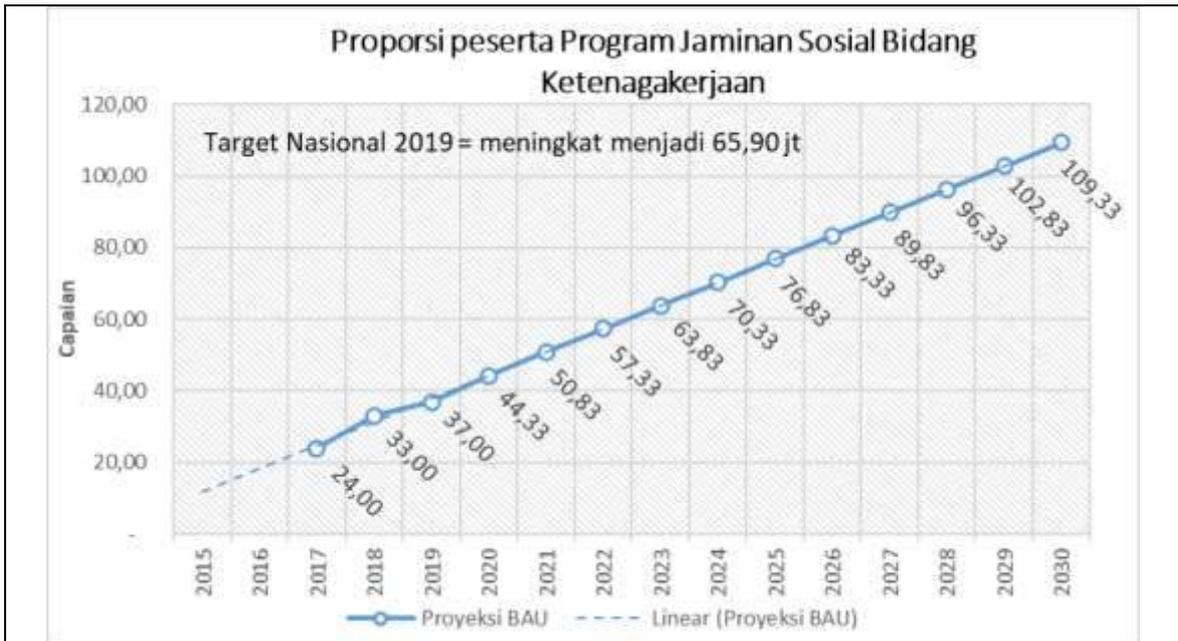
Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator: 1.3.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sampai pada tahun 2019 adalah 37,00. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 65,90. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 83,33 dan tahun 2030 sebesar 109,33 Capaian indikator ini telah memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		24,00
2018		33,00
2019		37,00
Proyeksi		
2020	44,33	
2026	83,33	
2030	109,33	



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- meningkatnya Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan

c. Outcome/Program:

- Program Hubungan Industrial

d. Kegiatan:

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi UKM

6.2.3. Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator: 1.3.1.(c)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase penyandang disabilitas yang miskin dan

rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas sampai pada tahun 2019 adalah 2,52%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 17,12. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 3,90% dan tahun 2030 sebesar 4,30%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 16,32% dan tahun 2030 sebesar 25,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	2,57	
2016	2,57	
2017	3,67	
2018	3,67	
2019	2,52	
Proyeksi		
2020	3,30	3,30
2026	3,90	16,32
2030	4,30	25,00



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
- c. Outcome/Program:
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial
- d. Kegiatan:
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza diluar panti sosial
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Sosial

6.2.4. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

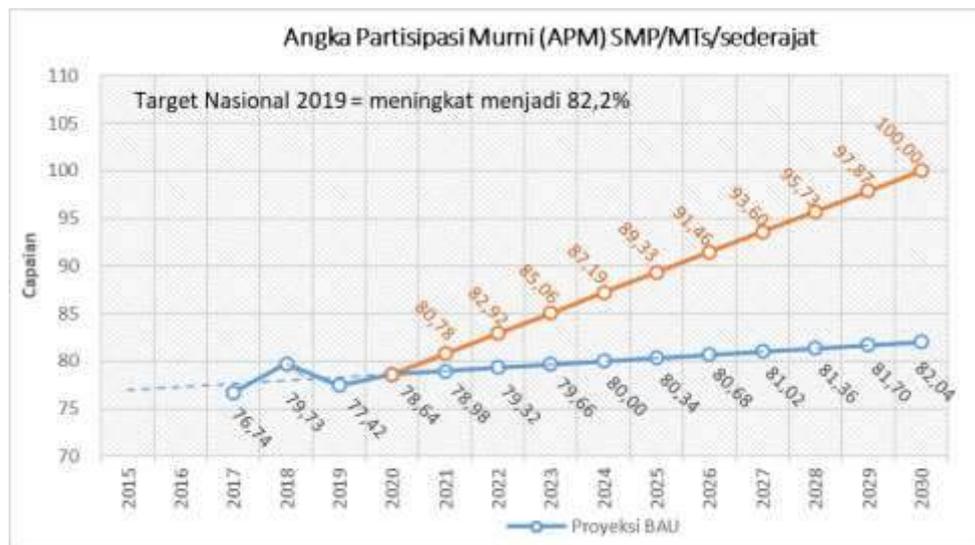
Nomor Indikator: 1.4.1.(h)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 77,42%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 sebesar 82,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 80,68% dan tahun 2030 sebesar 82,04%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 91,46 dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		76,74
2018		79,73
2019		77,42
Proyeksi		
2020	78,64	78,64
2026	80,68	91,46

2030	82,04	100,00
------	-------	--------



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan Kurikulum

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar
- Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan PAUD dan nonformal

e. Pelaksana Kegiatan:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.5. Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk

kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 1.4.1.(k)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN sampai pada tahun 2018 adalah 0,58%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,58% dan tahun 2030 sebesar 0,58%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 60,22% dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		
2018	0,58	
2019		
Proyeksi		
2020	0,58	0,58
2026	0,58	60,22
2030	0,58	100,00



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Pemberian subsidi untuk biaya penerangan dan
- c. Outcome/Program:
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
 - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 - Bappeda

6.2.6. Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 1.a.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah sampai pada tahun 2019 adalah 11,68%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 12,72% dan tahun 2030 sebesar 12,40%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu 100% sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 29,28% dan tahun 2030 sebesar 40,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	12,50	
2016	13,65	

2017	14,86	
2018	14,49	
2019	11,68	
Proyeksi		
2020	13,20	13,20
2026	12,72	29,28
2030	12,40	40,00



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya anggaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
- Meningkatkan sarana prasarana Kesehatan
- Meningkatkan kegiatan perlindungan sosial

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan usia dini
- Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
- Penerbitan ijin Rumah Sakit kelas C dan D fasilitas layanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota
- Pemberian izin praktek tenaga kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM manusia diwilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas satu tertentu perusahaan rumah tangga
- Penerbitan sertifikat produksi pangan industri pangan rumah tangga dan nomor PIRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
- Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
- Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
- Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga
- Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya

- masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Sosial
 - Dinas Kesehatan

6.2.7. Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

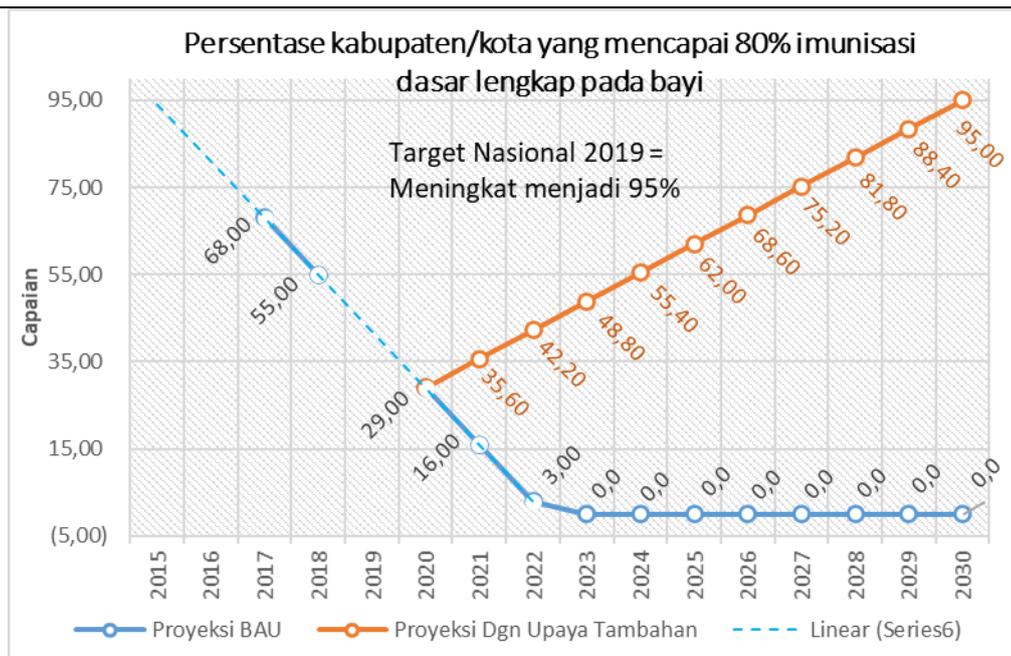
Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Nomor Indikator: 3.2.2.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:
 Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai pada tahun 2018 adalah 55,00%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 95%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,00% dan tahun 2030 sebesar 0,00%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 68,60% dan tahun 2030 sebesar 95,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		68,00
2018		55,00
2019		
Proyeksi		
2020	29,00	29,00
2026	0,0	68,60
2030	0,0	95,00



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap khususnya untuk pasangan baru menikah

c. Outcome/Program:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Bappeda

6.2.8. Indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat,

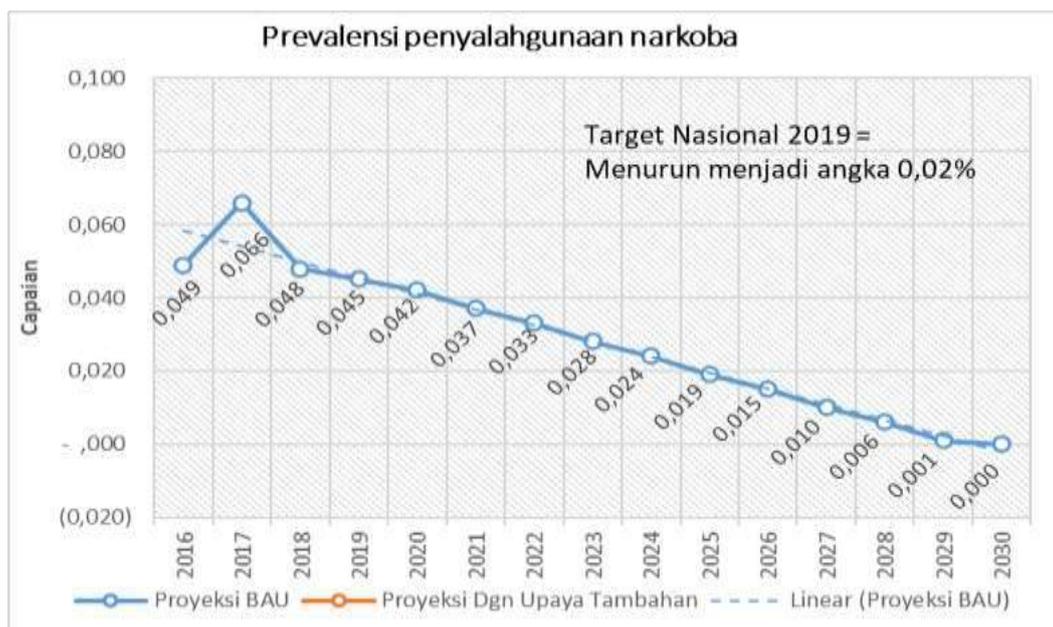
termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Nomor Indikator: 3.5.1.(e)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator prevalensi penyalahgunaan narkoba sampai pada tahun 2019 adalah 0,045. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun menjadi 0,02%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,015 dan tahun 2030 sebesar 0,00. Capaian indikator ini dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	0,067	
2016	0,049	
2017	0,066	
2018	0,048	
2019	0,045	
Proyeksi		
2020	0,042	
2026	0,015	
2030	0,000	



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba
 - Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat
 - Melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan merata
 - Penegakan hukum bagi pengedar narkoba
- c. Outcome/Program:
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- d. Kegiatan:
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, kewirausahaan muda pemula dan pemuda kader Kabupaten/Kota
- e. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan
 - Bappeda

6.2.9. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

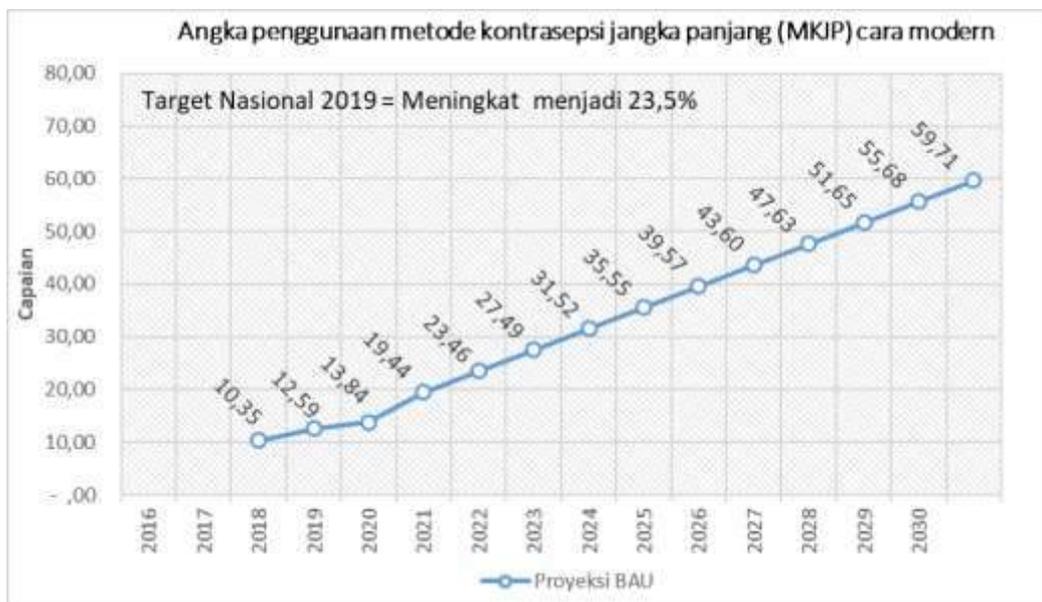
Target: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Nomor Indikator: 3.7.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sampai pada tahun 2019 adalah 13,84. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 43,60 dan tahun 2030 sebesar 59,71. Capaian indikator ini dapat memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		10,35
2018		12,59
2019		13,84
Proyeksi		
2020	19,44	
2026	43,60	
2030	59,71	



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pemberian informasi kepada masyarakat tentang MKJP cara modern

c. Outcome/Program:

- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

d. Kegiatan:

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah

<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB) - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah Kabupaten/Kota <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas KBP3A
--

6.2.10. Indikator Total Fertility Rate (TFR)

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

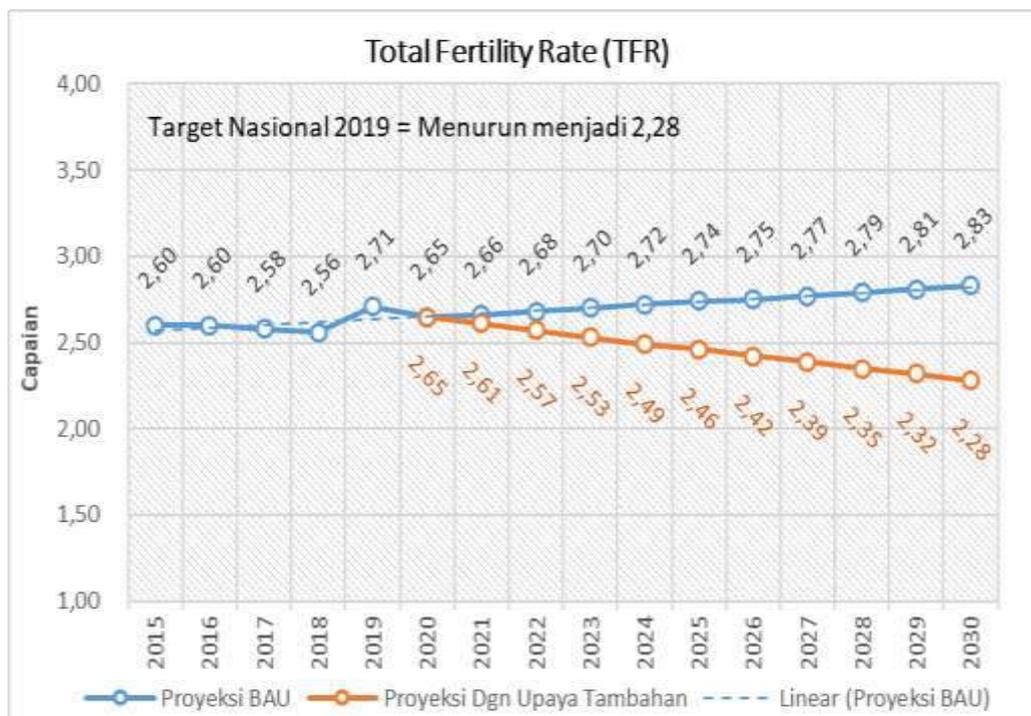
Target: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Nomor Indikator: 3.7.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:
 Capaian indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sampai pada tahun 2019 adalah 2,71. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 2,75 dan tahun 2030 sebesar 2,83. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 2,42 dan tahun 2030 sebesar 2,28. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
-------	-------------------------------------	--------------------------------

Baseline Data		
2015	2,60	
2016	2,60	
2017	2,58	
2018	2,56	
2019	2,71	
Proyeksi		
2020	2,65	2,65
2026	2,75	2,42
2030	2,83	2,28



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pemberian informasi kepada masyarakat tentang penundaan kehamilan pada perempuan umur 15-19 tahun

c. Outcome/Program:

- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

d. Kegiatan:

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Dinas KBP3A

6.2.11. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Nomor Indikator: 3.8.2.(a)

Rekomendasi:

Indikator 3.8.2.(a) sama dengan indikator 1.3.1.(a) pada point 6.2.1.

6.2.12. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

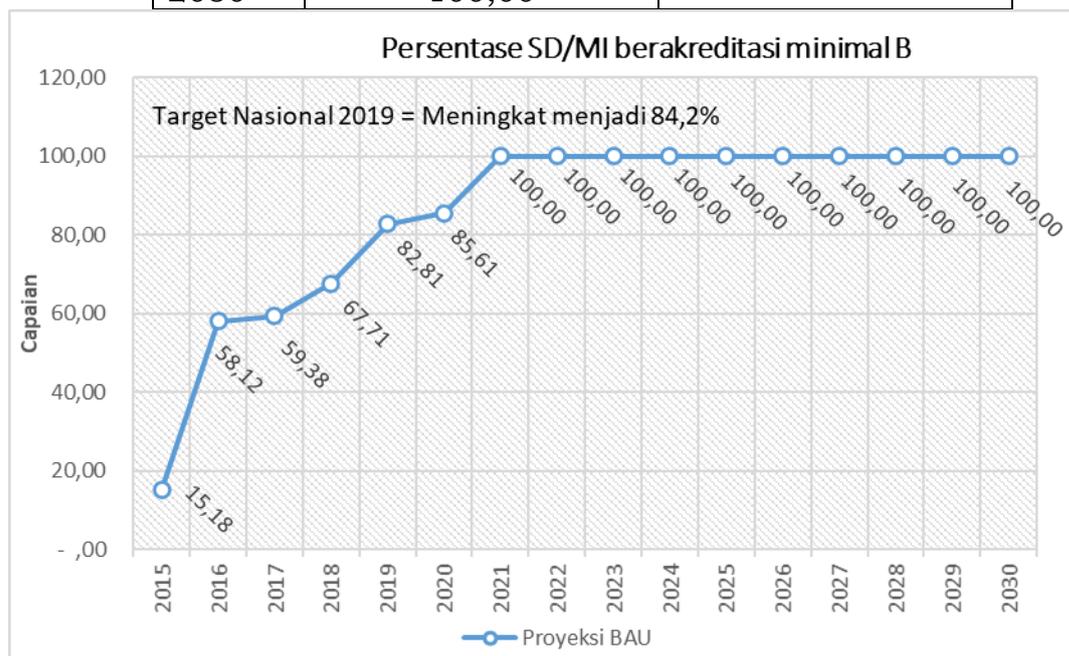
Nomor Indikator: 4.1.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase SD/MI berakreditasi minimal B sampai pada tahun 2019 adalah 82,81%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu

meningkat menjadi 84,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100%. Capaian indikator ini sudah memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	15,18	
2016	58,12	
2017	59,38	
2018	67,71	
2019	82,81	
Proyeksi		
2020	85,61	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan

- Program pengembangan kurikulum
- d. Kegiatan:
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.13. Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

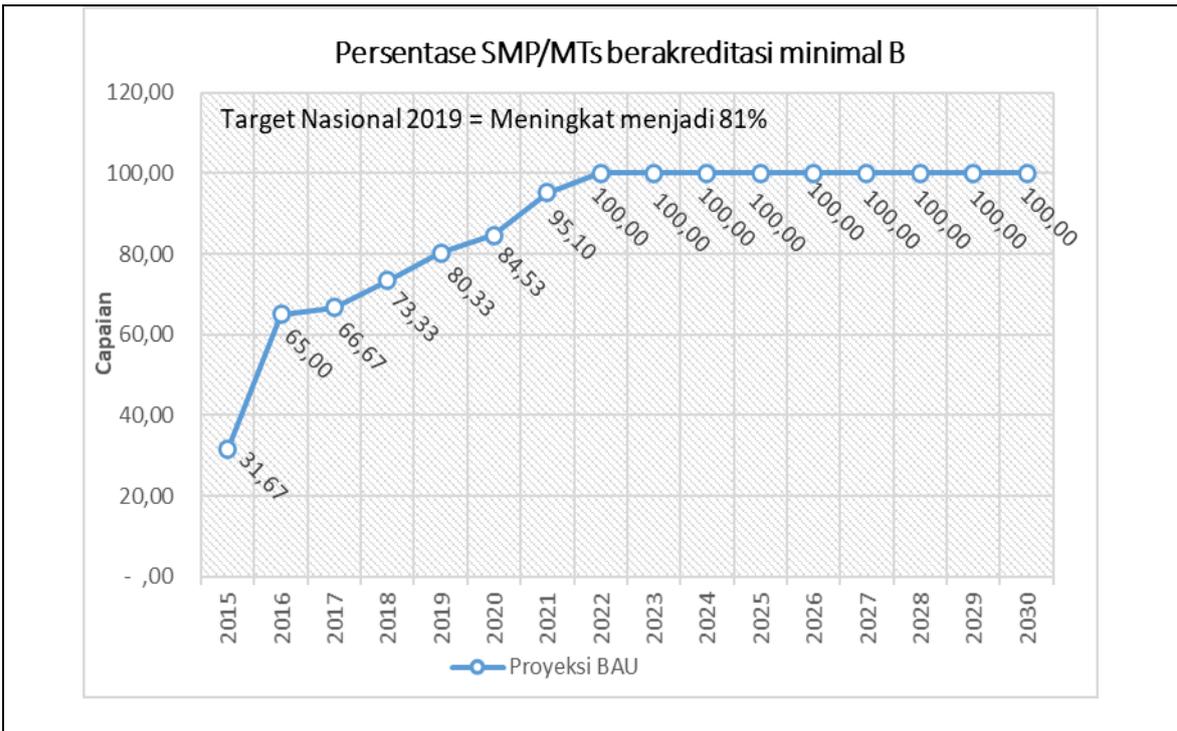
Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B sampai pada tahun 2019 adalah 80,33%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 81%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,00%. Capaian indikator ini dapat memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	31,67	
2016	65,00	
2017	66,67	
2018	73,33	
2019	80,33	
Proyeksi		
2020	84,53	
2026	100,00	
2030	100,00	



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
- d. Kegiatan:
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.14. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

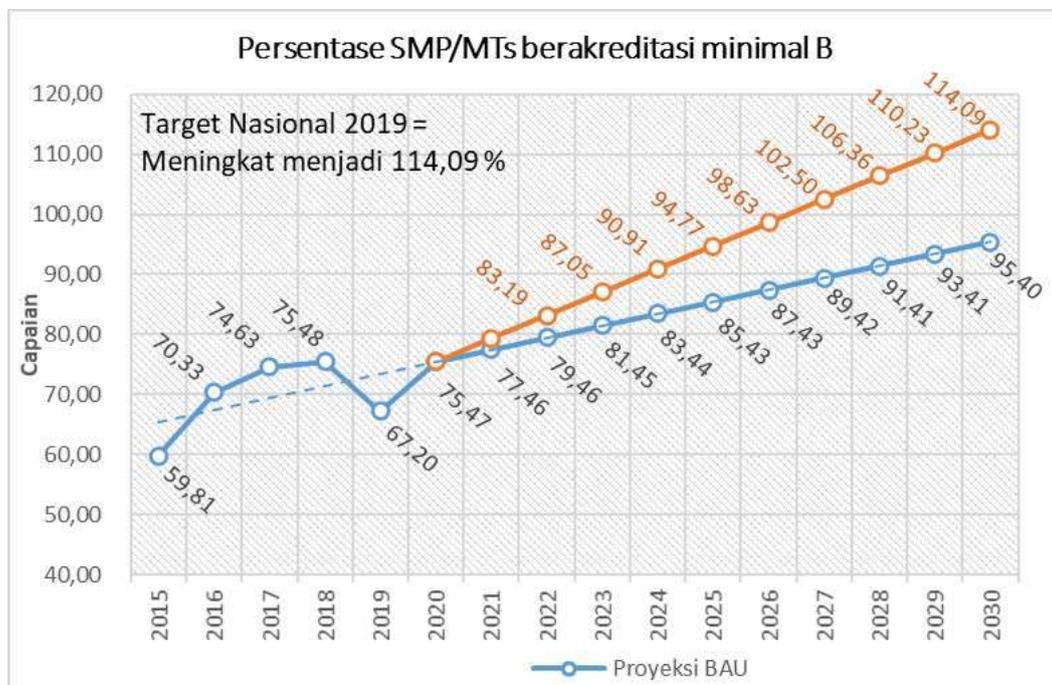
Nomor Indikator: 4.1.1.(d)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 67,20%. Capaian ini belum mencapai

target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 114,09%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 87,43% dan tahun 2030 sebesar 95,40%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 98,63% dan tahun 2030 sebesar 114,09%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	59,81	
2016	70,33	
2017	74,63	
2018	75,48	
2019	67,20	
Proyeksi		
2020	75,47	75,47
2026	87,43	98,63
2030	95,40	114,09



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program pengembangan kurikulum
- d. Kegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan PAUD dan nonformal
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.15.Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

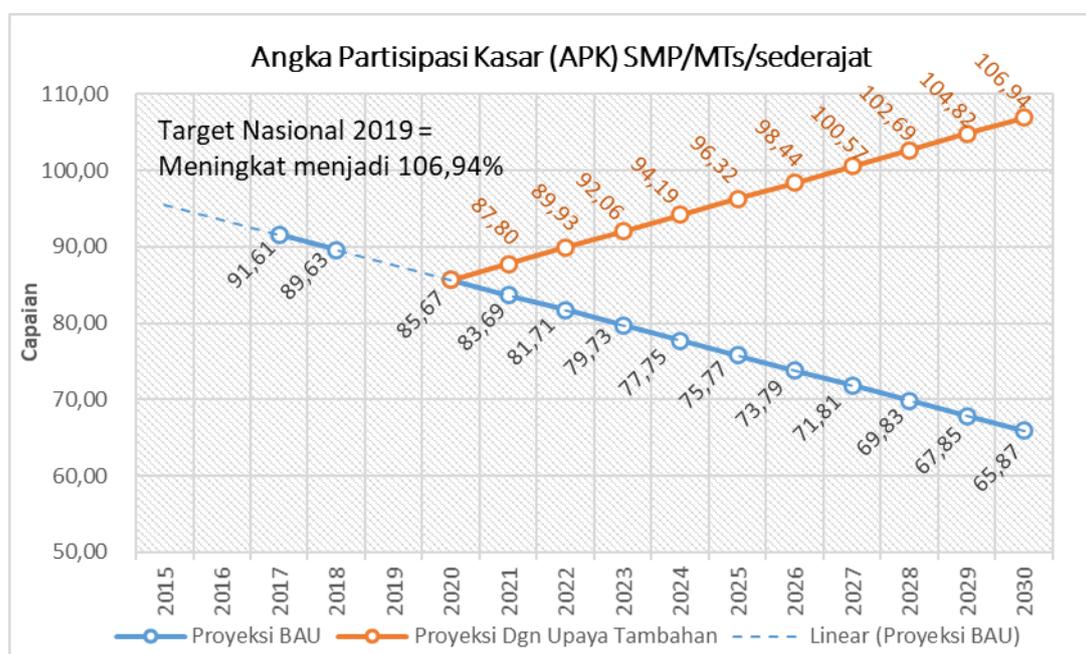
Nomor Indikator: 4.1.1.(e)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat sampai pada tahun 2018 adalah 89,63%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 106,94%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 73,79% dan tahun 2030 sebesar 65,87%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 98,44% dan tahun 2030 sebesar 106,94%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		91,61
2018		89,63
2019		
Proyeksi		
2020	85,67	85,67

2026	73,79	98,44
2030	65,87	106,94



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
- d. Kegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan PAUD dan nonformal
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.16. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian

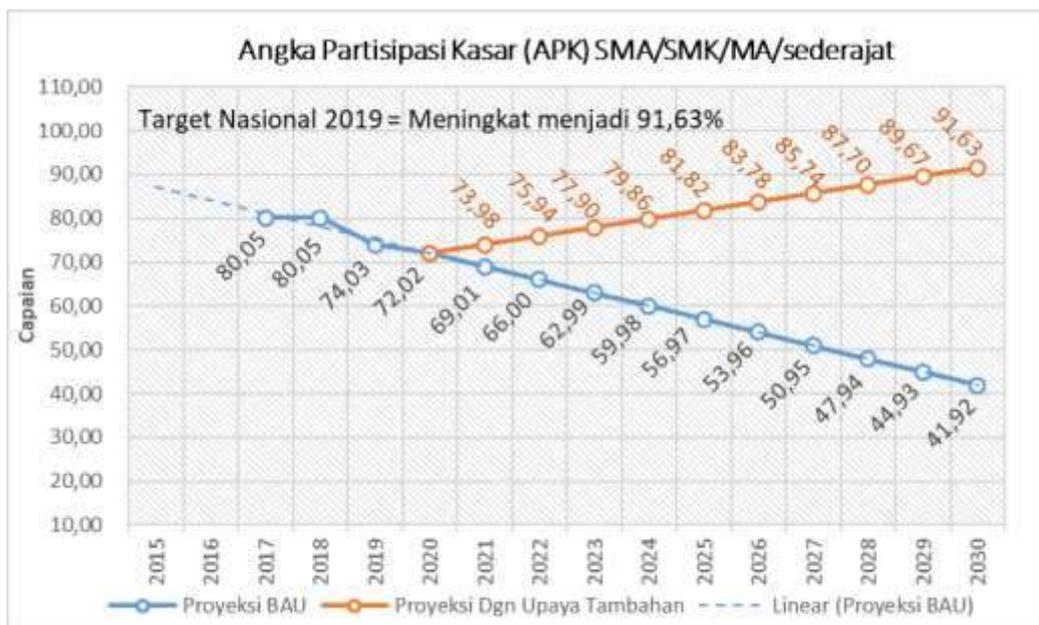
pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(f)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 74,03%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 91,63%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 53,96% dan tahun 2030 sebesar 41,92. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 83,78% dan tahun 2030 sebesar 91,63%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		80,05
2018		80,05
2019		74,03
Proyeksi		
2020	72,02	72,02
2026	53,96	83,78
2030	41,92	91,63



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
- d. Kegiatan:
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.17.Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(g)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sampai pada tahun 2019 adalah 7,71. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 8,8 tahun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 7,75 tahun dan tahun 2030 sebesar 7,77 tahun. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 8,38 tahun dan tahun 2030 sebesar 8,80 tahun. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		7,70
2018		7,70
2019		7,71
Proyeksi		

2020	7,72	7,72
2026	7,75	8,38
2030	7,77	8,80



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- Sasaran:
 - Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
- Strategi dan arah kebijakan:
 - Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu/miskin.
- Outcome/Program:
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
- Kegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar
 - Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan PAUD dan nonformal
- Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.18. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan

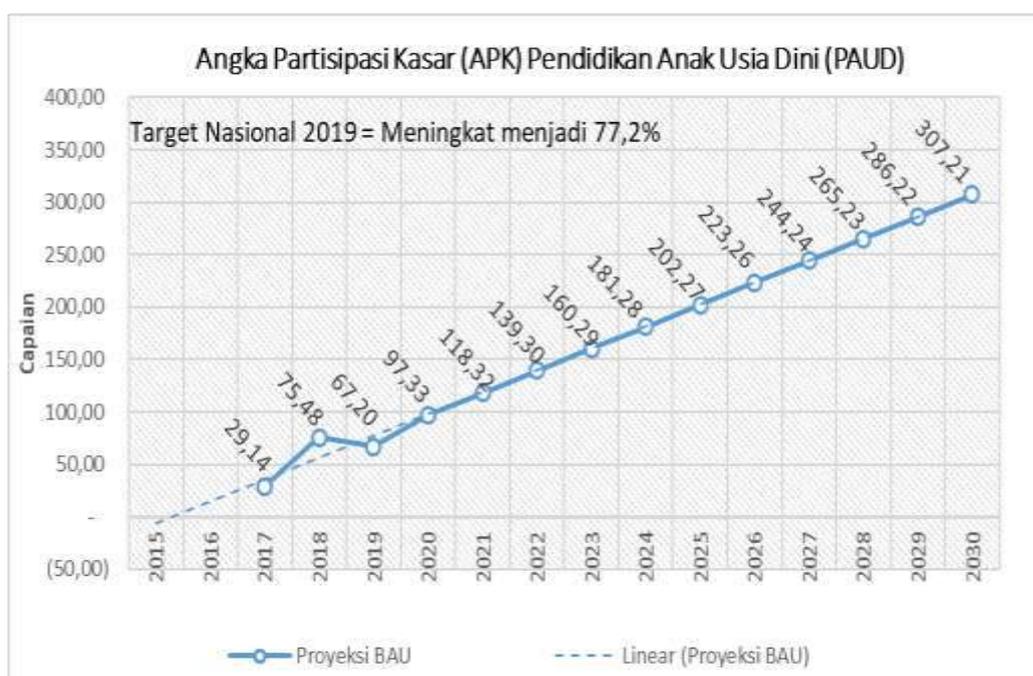
dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.2.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pada tahun 2019 adalah 67,20%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 77,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 223,26% dan tahun 2030 sebesar 307,21%. Capaian indikator ini telah memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		29,14
2018		75,48
2019		67,20
Proyeksi		
2020	97,33	
2026	223,26	
2030	307,21	



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas**Rekomendasi:**

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan PAUD
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program pengembangan kurikulum
- d. Kegiatan:
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.19. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.3.1.(a)

Keterangan: Indikator ini sama dengan indicator 4.1.1.(f) pada point 6.2.16.

6.2.20. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

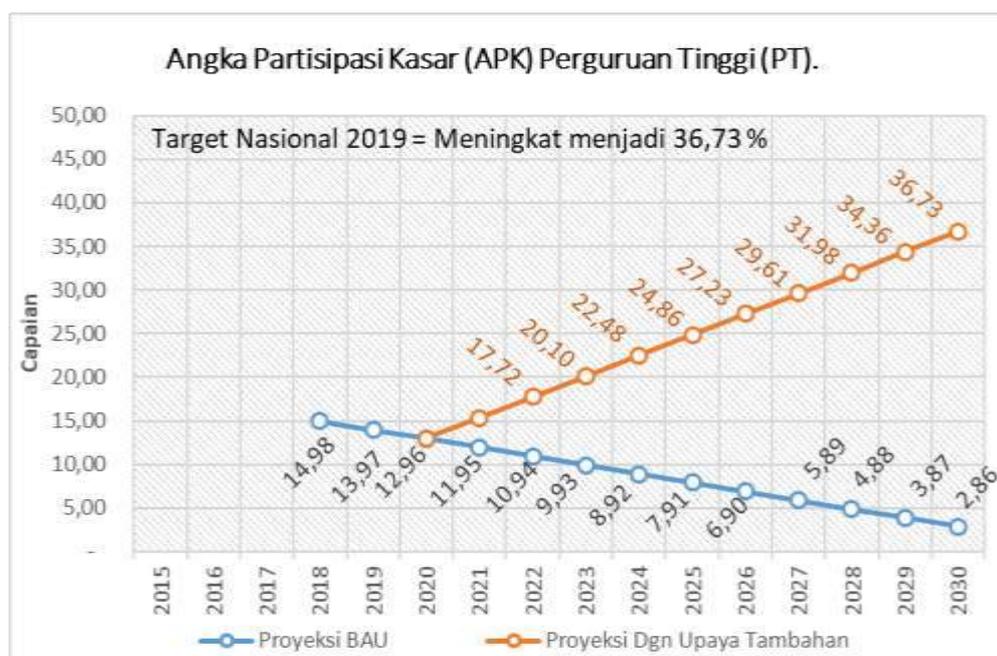
Nomor Indikator: 4.3.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) sampai pada tahun 2019 adalah 13,97%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 36,73%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian

pada tahun 2026 sebesar 6,90% dan tahun 2030 sebesar 2,86%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 27,23% dan tahun 2030 sebesar 36,73%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		
2018		14,98
2019		13,97
Proyeksi		
2020	12,96	12,96
2026	6,90	27,23
2030	2,86	36,73



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
- d. Kegiatan:

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6.2.21. Indikator Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

Nomor Indikator: 4.4.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sampai pada tahun 2019 adalah 0,20. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,20 tahun dan tahun 2030 sebesar 0,20 tahun. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 42,08% dan tahun 2030 sebesar 70,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		0,20
Proyeksi		
2020	0,20	0,20
2026	0,20	42,08
2030	0,20	70,00



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
 - Pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi
- c. Outcome/Program:
 - Program Aplikasi Informatika
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Kegiatan:
 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pelaksana Kegiatan:
 - Dinas Komunikasi dan Informatika

6.2.22. Indikator Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

Target: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-

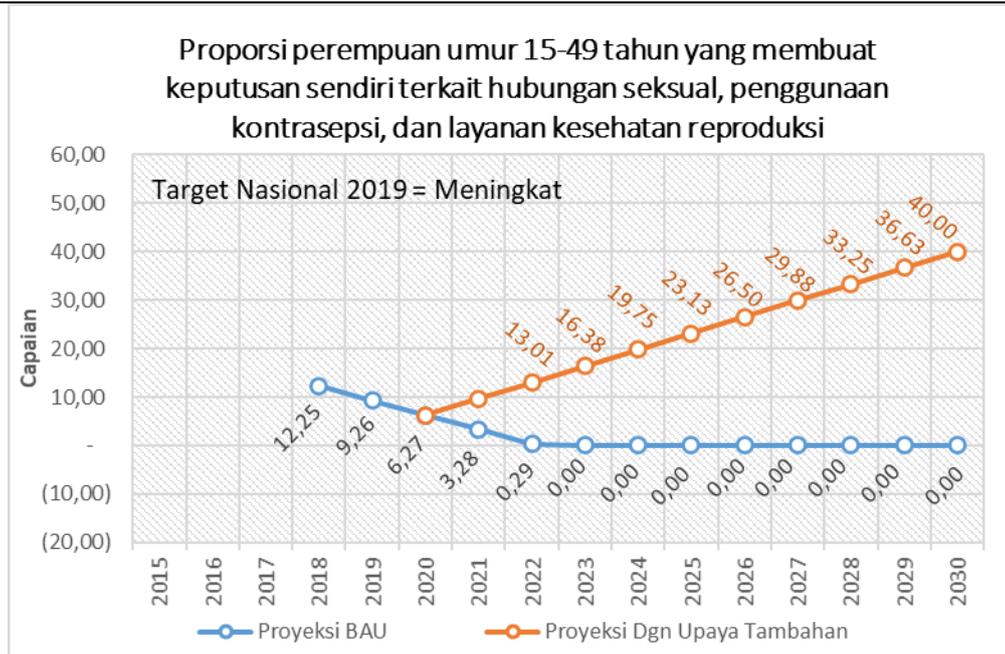
dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Nomor Indikator: 5.6.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi sampai pada tahun 2019 adalah 9,26%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,0% dan tahun 2030 sebesar 0,0%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 26,50% dan tahun 2030 sebesar 40,0%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		
2018		12,25
2020		9,26
Proyeksi		
2019	6,27	6,27
2026	0,00	26,50
2030	0,00	40,00



Isu Strategis: Kesetaraan Gender

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.

c. Outcome/Program:

- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

d. Kegiatan:

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas KBP3A

6.2.23. Indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator: 9.2.2*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur sampai pada tahun 2019 adalah 0,04%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,00% dan tahun 2030 sebesar 0,00%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 15,02% dan tahun 2030 sebesar 25,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	0,08	
2016	0,12	
2017	0,10	
2018	0,08	

2020	0,04	
Proyeksi		
2019	0,04	0,04
2026	0,00	15,02
2030	0,00	25,00



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Tenaga Kerja Formal dan informal

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (pencari kerja).

c. Outcame/Program:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan dan pembangunan industri

d. Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry

Kabupaten/Kota e. Instansi pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi UKM - Bappeda - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

6.2.24. Indikator Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Nomor Indikator: 16.1.3.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:
Capaian indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur sampai pada tahun 2019 adalah 1,25%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 2,02% dan tahun 2030 sebesar 2,46%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 0,54% dan tahun 2030 sebesar 0,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		
2018		1,14
2019		1,25
Proyeksi		
2020	1,36	1,36
2026	2,02	0,54
2030	2,46	0,00



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan lingkungan

c. Outcame/Program:

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Perlindungan Perempuan

d. Kegiatan:

- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Satpol PP dan Damkar
- Kepolisian

6.2.25. Indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Nomor Indikator: 16.5.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sampai pada tahun 2019 adalah 3,70%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 4,0. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 3,88% dan tahun 2030 sebesar 3,98%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 3,90% dan tahun 2030 sebesar 4,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	3,59	
2016		
2017	3,71	
2018	3,66	
2019	3,70	
Proyeksi		
2020	3,73	3,73
2026	3,88	3,90
2030	3,98	4,00



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan pendampingan dan pengawasan
- c. Outcome/Program:
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- d. Kegiatan:
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pendampingan dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- e. Instansi pelaksana:
 - Inspektorat

6.2.26. Indikator Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

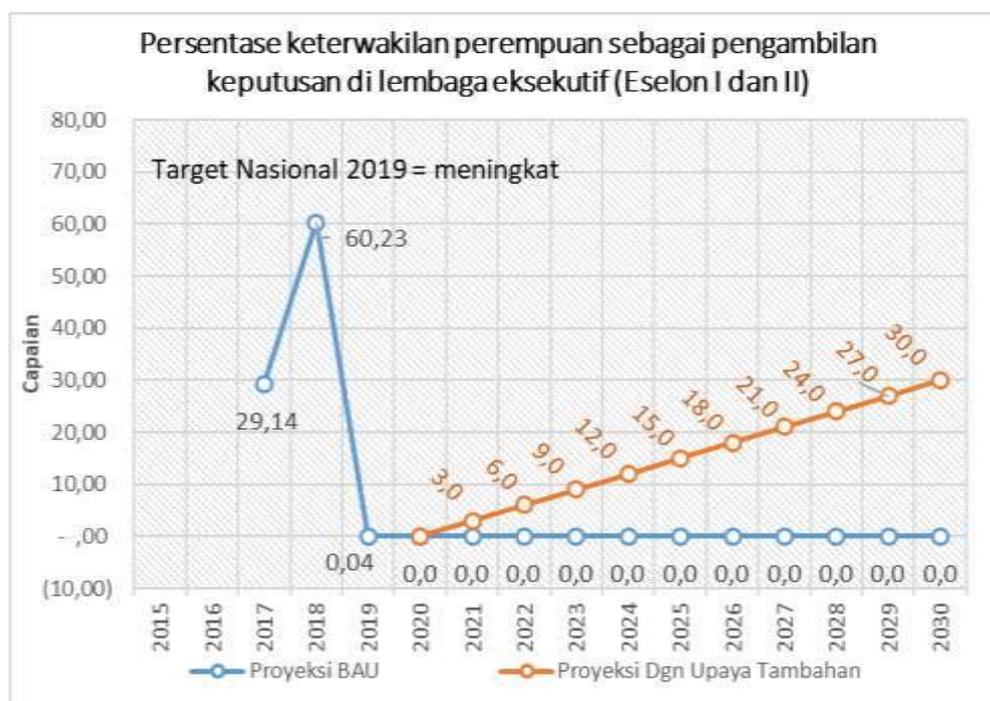
Nomor Indikator: 16.7.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir sampai pada tahun 2019 adalah 0,04. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di

tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,0 dan tahun 2030 sebesar 0,0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 18,0 dan tahun 2030 sebesar 30,0. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015		
2016		
2017		29,14
2018		60,23
2019		0,04
Proyeksi		
2020	0,0	0,0
2026	0,0	18,0
2030	0,0	30,0



Isu Strategis: Hukum & Tata Kelola

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.

- c. Outcome/Program:
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. Kegiatan:
- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota.
 - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas KBP3A

6.2.27. Indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Nomor Indikator: 16.9.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah sampai pada tahun 2019 adalah 42,96%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,0 dan tahun 2030 sebesar 100,0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 35,14 dan tahun 2030 sebesar 20,0. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2015	5,36	
2016	9,43	
2017	35,59	
2018	38,84	
2019	42,96	
Proyeksi		
2020	57,82	57,82
2026	100,0	35,14

2030	100,0	20,00
------	-------	-------



Isu Strategis: Hukum & Tata Kelola

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- c. Outcome/Program:
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Rehabilitasi Sosial
- d. Kegiatan:
 - Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Penyelenggaraan pencatatan sipil
 - Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza diluar panti sosial
- e. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Dinas Sosial

6.3. Program dan Kegiatan di luar indikator TPB

A. Bidang Perhubungan

Program:

1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Kegiatan:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
4. Persetujuan hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten/Kota

B. Bidang Pariwisata

Program:

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Kegiatan:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota
5. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
7. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
8. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
9. Penyediaan prasarana d(zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota

C. Bidang Pekerjaan Umum

Program:

Penyelenggaraan jalan

Kegiatan:

Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota

6.4. Skenario Proyeksi Keuangan KLHS RPJMD 2021-2026

Keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Berdasarkan pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga 2019 didapatkan pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 7,66 persen. Dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata 77,36% dari total pendapatan daerah sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 9,43% dan pendapatan lain berkisar 13,21%.

Mendasarkan pada kebijakan pengelolaan keuangan diatas, ditetapkan proyeksi APBD Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 yang dihitung menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2015-2019 berada pada angka diatas 5%.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu berada pada angka diatas 5%.
3. Pendapatan Pajak Daerah naik rata-rata sebesar 10,00% per tahun.
4. Pendapatan retribusi daerah naik rata-rata 10,00% per tahun.

5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 6 % per tahun.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 10% per tahun.
7. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak naik rata-rata 5 % per tahun.
8. Dana Alokasi Umum (DAU) naik 3% per tahun.
9. Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat 9,00% per tahun.
10. Dana bagi hasil pajak dari provinsi naik sebesar 10,00% per tahun.

Skenario proyeksi keuangan dengan menggunakan data keuangan yang ada pada tahun sebelumnya, maka didapatkan nilai pendapatan seperti terlihat pada Tabel 6.1. Tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu diproyeksi menjadi 2.356,24 miliar rupiah dan di tahun 2026 meningkat menjadi 2.459,88 miliar rupiah. PAD di tahun 2021 diprediksi menjadi 426,82 miliar rupiah dan meningkat menjadi 514,75 miliar rupiah di tahun 2026. Pendapatan transfer di tahun 2021 diproyeksi menjadi 1.834,42 miliar rupiah dan di tahun 2026 diproyeksi menjadi 1.850,13 miliar rupiah. Pendapatan lain diproyeksi sebanyak 95 miliar rupiah yang sama untuk tahun 2021 hingga tahun 2026.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 6.2. Pada Tahun 2021 total belanja daerah diprediksi menjadi 2.416,24 miliar rupiah dan meningkat menjadi 2.509,14 miliar rupiah di tahun 2026. Peningkatan belanja daerah sebagian besar diakibatkan oleh belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada

Tabel **6.3**. Pada Tahun 2021 total pembiayaan daerah diprediksi menjadi 60 miliar rupiah dan meningkat menjadi 70 miliar rupiah di tahun 2026. Proyeksi tahun 2026 berasal dari penerimaan sebesar 85 miliar dan pengeluaran sebesar 15 miliar rupiah.



Tabel 6.1 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

URAIAN	Pendapatan (juta rupiah)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	2.356.240,16	2.373.432,93	2.393.485,93	2.415.085,64	2.436.981,46	2.459.883,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	426.820,43	440.993,47	457.966,34	476.424,33	495.115,59	514.748,74
Pendapatan Pajak Daerah	171.883,58	180.477,76	189.501,65	198.976,73	208.925,57	219.371,85
Pendapatan Retribusi Daerah	18.975,21	17.873,86	18.509,60	19.511,59	19.620,44	19.729,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.155,14	25.462,47	28.007,90	30.808,61	33.889,46	37.278,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212.806,50	217.179,38	221.947,20	227.127,39	232.680,12	238.368,60
PENDAPATAN TRANSFER	1.834.419,73	1.837.439,46	1.840.519,58	1.843.661,31	1.846.865,87	1.850.134,52
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.381.807,52	1.381.807,52	1.381.807,52	1.381.807,52	1.381.807,52	1.381.807,52
Dana Bagi Hasil Pajak	42.753,14	42.753,14	42.753,14	42.753,14	42.753,14	42.753,14
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.502,66	1.502,66	1.502,66	1.502,66	1.502,66	1.502,66
Dana Alokasi Umum	1.006.102,38	1.006.102,38	1.006.102,38	1.006.102,38	1.006.102,38	1.006.102,38
Dana Alokasi Khusus	331.449,34	331.449,34	331.449,34	331.449,34	331.449,34	331.449,34
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	288.055,71	288.055,71	288.055,71	288.055,71	288.055,71	288.055,71
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	36.735,21	36.735,21	36.735,21	36.735,21	36.735,21	36.735,21
Pendapatan Dana Desa	251.320,50	251.320,50	251.320,50	251.320,50	251.320,50	251.320,50
Transfer Pemerintah Provinsi*)	164.556,50	167.576,23	170.656,35	173.798,08	177.002,64	180.271,29
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	150.986,50	154.006,23	157.086,35	160.228,08	163.432,64	166.701,29
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Pendapatan Hibah	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Pendapatan Dana Darurat						
Pendapatan lainnya						

Tabel 6.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

URAIAN	Belanja (juta rupiah)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA OPERASI	1.678.695	1.716.904	1.732.123	1.809.840	1.785.786	1.806.693
Belanja Pegawai	1.134.610	1.141.464	1.149.931	1.157.349	1.168.600	1.179.960
Belanja Barang	485.531	522.084	526.292	543.921	558.313	573.086
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	56.054	50.857	53.400	106.070	56.373	51.146
Belanja Bantuan Sosial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	340.707	303.941	312.809	300.644	320.588	300.788
Belanja Tanah	15.862	12.350	14.622	11.681	15.723	12.561
Belanja Peralatan dan Mesin	110.513	101.069	106.123	101.429	111.750	106.807
Belanja Gedung dan Bangunan	53.411	45.317	51.388	50.335	49.304	48.294
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.359	137.111	131.797	127.456	133.118	121.389
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.297	7.827	8.609	9.470	10.417	11.459
Belanja Aset Lainnya	264	267	270	272	275	278
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
TRANSFER	393.339	394.088	395.054	396.102	397.107	398.164
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa**)	19.086	19.835	20.801	21.849	22.855	23.911
Bagi Hasil Pajak	17.188	18.048	18.950	19.898	20.893	21.938
Bagi Hasil Retribusi	1.898	1.787	1.851	1.951	1.962	1.973
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	374.253	374.253	374.253	374.253	374.253	374.253
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	373.176	373.176	373.176	373.176	373.176	373.176
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
JUMLAH	2.416.240	2.418.433	2.443.486	2.510.086	2.506.981	2.509.144

Sumber: Kabupaten Tanah Bumbu dan Angka, 2020 (diolah)

Tabel 6.3 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

RAIAN	Pembiayaan (juta Rupiah)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENERIMAAN DAERAH	85.000,00	85.000,00	85.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dari selisih Bayar	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN DAERAH	25.000,00	40.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam	-	-	-	-	-	-

RAIAN	Pembiayaan (juta Rupiah)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Kembali Pinjaman	-	-	-	-	-	-
Pengembalian Sisa Dana Transfer DPPID	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO	60.000,00	45.000,00	50.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	0	0	0	0	0

Upaya meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya yang mengandalkan sumber daya yang bersifat market output, dikembangkan pemanfaatan sumber daya yang bersifat unpriced market (seperti rekreasi, budaya lokal dan landscape) sebagai salah satu produk jasa lingkungan. Pengembangan jasa lingkungan akan menjadi salah satu produk unggulan yang dapat memadukan pilar ekonomi dan pilar lingkungan (ekonomi lingkungan/ekonomi hijau) yang akan berdampak pada pilar sosial dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengembangan jasa lingkungan ini selain meningkatkan pendapatan daerah, juga akan menekan eksternalitas negatif berupa kehilangan (deplesi) dan kerusakan (degradasi) dari pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian pengembangan jasa lingkungan ini diharapkan dapat menjawab isu utama pembangunan berkelanjutan dalam KLHS kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata (pegunungan, pesisir dan pulau kecil) akan menjadi salah satu program unggulan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Upaya mendapatkan sumber pendanaan lainnya, pemerintah kabupaten Tanah Bumbu akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak guna mendukung pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Koordinasi dan kerjasama ini dilakukan antara lain dengan unsur pemerintah (Pusat/ APBN, Provinsi/APBD Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya), Dunia Usaha/swasta (Investasi, KPBU, CSR dan lainnya) serta kerjasama untuk menggerakkan swadaya/partisipasi masyarakat.

BAB VII KESIMPULAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200).

Secara umum Kabupaten Tanah Bumbu masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 86 indikator (46,49%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 39 indikator (21,08%), tidak ada data sebanyak 60 indikator (32,43%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 0 indikator.

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 12 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 27 indikator.

Dalam melaksanakan tugas tim pembuat KLHS RPJMD yang dibentuk oleh Keputusan Bupati Tanah Bumbu melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. (2018). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*. Gadjah Mada University Press.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2019). Data Curah Hujan 2018. Provisi Kalimantan Selatan.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (2018). Updating data lahan kritis. Provinsi Kalimantan Selatan.
- Australia, E. (1999). *Incineration and dioxins: review of formation processes, consultancy report prepared by environmental and safety services for environment Australia*. Canberra: Commonwealth Department of the Environment and Heritage.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kabupaten Tanah Bumbu (2020). Kabupaten Tanah Bumbu dalam angka tahun 2020. Kabupaten Tanah Bumbu.
- Kabupaten Tanah Bumbu (2020). Badan Pusat Statistik tahun 2020. Kabupaten Tanah Bumbu.
- Millenium Ecosystem Assessment MA (2005) *Ecosystems and human well-being: wetlands and water*. World Resources Institute, Washington, DC.
- Nellemann et al. (2009). *Estimated that 55% of C would be removed by photosynthesis and stored by coastal ecosystems*. The concept of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) are introduced to estimate the important ecosystem service.
- Partidario, M.R. (1996). Strategic Environmental Assessment: Key Issues Emerging from Recent Practice. *Environmental Impact Assessment Review* 16(1), 31-55.
- Partidário, M.R. & Clark R. (eds) (2000). *Perspectives on Strategic Environmental Assessment*. Boca Raton, FL: CRC-Lewis.
- Partidario, M.R. & Arts, J. 2005. Exploring the Concept of Strategic Environmental Assessment Follow-Up. *Impact Assessment & Project Appraisal* 23(3), 246-257.
- Provinsi Kalimantan Selatan ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 2019 status lahan.
- Republik Indonesia (1990). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Republik Indonesia (1990). Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Republik Indonesia (1999). Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah ahan berbahaya dan beracun (B-3).
- Republik Indonesia (2001). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

- Republik Indonesia (2007). Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Republik Indonesia. (2016) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Republik Indonesia. (2017). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
-

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sadler dan Verheem, (1996). Strategic environmental assessment (SEA) is a tool developed for assessing the impacts that may be incurred through the implementation of plans, programmes and higher-level policy decisions.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si., dilahirkan di Tamattia Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 April 1963. Penulis menempuh pendidikan S1 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1986), S2 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1996), dan S3 di Universitas Brawijaya, Malang (lulus tahun 2014). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 1989 sampai sekarang 2020 dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari

presiden Republik Indonesia.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, jurnal Nasional, dan internasional yang di antaranya terindeks Scopus. Kemampuan orasi, presentasi, serta pengetahuan yang luas di bidang bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) membawa penulis menjadi pembicara di berbagai konferensi dan seminar di bidang Pengelolaan DAS dan PSDAL.

Penulis sebagai Tenaga Ahli/Narasumber Penyelenggaraan KLHS: RPJMD, RTRW, RZWP3K, RDTR dan KSP RTR pada level regional dan nasional. Telah mengikuti TOT, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait KLHS. Selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH dan AMDAL.

Penulis telah melakukan berbagai riset di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) dan Pengelolaan DAS diantaranya: The recovery of Tabonio Watershed through enrichment planting using ecologically and economically valuable species in South Kalimantan, Indonesia (1996), Power recovery support Tabunio Watershed based on analysis of erosion based on geographic information system in the Province of South Kalimantan (2017); Identification of Characteristics of Land Cover in Mangkauk Catchment Area Using Support Vector Machine (SVM) And Artificial Neural Network (2017); Carrying Capacity Of Satui Watershed In South Kalimantan Province, Indonesia (2018); Analysis Of The Level Of Erosion Hazard In The Framework Of The Green Revolution In Watershed Maluka Province South Kalimantan (2019).

BIODATA PENULIS



Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom., dilahirkan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Juli 1974. Penulis menempuh pendidikan S1 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1999), S2 di ITS, Surabaya (lulus tahun 2007), dan S3 di Universitas Brawijaya, Malang (lulus tahun 2017). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 2002 sampai sekarang dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari presiden Republik Indonesia.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, Jurnal Nasional, dan Internasional, di antaranya terindeks Scopus. Kemampuan orasi, presentasi, serta pengetahuan yang luas di bidang Pengelolaan Citra Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Hidrologi.

Penulis sebagai Tenaga Ahli/Narasumber Penyelenggaraan KLHS: RPJMD, RTRW, RDTR dan KSP RTR pada level regional dan nasional. Penulis telah mengikuti TOT, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait KLHS. Selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH .

Penulis telah melakukan berbagai riset diantaranya: The recovery of Tabunio Watershed through enrichment planting using ecologically and economically valuable species in South Kalimantan, Indonesia (2016), Identification of Characteristics of Land Cover in Mangkauk Catchment Area Using Support Vector Machine (SVM) And Artificial Neural Network (2017); Carrying Capacity Of Satui Watershed In South Kalimantan Province, Indonesia (2018); Analysis of Environmental Vulnerability Using Satellite Imagery and Geographic Information System in Coal Mining Area Planning at Banjar Regency (2020).

BIODATA PENULIS



Baharuddin, S.Kel., M.Si. berasal dari Buton Sulawesi Tenggara anak ke empat dari pasangan H. Abdul Sabur dan Siti Lutfiah, kelahiran 10 Oktober 1979. Pendidikan Sarjana di tempuh di Jurusan Ilmu Kelautan-Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan Magister di Program Studi Oseanografi-Institut Pertanian Bogor lulus tahun 2006 dan diterima sebagai Staf Pengajar Ilmu Kelautan-FPK ULM tahun 2008. Berbagai kegiatan survei oseanografi dan pemetaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti

Ekspedisi Celebes (1999), Kab. Takalar, Kepulauan Spermonde (2001), Kota Makassar, Kab. Yapen Waropen, Kab. Majene, Kab. Morowali dan Kab. Sinjai (2002), Kab. Alor, Muara Angke Jakarta, Kab. Tanjung Jabung Barat, Lombok Timur, Kab. Kapuas, Kab. Nias, Kab. Anambas, Kab. Aceh Singkil dan Kota Langsa (2005-2007). Tahun 2010 – 2020 terlibat pada berbagai kegiatan survei dan pemodelan oseanografi, pencemaran, pemetaan sumberdaya pulau-pulau kecil dan penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beberapa kabupaten pesisir dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur.

Tahun 2017 – 2020 terlibat sebagai tenaga ahli/narasumber dalam penyusunan KLHS diberbagai kebijakan perencanaan diantara KLSH RZWP-3-K, KSP RTRR, RTRW, RDTR, RPJP dan RPJMD, selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH, IKPLHD dan AMDAL. Terlibat aktif di beberapa organisasi seperti Ketua DPW ISKINDO Kalsel, ISLA, HAPPI, MAPIN, Forum DAS dan International Society for Mangrove Ecosystems (ISME).

Penulis juga mengampu Mata Kuliah Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Oseanografi Fisika, Pencemaran Laut, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut, Survei Hidrografi, AMDAL Pesisir dan Laut, SIG dan Remote Sensing Kelautan, Dinamika Pantai dan Estuari dan Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut. Tahun 2018 menyusun buku ajar Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau. Beberapa publikasi/karya ilmiah telah dimuat di jurnal dan diantaranya terindeks Scopus.

BIODATA PENULIS



Sadang Husain, S.Pd., M.Sc., dilahirkan di Bone Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Juni 1986. Penulis menempuh pendidikan S1 di Untad, Palu Sulawesi Tengah (lulus tahun 2009) dan S2 di UGM, Yogyakarta (lulus tahun 2012). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam (MIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 2014 sampai sekarang 2021.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, jurnal Nasional, dan internasional yang diataranya terindeks Scopus. Penulis juga merupakan ketua redaksi dari jurnal fisika flux yang terindeks SINTA 3.

Penulis telah mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup stratgeis diantaranya workshop penyusunan KLHS RPJMD tahun 2019, bimtek penyusunan KLHS RPJMD bagi provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan PILKADA serentak tahun 2020, dan webinar-webinar sejenis. Penulis juga sebagai anggota Tenaga Ahli Penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2020. Penulis telah melakukan beberapa riset di bidang lingkungan diantaranya Species Density and Lead (Pb) Pollution in Mangrove Ecosystem, South Kalimantan (2020) dan Heavy Metal (Pb and Cu) and Bacterial Contamination in Mudskipper, Eeltail Catfish and Mud Clam at Kuala Tambangan Mangrove Ecosystem, South Kalimantan (2020). Penelitian lain yang telah dilakukan lebih banyak ke material lingkungan di antaranya Identifikasi Bijih Besi dengan Metode Geolistrik di Tanah Laut (2017), Characterization of briquette from halaban charcoal and coal combustion ashes (2018), Synthesis and characterization of Fe₃O₄ magnetic nanoparticles from iron ore (2019), dan Potensi Limbah Arang Kayu Alaban (*Vitex pubescens* Bahl), Abu Dasar dan Abu Terbang Batubara Sebagai Bahan Briket (2020).

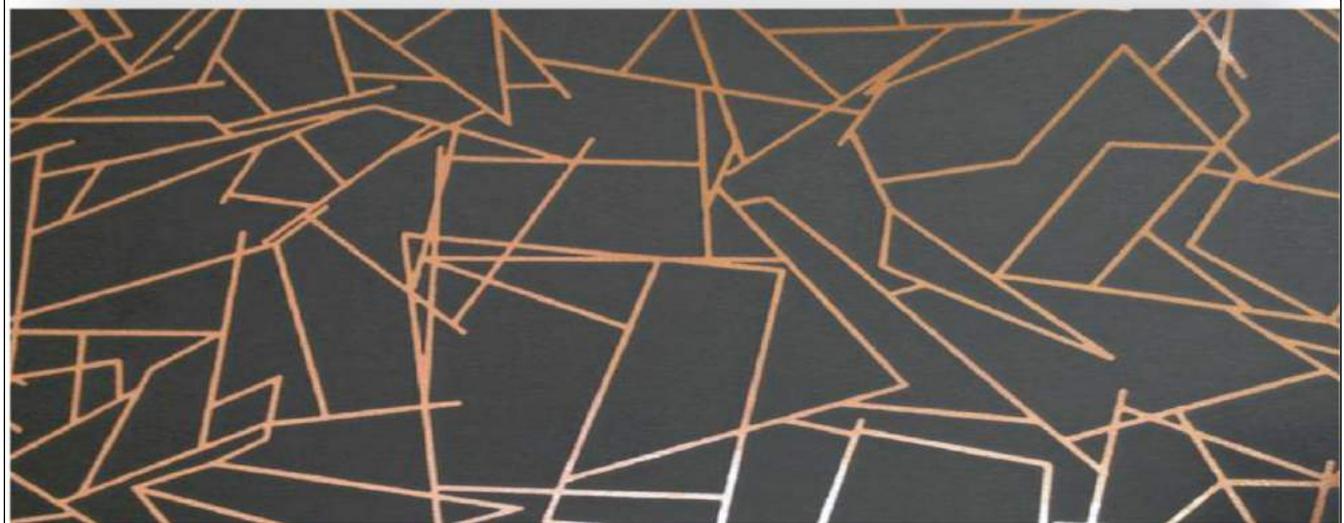
BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM., dilahirkan di Watampone pada tanggal 17 Mei 1959. Menempuh Pendidikan Dasar dan Menengah di Surabaya, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (lulus tahun 1983), S2 di Universitas Krisnadwipayana (lulus tahun 2000) dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (lulus tahun 2012). Sejak bulan September 2016 menjadi Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), baik pada S1 maupun S2 (Ekonomi Pembangunan). Selain di FEB, mengajar juga pada Magister Administrasi Pembangunan dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat ULM.

Sebelum menjadi dosen, sekitar 32 tahun sebagai praktisi pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Beberapa jabatan struktural yang pernah diemban adalah Kepala Seksi Rencana Karya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (1988 – 1994), Kepala Cabang Dinas Kehutanan / KPH Wilayah Kotabaru (1994 – 1999), Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1999 – 2001), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2001 – 2005) dan Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru (2006 – 2016).

Saat ini sedang fokus menekuni bidang untuk perkuliahan, kajian, penelitian dan pendampingan yang berkaitan dengan Manajemen Pembangunan Daerah, antara lain Perencanaan Pembangunan Daerah, Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah, serta Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.



Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang dan tidak harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 tujuan utama yakni berkelanjutan ekologis yakni menjamin eksistensi sumber daya alam, berkelanjutan ekonomi yakni efisiensi ekonomi serta berkelanjutan sosial yakni keanekaragaman budaya



Penerbit CV. BATANG
Jl. Alalak Utara RT. 02. RW 01
Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin
Utara 70125
Telp. 081350010956

ISBN 978-623-95666-7-8

